

Izza Mafruhah, dkk.

MIGRASI DAN PERMASALAHAN

SEBUAH OVER VIEW KONDISI DI INDONESIA



**MIGRASI DAN PERMASALAHAN
SEBUAH OVER VIEW KONDISI
DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Izza Mafruhah, dkk

**MIGRASI DAN PERMASALAHAN
SEBUAH OVER VIEW KONDISI
DI INDONESIA**

CV. Djiwa Amarta Press - Solo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Migrasi dan Permasalahan Sebuah Over View Kondisi di Indonesia. Cetakan I. CV. Djiwa Amarta Press. Surakarta. 2017
viii + 115 hal; 14.8x21 cm

MIGRASI DAN PERMASALAHAN SEBUAH OVER VIEW KONDISI DI INDONESIA

Hak Cipta© Izza Mafruhah,dkk. 2017

Penulis

Izza Mafruhah, SE., M.Si
Dra. Nunung Sri Mulyani, M.Si
Nurul Istiqomah, SE., M.Si

Editor

Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum

Ilustrasi Sampul

cakraArtDesign

Penerbit

CV. Djiwa Amarta Press
Jl. Awan RT 03/RW 21 Gulon, Jebres, Surakarta
Email: djiwaamartapress@gmail.com
Telp. 081938709199

Cetakan I, Edisi I, Desember 2017
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

ISBN 978-602-60585-6-0

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah atas terselesainya buku mengenai Migrasi dan Permasalahannya, sebuah over view kondisi di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data – data kepustakaan, literatur terkait, data – data sekunder dan primer yang terkait dengan migrasi.

Buku ini mencoba memberikan beberapa permasalahan *backward dan forward* tentang migrasi yang dimulai dari permasalahan demografi, di mana migrasi merupakan salah satu dari permasalahan utama yang mempengaruhi struktur demografi suatu negara, teori – teori kependudukan, yang akan dikombinasikan dengan teori tenaga kerja dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Migrasi sebagai sebuah bahasan akan menjadi salah satu bab dalam buku ini yang berisikan teori migrasi dan beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan migrasi baik secara global maupun nasional. Pada bab berikutnya penulis akan membahas tentang migrasi di Indonesia, TKI dan permasalahan yang dihadapi. Buku akan ditutup dengan beberapa peraturan perundangan tentang migrasi dan langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun BUMN dalam menyelesaikan permasalahan TKI.

Buku ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada BNP2TKI khususnya kepada bapak Edi Subagyo, mantan sekretaris utama BNP2TKI, bapak Agusdin, Deputi penempatan, bapak AB Rahman, kepala BP3TKI Jawa Tengah, sahabat dan teman yang senantiasa membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Di akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I DEMOGRAFI DAN PERMASALAHANNYA	1
A. Kependudukan	1
B. Teori Kependudukan	7
C. Struktur Kependudukan	11
BAB II KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	19
A. Kondisi Kependudukan Secara Nasional	19
B. Kondisi Kependudukan per Propinsi	21
BAB III KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	27
A. Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja	27
B. Teori – teori Ketenagakerjaan	30
C. Permintaan Tenaga Kerja	32
D. Penawaran Tenaga Kerja	36
E. Elastisitas Tenaga Kerja	38
F. Angkatan Kerja dan Pengangguran	39
G. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia	44
H. Sistem Perencanaan Tenaga Kerja di Indonesia	46
BAB IV MIGRASI	51
A. Pengertian Migrasi	51
B. Teori – Teori Migrasi	53
C. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi	57
D. Karakter Migrasi	63
E. Penelitian tentang Migrasi Internasional	64
BAB V REMITANSI	67
A. Pengertian Remitansi	67
B. Pemanfaatan Remitansi	69
C. Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	73
D. Hasil Penelitian Tentang Remitansi	78

BAB VI TENAGA KERJA INDONESIA	87
A. Sejarah Migrasi di Indonesia	87
B. Tenaga Kerja Indonesia	89
C. Data Tenaga Kerja Indonesia	90
D. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia	97
E. Remitansi Tenaga Kerja Indonesia	105
BAB VII PERATURAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA	109
A. Peraturan Perundangan	109
B. Program Kebijakan BUMN/Swasta yang Mendukung Fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia	113
C. Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mendukung Fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB 1

DEMOGRAFI DAN PERMASALAHANNYA

A. Kependudukan

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk termasuk perubahan – perubahan yang terus berjalan karena adanya kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria – kriteria yang sesuai dengan kebutuhan meliputi pendidikan, kesehatan, aspek social, ekonomi dan ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dan keagamaan. Ilmu kependudukan tersebut berhubungan dengan matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, kedokteran dan statistika. Dalam kependudukan terdapat tiga komponen penting yang perlu kita perhatikan yaitu *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migration* (perpindahan). Faktor pendukung kependudukan dalam suatu wilayah adalah perkawinan dan mobilitas social.

Kependudukan tidak mempelajari penduduk secara individu, tetapi penduduk secara agregat dalam suatu wilayah tertentu baik internasional nasional, regional maupun lokal. Kependudukan mempunyai fungsi kuantitatif sehingga sering dihubungkan dengan ilmu statistic. Variabel – variable dalam kependudukan senantiasa berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Semakin lama

kebutuhan masyarakat semakin banyak dan berkembang sehingga akan Informasi tentang kependudukan menjadi sangat *urgent* (penting) untuk menyusun perencanaan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi kependudukan akan digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah daerah, informasi kependudukan yang lengkap akan membantu perencanaan program kerja yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Sebagai contoh jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu acuan dalam penghitungan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi, jumlah manula, jumlah angkatan kerja dan informasi kependudukan baik yang umum maupun spesifik akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan prioritas program kerja baik jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun rencana kerja tahunan.

Salah satu program kerja pemerintah yang terbukti fenomenal dan mengubah peta kependudukan di Indonesia adalah Keluarga Berencana (KB).

- b. Bagi pengusaha, Informasi kependudukan akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan produk yang akan dibuat, jenis dan model produk yang dibuat, peluang pasar yang akan dituju, segmentasi dan sebagainya. Dengan memahami kependudukan maka pengusaha akan bisa melakukan diferensiasi produk yang tepat dan mampu meningkatkan jumlah penjualan.
- c. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat swasembada dan swadaya khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sector kependudukan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat kemajuan dan kemakmuran suatu Negara. Semakin sejahtera individu – individu dalam masyarakat maka akan semakin makmur suatu Negara.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, terdapat tiga komponen utama kependudukan yaitu *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migration* (perpindahan) yang merupakan unsur penting dalam pembangunan sebuah negara. Tiga komponen tersebut secara rinci bisa ditunjukkan dalam sub bab sebagai berikut:

A.1. Angka Kelahiran

Angka Kelahiran, merupakan salah satu komponen utama dalam laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Angka kelahiran kasar mempunyai pengertian jumlah bayi yang lahir hidup pada setiap 1.000 penduduk selama periode 1 tahun. Angka tersebut akan memberikan gambaran mengenai pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dan bagaimana struktur penduduknya. Angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan penduduk berstruktur muda, permintaan akan kebutuhan fisik baik private maupun public akan bertambah, khususnya di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan.

Faktor yang dapat mendorong angka kelahiran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pernikahan di usia muda;
- 2) Adanya beberapa anggapan di masyarakat, bahwa a) anak sebagai penentu status sosial; b) punya banyak anak merasa terpandang di mata masyarakat; c) anak sebagai penerus keturunan; d) banyak anak banyak rezeki.

Selain faktor pendorong di atas, terdapat pula faktor-faktor penghambat angka kelahiran, di antaranya yaitu:

- 1) Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Alasan ekonomi atau pendidikan, orang menunda perkawinan;
- 3) wanita karier, merasa repot jika mempunyai anak banyak;
- 4) Karena suatu penyakit tertentu yang diderita perempuan, seperti kanker rahim, atau keguguran ketika melahirkan;

Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sumber daya alam dan efisiensi secara tidak langsung mempunyai pengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat. Struktur penduduk muda biasanya dimiliki oleh negara – negara sedang berkembang.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mencanangkan program keluarga berencana (KB). Tujuan Keluarga Berencana adalah sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk terbukti Program KB yang kemudian berubah menjadi gerakan KB adalah salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang sangat berhasil dan mampu menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan angka kelahiran.

A.2. Angka Kematian

Angka kematian kasar (*crude death rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa besar kematian yang terjadi per 1000 penduduk. Pada kasus umum, persentase kematian pada usia tua lebih besar dibandingkan usia muda. Angka kematian kasar merupakan indicator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk, selain itu juga bisa dipakai sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Semakin rendah angka kematian kasar mengindikasikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian antara lain

- a) adanya bencana alam dan wabah penyakit;
- b) fasilitas kesehatan yang kurang;
- c) tingkat kesehatan masyarakat yang rendah;
- d) makanan kurang bergizi;
- e) kecelakaan lalu lintas;
- f) adanya peperangan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tingginya angka kematian antara lain

- a) fasilitas kesehatan yang lengkap;
- b) kemajuan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
- c) larangan agama membunuh orang;
- d) makanan cukup bergizi;
- e) lingkungan yang bersih dan teratur.

Angka kelahiran kasar dan angka kematian secara bersama – sama akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Ukuran kesejahteraan yang lain adalah angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Terdapat banyak sebab dalam kasus kematian ibu dan bayi selain karena aspek kesehatan atau fisiologis, kasus kematian juga dipengaruhi oleh permasalahan sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi anak – anak, faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di daerah.

A.3. Migrasi

Secara harfiah migrasi diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik masih dalam konteks suatu negara atau pemerintahan maupun sudah menyeberangi batasan politik dan administrasi, baik menetap secara permanen maupun menetap sementara. International Organisations of Migration (IOM) menjelaskan bahwa migrasi terdiri dari perpindahan yang sifatnya legal maupun illegal, pengungsi karena politik, keamanan, bencana alam maupun karena faktor – faktor ekonomi. Migrasi secara ekonomi sering dijelaskan sebagai

perpindahan penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja (IOM 2010).

Migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja. Pada konsep lama, migrasi lebih banyak dilakukan antar wilayah atau daerah dalam satu negara, namun pada tiga dasa warsa terakhir, dimulai sejak awal tahun 1980an, konsep migrasi di Indonesia sudah berubah paradigmanya menjadi migrasi Internasional.

Migrasi tidak hanya berpengaruh dalam meningkatkan ukuran populasi, tetapi juga mengubah piramida usia bagi negara tujuan dan negara asal. Migran cenderung lebih terkonsentrasi di kelompok usia muda dan produktif secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk asli sehingga akan memberikan kontribusi pada pengurangan rasio ketergantungan (Gagnon 2014).

Migrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di mana penduduk akan mengalir dari daerah yang miskin ke daerah kaya, daerah peperangan ke daerah aman, daerah dengan kesempatan kerja rendah khususnya ke daerah dengan kesempatan kerja tinggi. Migrasi akan membawa dampak bukan hanya pada daerah yang tujuan namun juga pada daerah asal.

Ketiga indikator tersebut yaitu angka kelahiran, angka kematian dan migrasi secara bersama – sama akan mempengaruhi kondisi kependudukan di suatu Negara, baik secara umum maupun khusus untuk bidang ketenagakerjaan.

B. Teori Kependudukan

Teori kependudukan mulai banyak dibahas setelah munculnya kekhawatiran semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia sementara lahan yang digunakan untuk tinggal dan hidup terbatas, menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Keterbatasan lahan akan menghasilkan bahan pangan yang terbatas sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kelaparan massal bagi masyarakat dunia, habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan menimbulkan perebutan penguasaan sumber daya tersebut.

Peningkatan kebutuhan hidup penduduk yang selama ini disokong oleh alam akan menyebabkan perusakan terhadap alam dan lingkungan hidup sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan yang di masa depan akan merugikan bagi masyarakat dunia. Salah satu tanda – tanda serius terjadinya kerusakan lingkungan adalah pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem seperti yang terjadi akhir – akhir ini.

Para ahli kependudukan mulai memberikan pendapat dan gagasan yang terangkai dalam teori – teori kependudukan sejak awal abad 18, dengan beberapa tokoh utama yang memberikan peran dan warna dalam penentuan teori – teori para ahli abad – abad berikutnya. Terdapat beberapa perbedaan yang significant dari masing – masing teori yang telah dibangun namun semuanya mengacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia.

Pemikiran ini menyebabkan kependudukan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Beberapa tokoh yang berperan dalam teori kependudukan antara lain Robert Malthus, Karl Marx, Warren Thompson,

B.1. Robert Malthus (1766 – 1834)

Robert Malthus adalah ahli politik ekonomi berasal dari Inggris. Kepeduliaannya kepada masalah kependudukan didorong oleh kekhawatiran atas bertambahnya penduduk yang tak terkendali karena kelahiran. Terdapat 2 tulisan penting yang dibuat yaitu *The Principle of Population (1798)* dan *A Summary View of The Principle of Population (1830)*. Teori Malthus yang terkenal adalah bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan mengikuti deret hitung. Teori tersebut mengandung arti bahwa jumlah penduduk akan naik dengan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kenaikan jumlah bahan makanan. Pendapat Malthus menyatakan bahwa hukum alamiah (*natural law*) akan berpengaruh atau menentukan pertumbuhan penduduk, penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan penambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh adanya wabah penyakit, malapetaka, bencana alam dan perang.

Teori Malthus ini dikembangkan oleh ahli – ahli generasi berikutnya disebut sebagai *Neo Malthusian* antara lain Paul Ehrlich, Garret Hardin dan Meadow. Pada tahun 1871, Paul Ehrlich menulis buku *The Population Bomb* yang kemudian direvisi menjadi *The Population Explosion*, yang intinya adalah (a) Sudah terlalu banyak manusia di bumi, (b) Keadaan bahan makanan sangat terbatas, (c) Lingkungan akan menjadi rusak apabila populasi manusia meningkat.

Teori – teori tersebut diperkuat oleh analisis yang dilakukan Meadow melalui buku *The Limit Growth* yang menarik hubungan antara variable lingkungan yang terdiri atas penduduk, produksi pertanian, produksi industry, sumber daya alam dan polusi. Permasalahan ini apabila tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan adanya *population disaster* (bencana populasi).

B.2. Karl Marx

Teori Marxist yang berangkat dari pemahaman Karl Marx berbeda dengan Malthus yang menganggap bahwa tekanan penduduk akan menyebabkan tekanan pada penyediaan bahan makanan. Karl Marx berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan produksi meningkat sehingga kekurangan bahan pangan akan terpenuhi. Menurut Karl Marx pertumbuhan penduduk menyebabkan masalah pada kesempatan kerja.

Permasalahan ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan miskin bukan disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk, namun karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh, sebenarnya hal ini bisa diselesaikan oleh Negara. Namun institusi tidak punya keberanian untuk mengambil kebijakan dan program yang berkaitan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang akan mendorong peningkatan pendapatan dan pengatasan atas masalah – masalah kependudukan.

Manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam organisasi ekonomi baik yang memproduksi barang maupun jasa. Secara teori semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang siap ditawarkan di pasar kerja. Ketrampilan (*skill*) yang tinggi pada sumber daya manusia akan mendukung produktivitas yang terus meningkat. Hal ini akan semakin bertambah apabila SDM bisa berjalan bersanding dengan teknologi dan tidak saling menggantikan.

Pemikiran tersebut di atas mendasari teori Karl Marx yang menyebabkan manusia tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Peningkatan kesejahteraan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk menyediakan bahan makanan akan bisa diatasi dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara. Pada kondisi ini maka penduduk akan menjadi modal dasar dalam pembangunan secara organisasi ekonomi maupun secara nasional.

B.3. Teori/Mazhab Fisiologi

Mazdhab fisiologi mendasarkan pertumbuhan penduduk berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Thomas Jarold salah satu pendukung utama teori ini adalah seorang tabib (ahli kesehatan) menyatakan bahwa reproduksi manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani seseorang. Semakin manusia bekerja keras secara fisik maupun psikisnya maka akan mengurani kemampuannya untuk bereproduksi. Teori ini menyatakan bahwa tidak perlu terdapat kekhawatiran antara bahan makanan dan jumlah penduduk karena pasti akan berjalan seimbang dengan semakin majunya kondisi suatu masyarakat.

Ahli lain dalam teori ini adalah Michael Thomas Sadler menyatakan bahwa semakin lama kemampuan seseorang bereproduksi berkurang, dan menuju ceteris patibus. Jika jumlah penduduk itu bertambah dan kemampuan menurunkan keturunan itu akan berkurang dan jika jumlah penduduk itu berkurang maka kemampuan menurunkan keturunan akan bertambah, sehingga akan terjadi keseimbangan.

B.4. Teori Transisi Demografi

Tokoh utama teori ini adalah Warren Thompson (1929), teori ini didasari oleh pada fenomena yang terjadi pada abad 20 setelah berahirnya perang dunia pertama yang menunjukkan adanya gejala pertumbuhan penduduk yang semakin melambat. Warren Thompson melakukan observasi dan menemukan adanya teori transmisi demografis yang menunjukkan bahwa terdapat empat tahap pertumbuhan dan berubahnya penduduk yaitu:

1. Angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran, menghasilkan angka pertumbuhan nol atau yang sering disebut sebagai *Zero population Growth (ZPG)*

2. Angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran akan menghasilkan angka pertumbuhan positif dan meningkat
3. Angka kematian terus menerus disertai dengan menurunnya angka kelahiran akan menghasilkan pertumbuhan positif tapi menurun
4. Angka kematian dan angka kelahiran rendah maka hasilnya akan semakin berkurang dan menuju pada nol

C. Struktur Kependudukan

Struktur penduduk adalah penggolongan penduduk menurut ciri tertentu. Struktur penduduk disebut juga komposisi atau susunan penduduk, merupakan pembentuk komposisi penduduk, yang bisa diklasifikasikan menurut: (a) Karakteristik demografi, (b) Karakteristik social, (c) Karakteristik ekonomi dan (d) Karakteristik geografi/ persebaran.

Secara social ekonomi, struktur Kependudukan berguna untuk

1. Mengetahui sumberdaya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin
2. Mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan
3. Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lain
4. Mengetahui proses demografi yang terjadi (melalui piramida penduduk)

Susunan penduduk dibedakan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Susunan penduduk menurut umur biasanya dikelompokkan dengan jarak masing-masing 4 tahun. Susunan penduduk tersebut biasa dikenal dengan istilah piramida penduduk. Piramida penduduk dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Bentuk piramida muda (*Expansive*) yaitu bentuk piramida yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Bentuk piramida penduduk muda bagian atasnya besar, makin ke puncak makin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh, jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian (jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari usia dewasa). Karakteristik negara yang disebut dengan penduduk muda adalah apabila jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai 40 % atau lebih dari jumlah seluruh penduduk.

Ciri penduduk struktur muda:

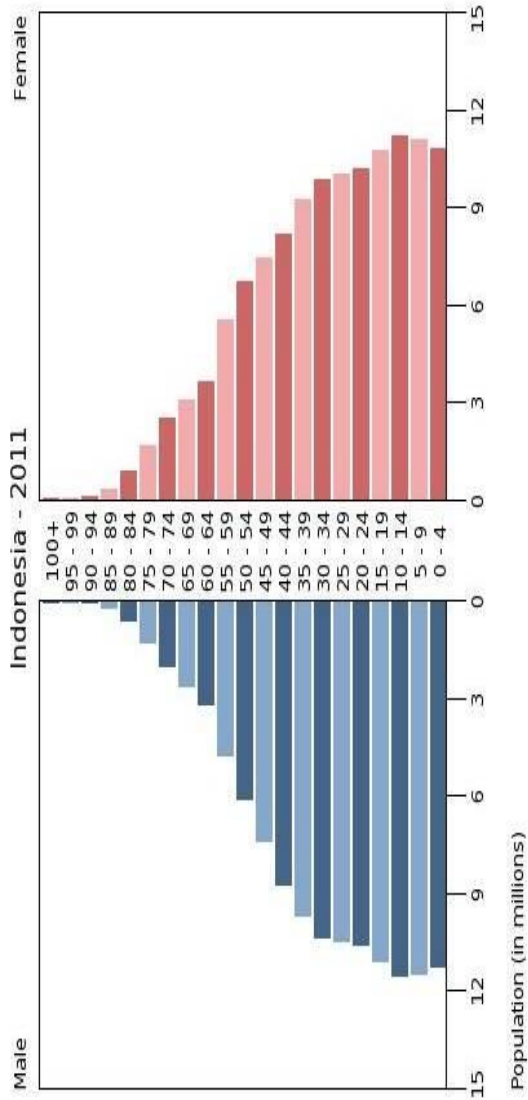
- (i) Sebagian besar penduduk dalam usia muda (di bawah 15 tahun)
- (ii) Kondisi penduduk mengalami pertumbuhan yang cepat
- (iii) Angka pertumbuhan penduduk tinggi
- (iv) Angka kelahiran bayi tinggi sementara angka kematian usia tua semakin rendah karena tingkat kesehatan yang semakin membaik

Bentuk piramida muda ini banyak dimiliki oleh negara – negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena adanya pola pikir tradisional tentang (a) pemikiran usia perkawinan yang mendorong masyarakat untuk kawin muda (b) adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan (c) Kurang berhasilnya sosialisasi keluarga berencana.

Konsekwensi struktur penduduk dengan piramida muda ini adalah adanya angka ketergantungan yang relatif tinggi karena jumlah penduduk usia produktif yang rendah sementara jumlah penduduk usia muda tinggi, artinya jumlah anggota keluarga non produktif yang harus ditanggung oleh anggota keluarga yang produktif lebih besar

Bentuk piramida muda sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Bentuk Piramida Muda



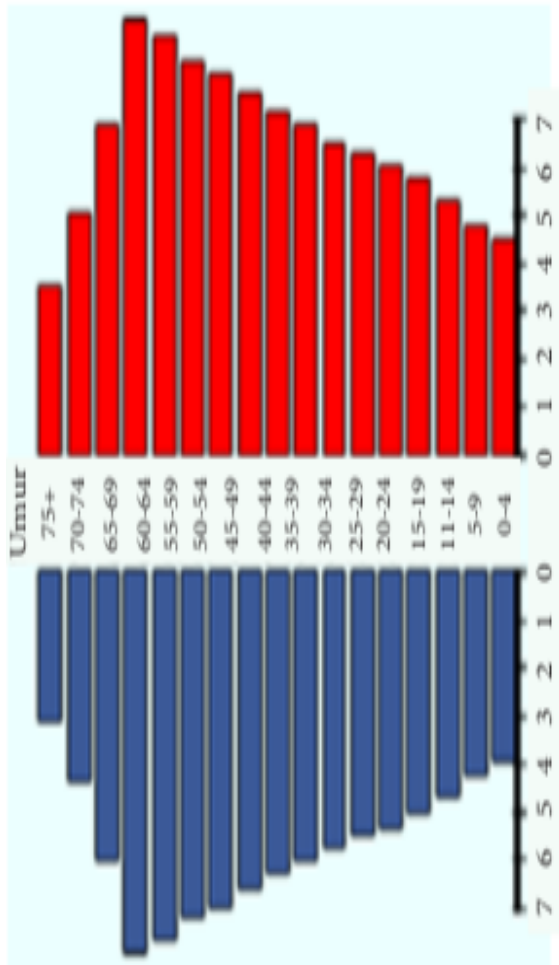
b) Bentuk piramida tua (**constrictive**) yaitu bentuk piramida yang menunjukkan kondisi masyarakat berusia tua lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia muda. Bentuk piramida ini di bagian bawah kecil dan di bagian atas besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Jumlah penduduk mengalami penurunan.

Ciri – ciri penduduk struktur penduduk usia tua adalah

- (i) Sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia dewasa atau tua dan jumlah penduduk usia muda sangat sedikit, kurang dari 30% sementara jumlah penduduk usia tua di atas 10%
- (ii) Tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian
- (iii) Pertumbuhan penduduk terus berkurang.

Bentuk piramida tua ini banyak dimiliki oleh negara – negara yang sudah maju, di mana kaum perempuannya banyak yang tidak mau bereproduksi karena alasan karier. Selain itu tingkat kemajuan bidang kesehatan juga menjadi salah penyebab struktur penduduk tua. Diseluruh dunia penduduk Lansia (usia 60 +) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Diperkirakan mulai tahun 2010 akan terjadi ledakan jumlah penduduk lanjut usia. Hasil prediksi menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77 persen dari total penduduk pada tahun 2010 dan menjadi 11,34 persen pada tahun 2020. Bentuk Piramida Tua sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2. Bentuk Piramida Tua

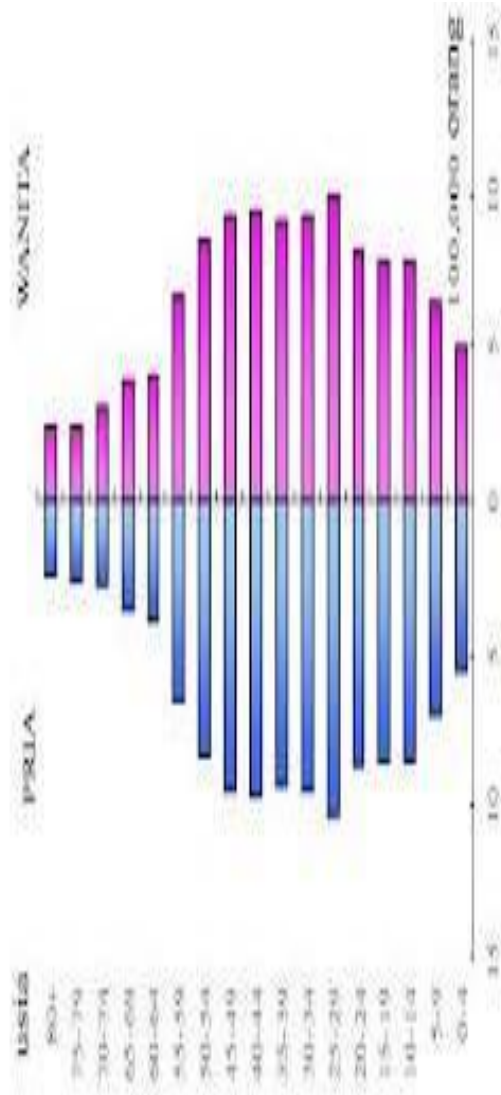


c) Bentuk piramida tetap (*stationary*) Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal ini menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa. Kondisi ini yang diharapkan oleh hampir semua negara di dunia, di mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai atau mendekati 0% atau sering disebut sebagai *Zero Population Growth (ZPG)*. Ciri – ciri struktur penduduk usia tetap ini adalah:

- (i) Jumlah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama,
- (ii) Tingkat kelahiran rendah,
- (iii) Tingkat kematian rendah,
- (iv) Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat

Program Keluarga Berencana (KB) mencanangkan pada tahun 2020 bangsa Indonesia sudah mencapai ZPG, namun dengan kondisi Indonesia saat ini, ZPG menjadi sulit tercapai. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) Indonesia 2,6 dan mengalami stagnasi selama 10 tahun. Target menurunkan TFR pada tahun 2015 menjadi 2,1 tidak tercapai. Berdasarkan ketidak tercapaian hasil tersebut, maka BKKBN melakukan penyesuaian TFR secara bertahap sebagai berikut yakni 2,3 pada tahun 2015; 2,2 pada tahun 2020; dan 2,1 pada tahun 2025. Jika target tercapai, penduduk Indonesia diproyeksikan menjadi 281,5 juta pada tahun 2025 dan 330 juta jiwa pada tahun 2050. Jika target tidak tercapai, maka akan terjadi peledakan penduduk Indonesia yang pada gilirannya akan menjadi beban bagi anggaran Negara khususnya dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti penyediaan pangan, layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan kesempatan kerja. Struktur piramida tetap atau *stationary* bisa ditunjukkan pada gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3. Bentuk Piramida stasioner



BAB II

KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

A. Kondisi Kependudukan secara Nasional

Negara Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada periode awal setelah tumbanganya orde lama, yaitu pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1990an. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya keamanan negara, tumbuhnya kesempatan bagi penduduk untuk bekerja dan berusaha serta bertambahnya sarana kesehatan. Kondisi kependudukan semacam ini memang umum terjadi pada negara – Negara yang sedang berkembang. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 1971 sampai 2010 adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Indonesia tahun 1971 - 2010

Tahun	Jumlah Penduduk
1971	119.208.229
1980	147.490.298
1990	179.378.946
1995	194.754.808
2000	206.264.595
2010	237.641.326

Sumber: BPS , 2013

Data angka pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1967 sampai 1990 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1967 – 1990

Tahun	Pertumbuhan penduduk
1967 - 1970	5,6 %
1971 – 1975	5,2 %
1976 – 1979	4,7 %
1980 – 1984	4,1 %
1987 – 1990	3,2 %
1990 – 2000	1,49%
2000 – 2012	1,49 %

Sumber: BPS diolah

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia mencanangkan program keluarga berencana (KB). Tujuan Keluarga Berencana adalah sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk terbukti Program KB yang kemudian berubah menjadi gerakan KB adalah salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang sangat berhasil dan mampu menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan angka kelahiran.

Angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada akhir tahun 1970an, kemudian menurun seiring dengan mulai digerakkannya program Keluarga Berencana, berdasarkan Undang – Undang No 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana yang menyatakan bahwa KB adalah upaya untuk peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB tersebut terbukti berhasil dengan semakin menurunnya angka pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara langsung peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan mampu mengembangkan perekonomian secara nasional dan kemampuan bersaing di pasar global.

Seiring dengan masa reformasi, perubahan beberapa kebijakan menyebabkan Keluarga Berencana bukan lagi menjadi salah satu prioritas pembangunan, kampanye KB semakin menurun, dukungan dana terhadap program KB semakin sedikit. Faktor lain yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli alat kontrasepsi. Di sisi lain kehidupan masyarakat yang mulai permisif dan terjadinya degradasi moral di kalangan anak muda menyebabkan naiknya usia pernikahan dini. Kondisi ini menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa angka pertumbuhan penduduk akan kembali meningkat.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, rata – rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia kembali naik menjadi 1,49%. Angka pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan mencapai 0,37%, disusul oleh Propinsi Jawa Timur sebesar 0,76%, sementara angka pertumbuhan tertinggi terjadi di Propinsi Papua yang mencapai 5,39% disusul Propinsi Kalimantan Timur sebanyak 3,81%. Kondisi Papua ini sangat memprihatinkan karena beberapa indikator kualitas penduduk yang lain relative rendah antara lain IPM yang hanya mencapai 65,36 sementara angka rata – rata nasional sudah mencapai 72,77.

B. Kondisi Kependudukan Per Propinsi

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut propinsi dari waktu ke waktu terlihat adanya perbedaan variasi. Secara rata – rata terjadi penurunan yang signifikant pada periode tahun 1990 – 2000 yang menunjukkan keberhasilan program KB satu decade sebelumnya.

Tapi pada periode tahun 2000 – 2010 di beberapa provinsi kembali terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara rinci data pertumbuhan penduduk per provinsi akan ditunjukkan dalam table 2.3. berikut ini

Tabel 2.3 Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut Propinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Nanggroe Aceh Darussalam	2.93	2.72	1.46	2.36
Sumatera Utara	2.60	2.06	1.32	1.10
Sumatera Barat	2.21	1.62	0.63	1.34
Riau	3.11	4.30	4.35	3.58
Jambi	4.07	3.40	1.84	2.56
Sumatera Selatan	3.32	3.15	2.39	1.85
Bengkulu	4.39	4.38	2.97	1.67
Lampung	5.77	2.67	1.17	1.24
Bangka Belitung	-	-	0.97	3.14
Kepulauan Riau	-	-	-	4.95
DKI Jakarta	3.93	2.42	0.17	1.41
Jawa Barat	2.66	2.57	2.03	1.90
Jawa Tengah	1.64	1.18	0.94	0.37
DI Yogyakarta	1.10	0.57	0.72	1.04
Jawa Timur	1.49	1.08	0.70	0.76
Banten	-	-	3.21	2.78
Bali	1.69	1.18	1.31	2.15
Nusa Tenggara Barat	2.36	2.15	1.82	1.17
Nusa Tenggara Timur	1.95	1.79	1.64	2.07
Kalimantan Barat	2.31	2.65	2.29	0.91
Kalimantan Tengah	3.43	3.88	2.99	1.79

Kalimantan Selatan	2.16	2.32	1.45	1.99
Kalimantan Timur	5.73	4.42	2.81	3.81
Sulawesi Utara	2.31	1.60	1.33	1.28
Sulawesi Tengah	3.86	2.87	2.57	1.95
Sulawesi Selatan	1.74	1.42	1.49	1.17
Sulawesi Tenggara	3.09	3.66	3.15	2.08
Gorontalo	-	-	1.59	2.26
Sulawesi Barat	-	-	-	2.68
Maluku	2.88	2.79	0.08	2.80
Maluku Utara	-	-	0.48	2.47
Papua Barat	-	-	-	3.71
Papua	2.67	3.46	3.22	5.39
INDONESIA	2.31	1.98	1.49	1.49

Catatan : Tidak Termasuk Timor Timur

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 ,2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

Tabel 2.3. di atas menunjukkan di propinsi – propinsi mengalami peningkatan laju pertumbuhan meskipun di beberapa propinsi yang lain terjadi penurunan laju pertumbuhan, sehingga pada periode 2000 – 2010 laju pertumbuhannya relative sama yaitu sebesar 1,49%.

Data kependudukan tersebut menyebabkan target utama pada saat penancangan Keluarga Berencana (KB) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai ZPG (*Zero Population Growth*) tahun 2020 menjadi sulit untuk dicapai. ZPG adalah keadaan di mana penduduk tidak mengalami perubahan jumlah dari waktu ke waktu. Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk diperkirakan masih pada kisaran 0,99%.

Menyikapi kondisi kependudukan sekarang ini, maka disahkanlah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar untuk

melakukan revitalisasi kebijakan kependudukan di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, UU tersebut memberikan kesempatan yang besar untuk mengelola kebijakan kependudukan secara memadai dengan mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UU No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan terbentuknya BKKBD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun sampai dengan akhir tahun 2012 belum ada tanggapan yang serius dari masing – masing daerah untuk mewujudkan amanah UU tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara nasional masalah kependudukan di Indonesia dari aspek pengendalian kuantitas cenderung mengalami stagnasi. Kinerja kependudukan baik level pemerintah pusat maupun daerah hanya berjalan di tempat. Di sisi lain kesenjangan laju pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan dua masalah utama yaitu kesenjangan dalam kualitas penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata juga. Di masa yang akan datang ketidak merataan persebaran penduduk ini akan berimbas pada tidak meratanya aktivitas pembangunan dan pemerataan hasil – hasilnya bagi seluruh penduduk di Indonesia.

Dampak lain dengan adanya laju pertumbuhan penduduk ini menyebabkan struktur penduduk Indonesia cenderung mengalami perubahan dan berbeda untuk tiap propinsi. Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali merupakan propinsi dengan struktur menua karena keberhasilan laju penurunan penduduk, sementara propinsi yang lain masih pada struktur penduduk yang muda.

Secara nasional piramida Penduduk Indonesia tahun 2000 dibandingkan tahun 2010 menunjukkan sedikit perubahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Piramida kependudukan Indonesia 2000 - 2010



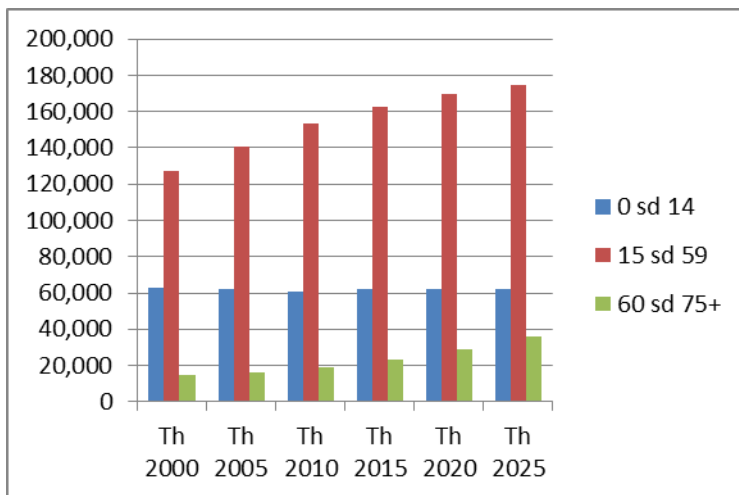
Sumber: BPS 2010

Piramida kependudukan pada gambar 2.1. tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada penduduk usia muda dan meningkatnya penduduk usia tua, meski belum begitu terlihat perubahan yang significant.

BPS dalam rangka memperkirakan bonus kependudukan melakukan proyeksi atas penduduk usia produktif untuk periode 2015 – 2025 dengan menggunakan dasar tahun 2000 – 2010 dan memperoleh hasil seperti gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Proyeksi penduduk Indonesia menurut kelompok umur produktif tahun 2000 -2025 dengan selisih 5 tahunan (dalam juta jiwa).



Sumber: Proyeksi Kependudukan BPS 2000

Gambar 2.2. tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15 – 60 tahun) yang signifikan. Penduduk usia produktif juga meningkat dan akan semakin tinggi pada tahun 2020 – 2030, apabila diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan seminimal mungkin.

BAB III

KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA

A. Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

A.1. Definisi

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas, namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Indikator *manpower* ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya.

Definisi – definisi dalam ketenagakerjaan berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik. Definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tenaga kerja (*manpower*)** adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
2. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)** adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu

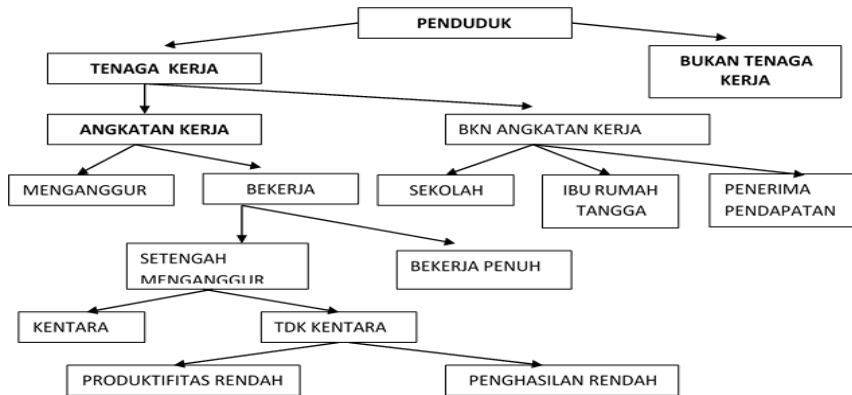
panenan atau cuti. Di samping itu, tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan

3. **Bukan Angkatan Kerja**, adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya yaitu lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental dan lainnya.
4. **Bekerja atau mempunyai pekerjaan** adalah tenaga kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.
5. **Sementara tidak bekerja**, yaitu penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam yaitu:
 - a. Pekerja tetap atau pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatan sementara dan sebagainya
 - b. Petani – petani yang mengusahakan tanah pertanian, menunggu panen, menunggu hujan dan sebagainya.
6. **Pengangguran Terbuka** merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja yang terdiri atas
 - a. Angkatan Kerja yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja),
 - b. Angkatan Kerja yang sedang mempersiapkan suatu usaha,
 - c. Angkatan Kerja yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan
 - d. Angkatan Kerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

7. **Setengah menganggur** adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok:
 - a. **Setengah Penganggur Terpaksa**, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
 - b. **Setengah Penganggur Sukarela**, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.
8. **Upah** adalah imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada
 - a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
 - b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja, UMK
 - c) Produktivitas marginal tenaga kerja.
 - d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha dan
 - e) Perbedaan jenis pekerjaan.
9. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100.
10. **Produk Domestik Regional Bruto** merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** merupakan nilai tambah dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut.
12. **Koefisien tenaga kerja** adalah jumlah kesempatan kerja dibagi dengan keluaran (output)
13. **Elastisitas kesempatan kerja** merupakan rasio antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Secara grafis, skema ketenagakerjaan di Indonesia bisa ditunjukkan pada gambar 3.1. berikut ini:

Gambar 3.1. Skema Ketenagakerjaan di Indonesia



B. Teori-teori Ketenagakerjaan

B.2.1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

B. 2.2. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat

dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

B.2.3. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

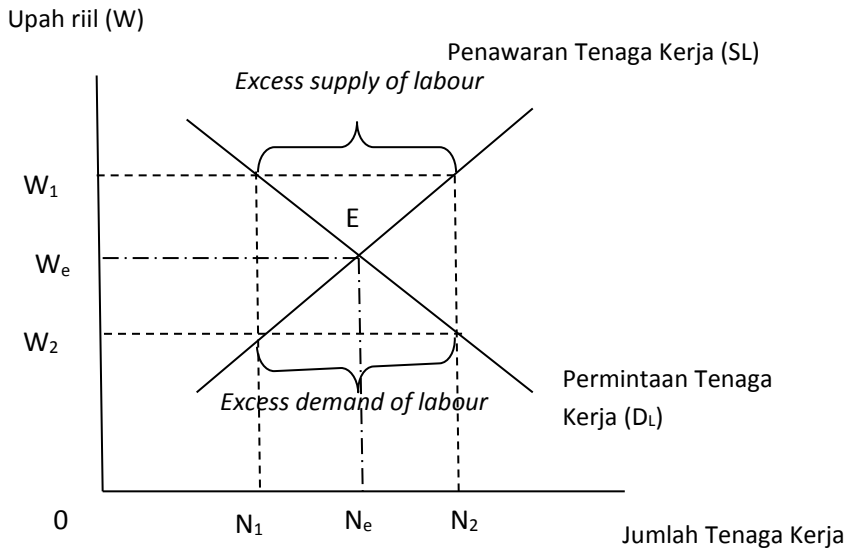
B.2.4. Teori Harrod-domar

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

C. Permintaan Tenaga Kerja

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja seperti yang sudah dibukakan dalam Latar belakang dari pemelihan judul ini adalah ketidak seimbangan akan permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor*) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labor*) dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 3.2: Kurva Penawaran Tenaga Kerja



C.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

a. Tingkat Upah

Yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut efek skala produksi (*scale effect*) dimana sebuah kondisi yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*).

b. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi yang lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama. Yang lebih berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin pengemasan produk makanan yang dulunya berbasis tenaga kerja manusia dan beralih ke mesin-mesin dan robot akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja manusia lebih rendah untuk memproduksi makanan tersebut.

c. Produktivitas tenaga kerja

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 50 karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 9 bulan. Namun dengan karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 25 karyawan dengan waktu 9 bulan. Kita mengetahui bahwa kekuatan permintaan tenaga kerja dalam pekerjaan tertentu sebagian bergantung pada produktivitas (MP). Perusahaan mengontrol kebanyakan faktor-faktor yang menentukan produktivitas pekerja. Tetapi dua cara serikat buruh dapat mempengaruhi output per jam pekerja adalah berpartisipasi dalam komite manajemen produktivitas tenaga kerja gabungan—yang seringkali disebut “lingkaran kualitas”—dan “*codetermination*”, yang terdiri dari partisipasi langsung para pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang sebelumnya juga disebut “demokrasi buruh”. Tujuan kedua pendekatan tersebut adalah memperbaiki komunikasi internal dalam perusahaan dan meningkatkan produktivitas melalui penekanan lebih melalui kerjasama dan insentif profit.

Dalam banyak kasus, serikat buruh telah menolak partisipasi dalam lingkaran kualitas dan *codetermination*, memperdabatkan bahwa program-program ini memperlancar proses tawar menawar dan memperkecil otoritas serikat. Dalam contoh lainnya, serikat setuju untuk berpartisipasi dalam basis eksperimental. Sampai pada saat pendekatan mereka meningkatkan marginal product tenaga kerja, permintaan tenaga kerja akan meningkat, sehingga meningkatkan prospek serikat untuk menegosiasi peningkatan upah.

d. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas

tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

e. Fasilitas Modal

Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lainlain, seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri air minum, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang diminta juga bertambah.

D. Penawaran Tenaga Kerja

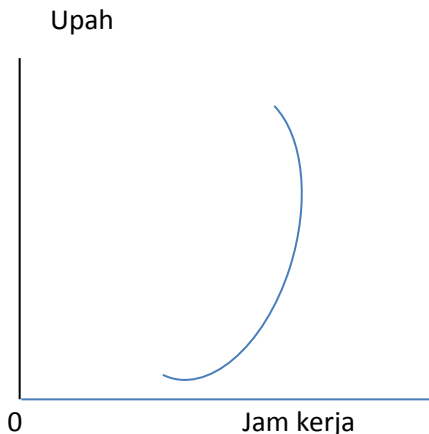
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Menurut G.S Becker (1976), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu peryediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah. Mula – mula slope akan bersifat positif namun kemudian penawaran upah melebihi upah reservasi maka pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja. Hal ini disebut *Backward Bending Supply Curve*, yaitu kondisi di mana tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik sehingga upah yang ditawarkan semakin berkurang. Sebagaimana gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3.

Kurva Penawaran tenaga kerja



Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (*variable proportions*) umumnya

digunakan kurva isokuan (*isoquantities*) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi factor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggambarkan laju substitusi teknis marginal atau *Marginal Rate of Technical Substitution* atau dikenal dengan istilah MRTS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan kapital yang merupakan lereng dari kurva isoquant.

E. Elastisitas Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja (demand of Labor) pada dasarnya adalah tergantung pada output perusahaan/industri dalam konteks mikro, artinya semakin banyak output yang dihasilkan pada akhirnya akan menciptakan permintaan input diantaranya adalah tenaga kerja (labor) sering dikenal dengan derived demand. Sedangkan dalam tataran makro, produksi nasional (GDP, PDB) sangat menentukan laju tambah kesempatan kerja pada suatu perekonomian, artinya kalau ekonomi suatu negara tumbuh (tercermin pada pertumbuhan PDB) maka akan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dalam hal ini penting untuk dianalisis seberapa besar kepekaan perubahan output tersebut terhadap laju tumbuh kesempatan kerja, biasanya dipakai rumus Elastisitas Kesempatan Kerja (Ekk) yang merupakan rasio pertumbuhan output dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Ekk bisa dihitung secara sektoral berdasarkan lapangan pekerjaan/usaha dalam perekonomian. Di Indonesia misalnya ada 9 sektor/lapangan usaha dari pertanian hingga jasa, atau juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar seperti pertanian, industri dan jasa (sering digunakan istilah AMS : Agriculture, Manufactory and Service), penjumlahan/gabungan semuanya akan menjadi Ekk total. Ekk dapat pula dipergunakan sebagai data awal untuk proyeksi ketenagakerjaan melalui beberapa skenario dalam membuat perencanaan untuk kebijakan baik makro maupun mikro

Langkah – langkah yang digunakan untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah:

1. Menghitung laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor dan total sektor kegiatan ekonomi
2. Menghitung laju kesempatan kerja per sektor kegiatan ekonomi
3. Menghitung koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (Ekk) per sektor kegiatan ekonomi yang dihitung dengan formula

$$Ekk = \frac{rkk}{rPDB}$$

F. Angkatan Kerja dan Pengangguran

F.1 Angkatan Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas, namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Indikator *manpower* ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Disamping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Untuk itu kemudian digunakan indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara

tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sementara itu penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah tenaga kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah, dengan angkatan kerja Indonesia pada tahun 2012 adalah sebanyak 116 juta jiwa. Dari angka sebanyak itu, yang bekerja sebanyak 107,41 juta jiwa dan sisanya sebanyak 8,59 juta menganggur penuh sementara 35,42 juta jiwa pada posisi setengah pengangguran. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena pada saat yang sama kesempatan kerja yang ada sangat terbatas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Ali Syahbana menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mampu menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 400 ribu. Artinya dengan pengangguran sebanyak 8,59 juta angkatan kerja, maka apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4 % sampai dengan 5 % pertahun dibutuhkan waktu sekitar 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk menyerap keseluruhan angkata kerja tersebut, itupun dengan asumsi bahwa jumlah pengangguran tidak selalu bertambah setiap tahun. Melihat kondisi dalam negeri yang seperti itu, maka memang berkerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif utama bagi Tenaga Kerja Indonesia yang gagal bersaing masuk di dunia kerja dalam negeri. (*Detik.com, 18 Agustus 2010*).

F.2. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan yang paling berat. Lucas *dalam* Romer (1996) menyatakan bahwa pengangguran disebabkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja membuat kesalahan mengenai upah riil dan melepas pekerjaannya atau menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upah yang terlalu rendah. Pengusaha juga membuat kesalahan tentang permintaan dan kadang-kadang memproduksi dalam jumlah yang terlalu kecil dan sedikit mempekerjakan pekerja. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang rasional, yang melihat ke depan dalam membuat pengharapan, kesalahan akan diperbaiki dengan segera dan pengangguran akan hilang.

Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok:

- Setengah penganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
- Setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dalam perekonomian dibandingkan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. Meskipun demikian, terbuka kemungkinan bagi tingkat permintaan keseluruhannya mencapai taraf cukup tinggi untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja, tetapi bagi

sejumlah besar pekerja berada dalam keadaan menganggur. Para pekerja ini dapat digolongkan sebagai penganggur yang bersifat friksional maupun struktural.

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaklancaran dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebab dari ketidaklancaran ini adalah karena tempat dan waktu. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan dominasi peranan ekonomi setiap sektor dalam kegiatan produksi maupun dalam pemberian kesempatan kerja. Banyak aspek pekerjaan yang mempunyai tuntutan atau persyaratan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja dari sektor atau subsektor lain. Pengangguran dapat juga disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka akan menimbulkan kelesuan pada permintaan tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kurangnya permintaan agregat disini merupakan kondisi dalam jangka panjang. Profil yang perlu diketahui adalah tempat terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, baik disektor pertanian maupun manufaktur, distribusi menurut pendidikan, jenis jabatan dan pekerjaan yang diminati, umur, dan jenis kelamin (Arfida, 2003).

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak pernah surut. Para penganggur akan menjadi kelompok yang terpinggirkan, dan apabila tidak memperoleh penanganan yang serius akan berpotensi sebagai pengganggu stabilitas negara. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat beberapa faktor penyebab masalah pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi konglomerasi yang dijadikan sebagai *engine of growth* oleh Indonesia selama rezim orde baru sangat bertumpu dan mengandalkan aspek pertumbuhan. Pada saat itu perusahaan

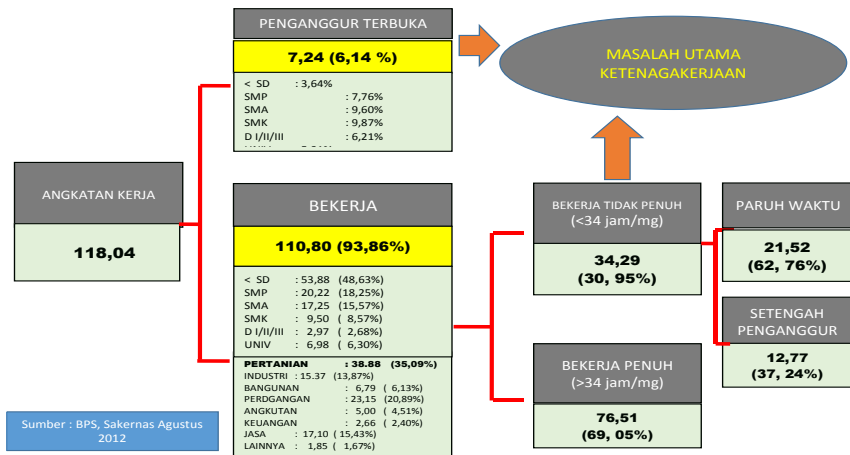
perusahaan besar tumbuh dengan pesat dan memperoleh *privilege* (hak istimewa) dari pemerintah. Akibatnya faktor kesempatan kerja penuh terabaikan, sehingga pengangguran semakin meningkat.

2. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Rendahnya perhatian pemerintah pada bidang pendidikan terlihat dari persentase pengeluaran pemerintah pada bidang tersebut. Pada sisi lain, pendidikan non formal atau pelatihan sebagai cara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai juga belum berjalan sesuai keinginan. Lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola Kementerian melalui Balai Latihan Kerja di masing – masing daerah belum mampu mengimbangi syarat-syarat edukasi yang diminta pihak pengusaha.
3. Daya saing industri. Asumsinya, bila industri memiliki daya saing yang kuat, maka industri akan maju, dan kesempatan kerja akan tercipta, dan pengangguran akan tertekan serendah mungkin. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, daya saing industri di Indonesia masih tergolong rendah, hanya beberapa golongan industri yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri makanan, pengolahan tembakau, industri kayu, industri perabot dan kelengkapan rumah tangga, pulp dan kertas dan industri elektronik. Sementara industri tekstil dan pakaian jadi memiliki daya saing sedang, sedangkan industri kulit dan alas kaki memiliki daya saing rendah.
4. Globalisasi. Pada aspek ketenagakerjaan, aspek turunan dari globalisasi adalah persaingan bebas yang terjadi di dalam dan luar negeri. Pergerakan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain semakin bebas, sehingga menjadi suatu tekanan bagi tenaga kerja yang tidak dapat bersaing. Pada sisi lain, bagi Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.

G. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja namun dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, jumlah penduduk yang tinggi mendorong tingginya angkatan kerja, Secara detail kondisi ketenagakerjaan Indonesia bisa ditunjukkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:

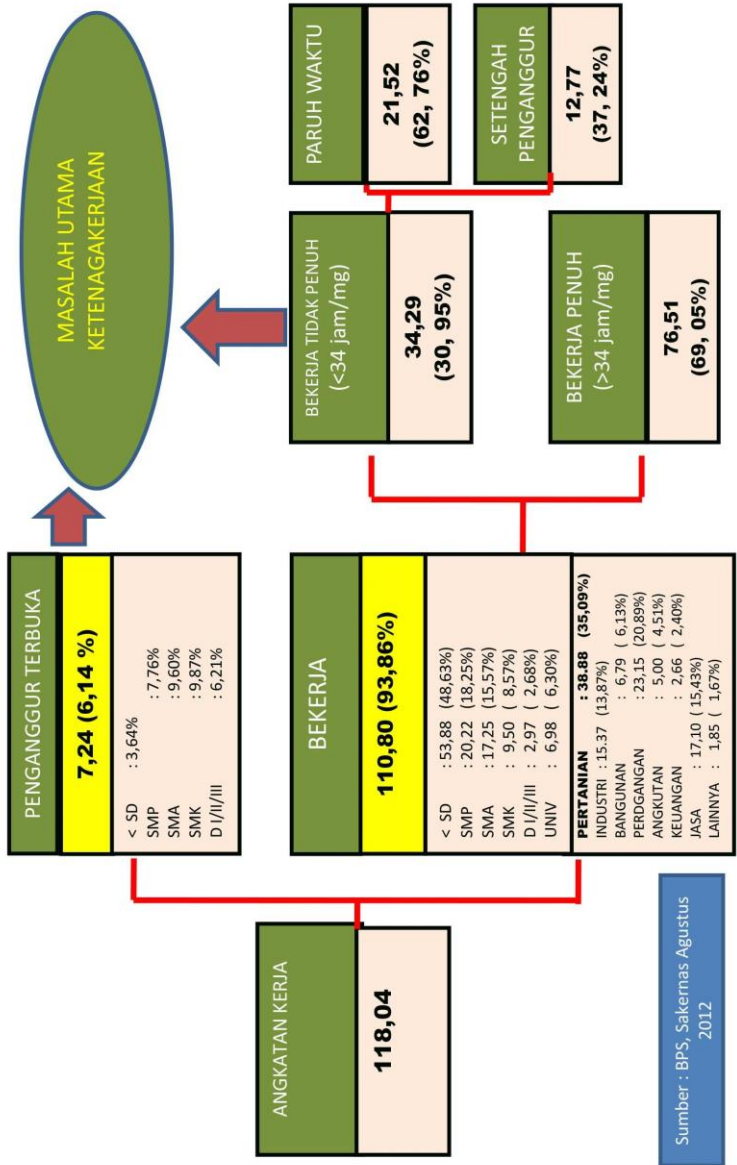
Gambar 3.4. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia



1. Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.

Gambar 2.1.

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia



Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan pendidikan formal yang sangat rendah tersebut membutuhkan penanganan yang ekstra keras. Informasi terbaru menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia pada februari 2013 mencapai 121,2 orang, jumlah ini meningkat sebanyak 3,1 juta dibandingkan dengan bulan Agustus 2012 yang berjumlah 118,1 juta. Sedangkan jumlah yang bekerja pada Februari 2013 adalah sebesar 114 juta. kondisi ini sesuai dengan data pengangguran pada bulan Februari 2013 mencapai 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 5,92% atau menurun dibandingkan data Februari 2012 yang besarnya mencapai 6,32%. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMA sederajat diikuti oleh pendidikan SMP.

H. Sistem Perencanaan tenaga kerja di Indonesia

Penanganan masalah ketenagakerjaan terutama kesempatan kerja dan pengangguran, hanya dapat berhasil apabila berpegang pada perencanaan tenaga kerja yang tepat. Dengan perencanaan tenaga kerja baik nasional maupun daerah yang tepat, akan dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk daerah tertentu, pada sektor tertentu, pada waktu tertentu untuk keahlian tertentu dan atau juga sebaliknya. Upaya pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran ditujukan untuk merubah status penduduk dari beban pembangunan menjadi tenaga kerja produktif dan potensial sebagai aset bangsa.

Terdapat beberapa strategi yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama adanya perencanaan tenaga kerja yang matang untuk mencapai tujuan perluasan kesempatan kerja. Melalui perencanaan tenaga kerja ini maka akan bisa dideteksi kelompok – kelompok masyarakat yang termasuk dalam kriteria pengangguran, setengah pengangguran maupun yang bekerja penuh. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan demand dan

supply di pasar tenaga kerja. Perbedaan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja untuk per sektor, jenis jabatan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan dan status tenaga kerja tertentu.

Manfaat lain yang bisa dipetik dengan adanya perencanaan tenaga kerja adalah akan terpetakan industri atau usaha – usaha yang menggunakan tenaga kerja banyak dengan yang menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang sedikit. Sebagai contoh, perusahaan yang sumbangan yang besar terhadap nilai tambah daerah ternyata hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang kecil karena rata – rata mereka menggunakan padat tehnologi, sementara industri kecil menengah mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dalam rancangan kebijakan yang dilakukan oleh daerah akan memberikan perhatian lebih banyak bagi industri – industri kecil menengah termasuk dalam fasilitasi – fasilitasi pembangunan.

Manfaat ketiga dengan adanya perencanaan tenaga kerja adalah bisa dirancang suatu kebijakan untuk penyerapan tenaga kerja dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

Strategi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mereformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global. Pasar tenaga kerja di luar negeri menjadi sangat menarik bagi jumlah pengangguran yang mencapai 10 juta angkatan kerja ini, apalagi jumlah pendapatan yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.

Perencanaan Tenaga Kerja secara Makro, menurut Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No 16/ MEN/ XI/ 2010, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara

nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas – luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.

Permen Naker No 16/MEN/XI/2010 pada Bab II Pasal 4 menyebutkan PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan yaitu PTK nasional. PTK propinsi dan PTK kabupaten/kota dan lingkup sektoral. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/kota (PTKK) adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/ kota.

Pembangunan ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sehingga membicarakan bidang ketenagakerjaan dalam hal ini perencanaan tenaga kerja (PTK) tidak dapat dipisahkan dengan bidang ekonomi. Terdapat hubungan fungsional antara ekonomi dengan ketenagakerjaan. Kepala Bappenas Armaida mentakan bahwa berdasarkan hasil analisis kementerian PPN, dalam setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, akan mampu diciptakan lapangan kerja sebanyak 400.000. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten mencapai 5 % per tahun, maka jumlah pengangguran yang terserap di pasar kerja akan mencapai 2.000.000 jiwa untuk setiap tahunnya, artinya 10 juta pengangguran tersebut akan bisa terserap semuanya di pasar kerja dalam waktu 5 tahun, dengan catatan tidak ada penambahan pengangguran baru, padahal dengan jumlah penduduk usia kerja yang bertambah setiap tahunnya jelas memberikan sumbangan yang besar terhadap bertambahnya pengangguran baru setiap tahun. Oleh sebab itu, maka perencanaan ketenagakerjaan harus direncanakan secara matang seiring dengan perencanaan pembangunan.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya, perubahan dari kedua sisi

tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target – target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel – variabel ekonomi lainnya.

Kebutuhan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia dalam suatu sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing atau seluruh sektor untuk melaksanakan kegiatan produksi. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja adalah penentuan target pertumbuhan ekonomi nasional/regional serta penjabarannya menjadi pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi umumnya dinyatakan sebagai kenaikan PDB/PDRB nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan suatu tahun dasar atau nilai tambah bruto (NTB). Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi ini kemudian dicari pola hubungan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan model dan teknik tertentu.

Upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah menyusun dokumen rencana tenaga kerja. Peran penting dokumen rencana tenaga kerja dalam pembangunan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, rencana tenaga kerja merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun strategi, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan (pasal 7 dan Pasal 8). Kewajiban dan ketentuan penyusunan perencanaan tenaga kerja dari tingkat nasional hingga tingkat daerah juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan saling terkait antara sektor satu dengan sektor yang lain, oleh karena itu perencanaan tenaga kerja dan penyediaan informasi ketenagakerjaan harus dijadikan sebagai bentuk

tanggungjawab, sekaligus perekat hubungan antar instansi/lembaga baik pusat, daerah, sektoral, maupun swasta dalam upaya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Perencanaan tenaga kerja ini patut disadari sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, mengingat permasalahan ketenagakerjaan begitu kompleks. Upaya tersebut dilakukan agar kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan lebih mengarah pada pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (*employment-growth friendly*), yaitu penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Melalui perencanaan tenaga kerja tersebut, diharapkan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan lebih sistematis dan terpadu antar sektor, sehingga mampu menekan jumlah pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya, perubahan dari kedua sisi tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target – target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel – variabel ekonomi lainnya.

BAB IV

MIGRASI

A. Pengertian Migrasi

Migrasi merupakan salah satu fenomena penting dalam kependudukan, baik ditinjau dari aspek demografis maupun geografis. Migrasi berpengaruh terhadap kondisi spasial atau territorial yaitu perubahan tempat tinggal, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah yang akan berpengaruh terhadap kebijakan kependudukan dan pembangunan yang akan ditetapkan pada daerah tersebut. Migrasi mengandung pengertian perubahan tempat tinggal yang permanen atau relatif permanen (berjangka waktu tertentu). (Ghosh 2006)

Migrasi penduduk juga merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja. Pada konsep lama migrasi lebih banyak dilakukan antar wilayah atau daerah dalam satu negara, namun pada tiga dasa warsa terakhir, dimulai dari awal tahun 1980an, konsep migrasi di Indonesia sudah berubah

paradigmanya menjadi migrasi Internasional. Secara teori, migrasi bisa didefinisikan sebagai berikut: (Hugo 1993)

- a. **Migrasi** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. berdasarkan dimensi waktu Migrasi bisa dibedakan menjadi:

- (i) Migran sirkuler, (**migrasi musiman**) adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sikuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali
 - (ii) **Migran ulang-alik (commuter)** adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, (misal setiap hari atau setiap minggu), pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula (misal pada sore atau pada akhir minggu). Migran ulang-alik mempunyai konsekwensi kebutuhan transportasi yang meningkat.
- b. **Migrasi internasional** adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
 - c. **Migrasi internal** adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi, antarkota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat

kabupaten/kota, seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.

B. Teori – teori migrasi

B.1. Teori Neo Classic

Teori makro ekonomi Neo Classic menyoroti migrasi dari aspek ekonomi di mana perpindahan tenaga kerja berasal dari daerah yang kelebihan tenaga kerja menuju daerah yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu perpindahan juga disebabkan oleh kekayaan alam dan kelebihan modal yang ada di suatu negara menjadi daya tarik tenaga kerja dari daerah lain untuk melakukan migrasi, (Massey et al. 1993). Merujuk pada teori ini keputusan dipengaruhi oleh pendapatan yang akan diterima oleh tenaga kerja, apabila pendapatan memberikan peluang yang lebih baik maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja baik sirkuler ataupun menetap. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh migran dibuat secara individu dibanding sebagai pertimbangan kelompok.

Teori makro ekonomi Neo Klasik menyebutkan bahwa dalam membuat keputusan migran mempertimbangkan manfaat-biaya perpindahan ke area tujuan yang potensial. Tentu saja, lebih besar penghasilan yang akan mereka peroleh lebih banyak perpindahan tenaga kerja ke negara tujuan tersebut. Besarnya perbedaan upah tenaga kerja antar negara menentukan besarnya perpindahan emigrasi diantara kedua negara tersebut. Bagaimanapun, besarnya penghasilan yang akan diperoleh di negara tujuan tersebut ditentukan juga oleh karakteristik individual dari tenaga kerja migran, seperti pendidikan, keahlian (skill), dll.

B.2. Teori Ekonomi Rumah Tangga

Teori ekonomi rumah tangga menerangkan bahwa aliran emigrasi menentukan strategi rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala kegagalan pasar, (Massey 1999)

Pendekatan dalam teori ini adalah bahwa salah satu kunci pengambilan keputusan seseorang untuk bermigrasi tidak dibuat sendiri melainkan dengan pertimbangan keluarga sebagai unit terkecil. Artinya dasar pertimbangan dilakukan secara kolektif " (Massey 1999). Pada teori ini upah yang tinggi bukan merupakan satu – satunya alasan bagi seseorang untuk melakukan migrasi, pendorong adanya migrasi adalah karena kegagalan perekonomian negara asal dalam arti yang luas. Berdasarkan kondisi ini maka keluarga akan mempertimbangkan salah satu anggota keluarganya atau bahkan semua untuk melakukan migrasi ke daerah yang lebih menjanjikan.

Teori ekonomi rumah tangga ini berhubungan secara langsung dengan teori jaringan yang menyatakan bahwa teori jaringan menciptakan bangunan teori migrasi internasional yang menekankan pada peranan keluarga dan pertalian kekeluargaan memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja. Teori jaringan ini banyak terjadi pada migrasi yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang sudah melakukan migrasi akan menjadi pembuka jalan bagi anggota keluarganya untuk melakukan migrasi dengan cara memberikan informasi potensial, membantu biaya perjalanan, menemukan pekerjaan, dan sebagainya.

B.3. Teori Pasar Tenaga Kerja

Teori pasar kerja menyatakan bahwa pasar merupakan aktivitas bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja bervariasi bisa sebentar namun juga bisa memakan waktu yang relative lama. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar adalah: setiap pemberi kerja menawarkan lowongan kerja dan

menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah, di sisi lain pencari kerja juga memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula.

Permasalahan lain yang berkembang adalah bahwa tidak setiap daerah atau negara akan memberikan tingkat upah sesuai yang diinginkan oleh tenaga kerja, sehingga kondisi ini akan mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah yang kekurangan peluang kerja dan memiliki tingkat upah rendah ke daerah dengan peluang kerja yang lebih banyak dan memiliki tingkat upah yang lebih menjanjikan.

Teori ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu dan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, akan bergerak mencari peluang kerja ke daerah yang lebih menjanjikan upah lebih tinggi. Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian akan tetap berada di daerah asal karena tidak memiliki peluang untuk bersaing masuk ke pasar kerja. Artinya teori pasar tenaga kerja (*labor market theory*) menyatakan bahwa, migrasi tenaga kerja didorong oleh permintaan pasar yang tinggi (Todaro, 1997; Massey et al 1993; Hugo et al, 1996). Pasar yang menarik imigrasi tenaga kerja terlihat lebih dominan dibanding tekanan untuk keluar dari negara asal.

B.4. Teori Pusat – Pinggiran (*The Centre – Periphery Theory*)

Teori pusat-pinggiran (*the centre-periphery theory*) menerangkan bahwa perpindahan penduduk dari daerah atau negara pinggiran ke daerah atau negara yang berada di pusat. Migrasi tenaga kerja mengalir dari negara miskin bertujuan untuk mengumpulkan modal dari negara kaya yang ingin mengumpulkan modal/kapital dari negara tujuan (kaya), agar bisa meningkatkan perekonomiannya. Namun tujuan teori Pusat – Pinggiran ini belum berhasil dengan baik karena beberapa sebab antara lain:

- 1) Pendapatan yang dikumpulkan masih banyak yang digunakan secara konsumtif oleh tenaga migran atau keluarganya sehingga tidak membeikan nilai produktif bagi negara asal.

- 2) Tenaga kerja yang bekerja di ke luar negeri adalah tenaga kerja produktif dengan skill tinggi sementara yang masih tinggal di negara asal adalah tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tidak produktif, sehingga tidak bisa memacu peningkatan nilai produktif negara tersebut.
- 3) Fasilitas dan sarana prasarana di negara asal masih jauh dari kondisi yang diharapkan sehingga belum mampu menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi negara asal.

Teori pusat-pinggiran (*the centre-periphery theory*) menunjukkan bahwa perbedaan fasilitas dan sarana prasarana pembangunan ini akan menyebabkan kesenjangan ekonomi akan selalu terjadi pada daerah pusat dan pinggiran. Perubahan yang terasa pada hasil migrasi ini hanya terfokus pada peningkatan ekonomi migran dan keluarga migran.

Negara pinggiran masih selalu menjadi negara miskin sebab yang pergi ke luar negeri untuk bekerja adalah pekerja dengan produktivitas tinggi sehingga yang tertinggal/tersisa di negara asal hanyalah tenaga kerja dengan produktivitas yang rendah sementara remitan/kiriman yang dikirimkan ke negara asal kebanyakan digunakan untuk kegiatan konsumtif rumah tangga (Khan, 1991:218). Melihat fenomena semacam ini, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa emigran hanya dapat berbuat sedikit bahkan tidak sama sekali untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah asalnya.

B.5. Teori Ekonomi Rumah Tangga

Teori ekonomi rumah tangga menyatakan bahwa, aliran emigrasi menentukan strategi rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala kegagalan pasar (Massey et al, 1993; 1998; Hugo, et al, 1996). Hal ini menerangkan bahwa keputusan migrasi tidak dibuat oleh individu secara sendirian, tetapi oleh unit yang lebih besar, seperti keluarga atau rumah tangga, dimana orang melakukannya secara kolektif (Massey, et al, 1993:436). Teori ini juga menyatakan bahwa tekanan

untuk bekerja ke luar negeri tidak dipengaruhi adanya perbedaan tingkat upah diantara kedua negara tersebut, tetapi oleh kegagalan perekonomian di negara asal (Hugo, et al, 1996:14). Untuk meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala dalam lingkungan perekonomian lokal, rumah tangga mengalokasikan anggota keluarga mereka yang mempunyai perbedaan kapasitas, karakteristik dan keahlian untuk mengambil pekerjaan yang berbeda ke lokasi yang berbeda termasuk ke luar negeri untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Teori ekonomi rumah tangga ini sejalan dengan teori jaringan yang menyatakan bahwa migrasi disebabkan oleh adanya peranan keluarga dan pertalian kekeluargaan yang memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja (Hugo, 1981a). Massey menerangkan bahwa jaringan kekeluargaan sudah berjalan sebelum dan selama perpindahan aktual dengan memberikan informasi potensial, membantu biaya perjalanan, menemukan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan berbagai bantuan, individu yang kurang mampu dapat pergi bekerja ke luar negeri dan ini diaplikasikan dalam kasus migrasi tenaga kerja dari Flores Timur ke Sabah.

C. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi

Faktor penarik dan pendorong seseorang melakukan migrasi, merupakan perkembangan teori migrasi (*law of migration*) yang dikemukakan E. G. Ravenstein (1885) (Pozo & Thieme 2006), yaitu:

1. Migrasi dan jarak
 - a. Kebanyakan migran menempuh jarak dekat
 - b. Migran yang menempuh jarak jauh, pada umumnya lebih suka menuju pusat-pusat perdagangan dan industri.
2. Migrasi bertahap
 - a. Adanya arus migrasi terarah
 - b. Adanya migrasi dari desa – kota kecil – kota besar

- c. Proses penyebaran adalah kebalikan proses penyerapan dan memperlihatkan gejala yang sama
3. Migrasi Arus Balik, setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantinya.
4. Perbedaan desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Di desa lebih besar daripada di kota.
5. Wanita melakukan migrasi pada jarak yang lebih dekat daripada pria.
6. Teknologi dan migrasi. Teknologi menyebabkan migrasi meningkat.
7. Motif ekonomi, merupakan dorongan utama seseorang melakukan migrasi.

Migrasi juga bervariasi menurut volumenya, sebagai berikut:

1. Besarnya volume migrasi sebanding dengan keanekaragaman orang.
2. Volume migrasi berkaitan dengan kesulitan mengatasi penghalang.
3. Volume migrasi bervariasi sesuai dengan fluktuasi ekonomi.
4. Volume maupun tingkat migrasi cenderung makin naik, kecuali bila keadaan rintangan yang ketat.
5. Volume dan tingkat migrasi sebanding dengan kemajuan di suatu negara atau wilayah.

Sedangkan karakteristik migran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Migran yang tertarik oleh faktor positif di daerah tujuan, cenderung merupakan seleksi positif.
2. Migran yang memberi reaksi terhadap faktor negatif di daerah asal, umumnya hasil dari seleksi negatif. Bila faktor negatif yang mendorong kelompok penduduk untuk bermigrasi, mereka bukan migran selektif sama sekali.

3. Jika diperhatikan secara keseluruhan, seleksi yang terjadi cenderung bersifat bimodial atau dua bentuk.
4. Tingkat seleksi bertambah sebanding dengan kesulitan dari rintangan-rintangan yang menghambat.
5. Tingginya taraf kecenderungan untuk bermigrasi pada tingkat-tingkat perkembangan kehidupan seseorang penting artinya bagi seleksi migran.
6. Ada kecenderungan bahwa migran mempunyai cirri-ciri diantara penduduk daerah asal dan cirri-ciri diantara penduduk daerah tujuan.

Adapun Ravenstein pada tahun 1889 mengemukakan hukum migrasi, yang kemudian dikembangkan oleh Everett S. Lee, maka Zelinsky pada tahun 1971, mengemukakan hipotesisnya mengenai transisi mobilitas, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berbeda pada proses modernisasi, akan mengalami perubahan dari mobilitas special dan sosial yang rendah menuju mobilitas sosial dan special yang tinggi.
2. Untuk masyarakat tertentu, perkembangan transisi mobilitas berlangsung sejalan dengan transisi demografi dan transisi lainnya yang belum pasti.
3. Dalam berbagai tahap transisi, terjadi perubahan dalam fungsi, jenis, kelompok sosial dalam migrasi serta daerah asal dan daerah tujuan,
4. Dengan berkembangnya arus informasi, mudahnya memanfaatkan informasi itu dapat menyebabkan orang tidak perlu pindah untuk mendapatkan manfaat yang sama.
5. Gerak penduduk semula menuju ke pusat dan kemudian menyebar keluar dari pusat-pusat pertumbuhan.

Sementara itu Zelinsky, membagi transisi mobilitas dalam 5 (lima) tahap.

1. Tahap pertama, tahap masyarakat tradisional, dimana migrasi yang terjadi sangat kecil. Terjadi sirkulasi karena adat kebiasaan, misalnya lading berlimpah, kunjungan keluarga, berdagang, perang atau alasan pindah karena agama.
2. Tahap kedua, pada tahap ini, merupakan awal dari masyarakat transisi. Pada tahap ini terjadi migrasi dari desa ke kota dan migrasi menuju tanah kosong baik di dalam maupun di luar negeri. Mobilitas sirkuler dari berbagai jenis mulai tampak.
3. Tahap ketiga, tahap ini merupakan tahap akhir masyarakat dalam transisi. Pada tahap ini mulai terjadi penurunan migrasi dari desa ke kota. Migrasi menuju tanah kosong mulai menurun, baik di dalam maupun di luar negeri. Sirkulasi penduduk meningkat dan menjadi lebih kompleks.
4. Tahap keempat, tahap ini merupakan tahap masyarakat maju. Mobilitas mulai mendarat pada tingkat yang tinggi. Migrasi dari desa ke kota terus berlangsung, tetapi berkurang secara absolute maupun relatif. Mobilitas antar kota dan intra kota terus meningkat. Migrasi menuju daerah yang kosong terus menurun, bahkan berhenti. Terjadi arus tenaga kerja tidak terampil dari daerah terbelakang ke daerah yang terus maju. Sirkulasi terus meningkat baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan rekreasi.
5. Tahap kelima, tahap ini tahap masyarakat yang sangat maju. Migrasi akan menurun karena kemajuan komunikasi. Migrasi yang terjadi bersifat intra atau antar kota serta mobilitas sirkuler meningkat.

Migrasi secara umum dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya,

hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian bermigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Secara rinci penyebab migrasi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

C. 1. Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah:

Faktor pendorong berasal dari daerah asal migran,

- a. Makin berkurangnya sumber-sumber daya seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menipisnya sumber daya alam, berkurangnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahannya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian;
- b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit), pertumbuhan penduduk banyak sementara lapangan kerja yang tersedia terbatas;
- c. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, ideology, agama, dan suku bahkan menjurus pada peperangan, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal;
- d. Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan;
- e. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Kelima faktor tersebut secara sendiri ataupun bersama – sama mendorong terjadinya migrasi baik yang sifatnya sirkuler maupun migrasi permanent.

C.2. Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah:

Faktor penarik berasal dari daerah tujuan yang menunjukkan alasan mengapa seseorang melakukan migrasi antara lain:

- a. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup khususnya ekonomi yang lebih mapan.
- b. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- c. Harapan memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang lebih baik dan menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
- d. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

Faktor pendorong dan penarik tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila terdapat harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang menjamin keamanan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Terdapat beberapa hal yang berpengaruh secara nyata terhadap kemauan tenaga kerja untuk bermigrasi ke daerah/ negara lain yaitu:

- a. Keputusan migrasi atau keinginan seseorang untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak dibuat oleh individu secara sendirian, tetapi oleh unit yang lebih besar – seperti keluarga atau rumah tangga, apalagi apabila yang berangkat migran adalah tenaga kerja wanita.
- b. Tekanan untuk bekerja ke luar negeri bukan hanya dipengaruhi adanya perbedaan tingkat upah diantara kedua negara tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh kegagalan perekonomian di negara asal.
- c. Untuk meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala dalam lingkungan perekonomian atau negara yang baru maka tenaga

kerja dengan masukan dari keluarga akan memilih negara dengan budaya, karakteristik masyarakat atau agama yang relatif sama dengan lingkungan di mana dia tinggal.

- d. Keberadaan teman atau kerabat akan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan negara tempat tujuan. Hal ini disebabkan dengan adanya pertalian keluarga maka akan memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja.

D. Karakteristik Migran

Karakteristik migran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik demografi, pendidikan dan ekonomi (Michael Todaro 2012).

D.1. Karakteristik Demografi

Para migran di negara berkembang umumnya terdiri dari pemuda yang berumur 15 hingga 24 tahun. Sedangkan migran wanita dapat dikelompokkan dalam dua tipe yaitu (1) migrasi wanita sebagai **pengikut**. Kelompok migran ini terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti migran utama yaitu laki-laki yang menjadi suami atau ayah mereka. (2) Migran wanita **solo** atau **sendirian**, yaitu para wanita yang melakukan migrasi tanpa disertai oleh siapapun. Tipe migran wanita solo ini yang sekarang terus bertambah dengan pesat. Bahkan di Indonesia jumlah tenaga kerja wanita yang melakukan migrasi ke luar negeri mencapai 70%. Jauh lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja pria yang bekerja di luar negeri. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pola hidup dan pola hubungan dalam sebuah rumah tangga, di mana wanita tidak lagi menjadi variabel pengikut namun sudah mulai mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.

D.2. Karakteristik Pendidikan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara taraf pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan atau dorongan personal untuk melakukan migrasi (*propensity to migrate*). Mereka yang bersekolah lebih tinggi, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar. Kondisi ini disebabkan oleh perolehan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan semakin kuat keinginan untuk melakukan migrasi.

D.3. Karakteristik Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir persentase terbesar para migran adalah mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian dan yang tidak memiliki kesempatan untuk maju di daerah asalnya. Para migran dari daerah pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan segala status sosioekonomi (mayoritas berasal dari golongan miskin) sengaja pindah secara permanen untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan di daerah - daerah pedesaan.

E. Penelitian Tentang Migrasi Internasional

Migrasi merupakan salah satu komponen demografi yang memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk pada wilayah tujuan maupun wilayah asal. Secara harfiah migrasi diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik masih dalam konteks suatu negara atau pemerintahan maupun sudah menyeberangi batasan politik dan administrasi, baik menetap secara permanen maupun menetap sementara. International Organisations of Migration (IOM) menjelaskan bahwa migrasi terdiri dari perpindahan yang sifatnya legal maupun illegal, pengungsi karena politik, keamanan, bencana alam

maupun karena faktor – faktor ekonomi. Migrasi secara ekonomi sering dijelaskan sebagai perpindahan penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja (IOM 2010).

Piramida penduduk juga sangat dipengaruhi oleh adanya migrasi, negara maju cenderung mempunyai tingkat fertilitas yang rendah sehingga bentuk populasinya cenderung menua, di sisi lain negara berkembang mempunyai tingkat fertilitas yang relatif lebih tinggi dengan jumlah penduduk muda dan usia produktif yang lebih besar, kondisi ini menyebabkan negara maju membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan membuka kesempatan lebar bagi migrasi tenaga kerja. Migrasi tidak hanya berpengaruh dalam meningkatkan ukuran populasi, tetapi juga mengubah piramida usia bagi negara tujuan. Migran cenderung lebih terkonsentrasi di kelompok usia muda dan produktif secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk asli sehingga akan memberikan kontribusi pada pengurangan rasio ketergantungan (Gagnon 2014).

Aspek lain yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah seberapa besar pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik bagi individu yang melakukan migrasi dan keluarganya, wilayah atau negara asal migrant dan wilayah atau negara tujuan migrant. Salah satu tujuan utama seseorang melakukan migrasi adalah faktor ekonomi, sehingga masalah peningkatan ekonomi bagi pekerja migrant dan keluarga, negara asal dan negara tujuan, menjadi topik penelitian yang sangat penting. Sebuah review yang dilakukan oleh George J Borjas menunjukkan bahwa banyaknya migrant dari Puerto Rico yang menuju Amerika Serikat adalah karena tingginya perbedaan tingkat upah. Pekerja di sektor konstruksi rata – rata akan memperoleh pendapatan sebanyak \$ 23.000 per tahun ketika tinggal di Puerto Rico, namun apabila dia bekerja di Amerika Serikat, maka pendapatannya adalah sebesar \$

43.000 per tahun. Selisih sebesar \$ 20.000 atau hampir dua kali lipat ini menyebabkan banyak migrasi dari Puerto Rico ke USA. (George J, Borjas 2015)

BAB V

REMITTANSI

A. Pengertian Remittensi

Remitten adalah pengiriman uang dari pekerja migran kepada keluarga di negara asal mereka. Efek dari pengiriman uang pada pengembangan sering kompleks dan kontradiktif, tapi terlihat dalam pandangan yang positif oleh mayoritas analis. Dalam beberapa negara-negara berkembang, pengiriman uang dari emigran berjumlah lebih dari 10% dari PDB. Pengiriman uang ditransfer melalui berbagai saluran yang berbeda sehubungan dengan biaya, kecepatan, kenyamanan dan faktor lainnya. Dari perspektif kebijakan, untuk mengurangi biaya transfer, maka mencegah penggunaan saluran tidak resmi, dan mempromosikan transfer yang masuk lembaga keuangan di negara penerima. (Carling 2005).

Pengiriman uang global untuk negara-negara berkembang tercatat meningkat dari USD 88 miliar pada tahun 2002 menjadi sekitar 93 miliar pada tahun 2003. Pengiriman remitten secara global terus meningkat menjadi USD 325 miliar dollar pada tahun 2010 (Imai et al. 2014). Negara-negara berkembang secara total menerima satu atau setengah kali lebih banyak uang daripada pengiriman uang yang tercatat sebagai bantuan pembangunan resmi. Aliran terbesar remitansi yang tercatat di dunia salah satunya adalah dari Amerika Serikat ke Meksiko, arus besar lainnya pergi dari Arab Saudi ke negara-

negara Asia dan Arab dan dari Amerika Serikat ke negara-negara asal komunitas imigran yang besar (Cina, Filipina, India dan Vietnam). Negara-negara dengan pengiriman uang aliran terbesar adalah Meksiko, India, Spanyol, Pakistan, dan Portugal. Selain Pakistan, Bangladesh, China, Guatemala, Nigeria, Sri Lanka dan Indonesia. Data tahun 2004 menunjukkan estimasi aliran remiten selama tahun 2000 adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Aliran dana dari negara tujuan ke negara asal migrant

NO	ALIRAN DANA	NO	ALIRAN DANA
1	USA → Mexico7.6	9	USA → Philippines..... 1.2
2	Saudi Arabia → India.....3.6	10	Japan → Korea..... 1.0
3	Malaysia → Indonesia..... 3.1	11	USA → India..... 1.0
4	Saudi Arabia → Pakistan..... 1.8	12	Saudi Arabia → Indonesia.. 1.0
5	Saudi Arabia → Philippines 1.6	13	USA → Vietnam 0.8
6	Saudi Arabia → Egypt1.4	14	Saudi Arabia → Bangladesh.. 0.7
7	USA → China..... 1.4	15	USA → Korea..... 0.7
8	Germany → Turkey..... 1.2	16	France → Portugal 0.7

Sumber: Harrison (2004).

Peningkatan pengiriman uang ke negara-negara berkembang terjadi karena lebih banyak orang menetap di luar negeri, dan pengiriman menjadi lebih mudah, mode lebih cepat dan lebih murah dari transmisi uang ke negara. Hasil empiris tentang dampak migrasi terhadap pertumbuhan dan kemiskinan pada level negara. Sementara pengiriman uang yang dihasilkan meningkatkan pendapatan negara penerima dan akibatnya menurunkan kemiskinan, ada biaya sosial tidak diperhitungkan dalam pendapatan ini. Di satu sisi, pengiriman uang mengurangi upaya kerja dan meredam pertumbuhan jangka panjang, dan di sisi lain, mereka meningkatkan pembangunan sektor

keuangan dan dengan demikian merangsang pertumbuhan. Pengiriman uang memiliki dampak positif pada peringkat kredit suatu negara, menyediakan sumber yang besar dan mata uang asing stabil yang dapat mengurangi kepanikan investor, membantu mengatasi krisis neraca pembayaran, dan dapat digunakan untuk proyek pembangunan (Khodeir 2015)

B. Pemanfaatan Remittensi

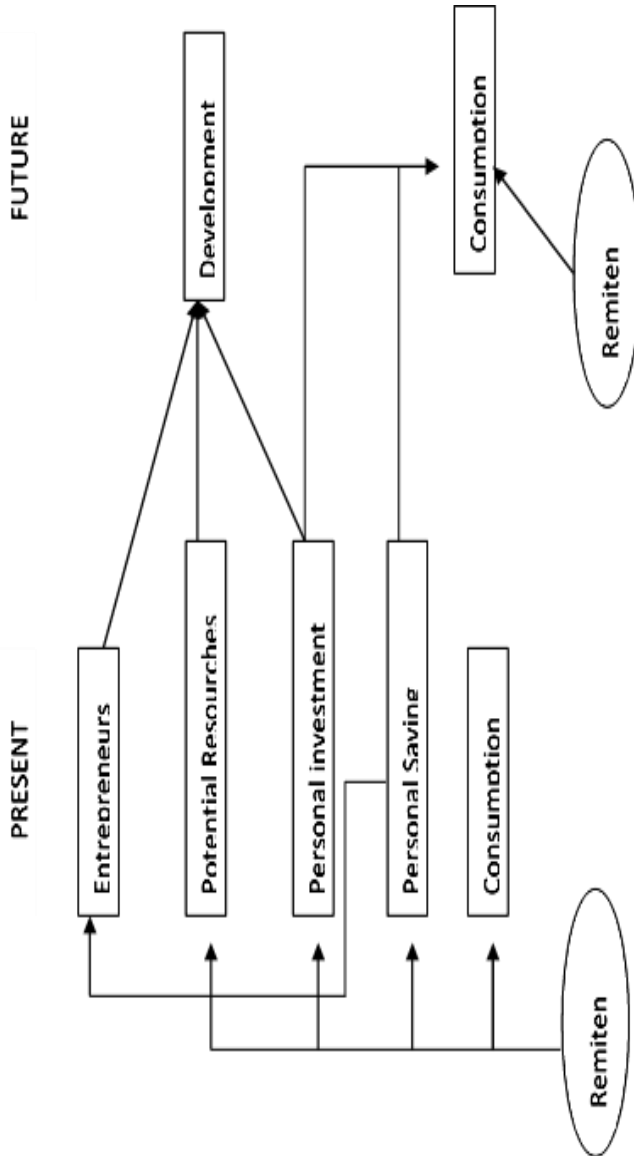
Remitten memberikan pengaruh secara nyata pada pekerja migrant dan keluarga, serta negara tujuan. Pengiriman remitten bisa mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan memungkinkan untuk investasi yang lebih tinggi pada aset fisik dan pendidikan dan kesehatan, dan juga memungkinkan akses pengetahuan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) tahun 2008 tentang *Remittances and Investment Opportunities for Egyptian Migrants* menunjukkan hasil sebagian besar (80%) dari populasi penelitian lebih peduli tentang memanfaatkan pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan. Survei menemukan terdapat hubungan antara volume pengiriman uang ditransfer dan tingkat pendidikan migran serta hubungan antara media transfer apakah lembaga formal maupun informal. Semakin besar volume pengiriman uang dan semakin tinggi tingkat pendidikan migran, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa mereka akan memilih jalur formal dalam transfer remitten yaitu melalui bank dan lembaga pengiriman uang resmi. (IOM 2010)

Akumulasi pengiriman remitten dari pekerja migran akan meningkatkan modal fisik melalui peningkatan akses pembiayaan, meskipun ini tergantung pada kecenderungan batas penerima remitten dalam melakukan konsumsi. Salah satu contohnya, di Nepal, terjadi penurunan rasio angka kemiskinan dari 42 persen pada tahun 1995-1996 menjadi 31 persen pada tahun 2003-2004 diperkirakan karena

adanya peningkatan pengiriman remitten (Bank Dunia, 2006). Pengiriman uang berkontribusi hingga 40 persen dari pendapatan rumah tangga Mesir, dan secara nasional menjadi sumber utama pendapatan mata uang asing di tingkat nasional, pengiriman uang terutama disalurkan untuk biaya penting dan konsumsi. (Ambrosius & Cuecuecha 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran yang kembali ke negara asal akan mampu mengimplementasikan ketrampilan yang diperolehnya sehingga menjadi brain gain dan meningkatkan akumulasi *human capital*. Migran yang kembali mampu melakukan mitigasi brain sehingga akan meningkatkan *human capital* bagi negara asalnya (Dustmann & Glitz 2011).

Gambar 5.1 Pola Penggunaan Remitansi



Jorgen Carling melakukan penelitian tentang pola pemanfaatan remitansi dan memperoleh hasil pola penggunaan remitansi oleh buruh migrant, terdapat 3 pola dalam penggunaan remitansi oleh tenaga migrant yaitu (1) Pola langsung konsumsi, di mana seluruh remitansi yang dikirimkan oleh migran akan dihabiskan oleh keluarga sebagai konsumsi. Pada pola ini, maka tidak terdapat dana yang digunakan untuk tabungan maupun usaha produktif; (2) Pola Personal saving, yaitu keluarga migran akan menyimpan remitansi yang dikirimkan baik keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk tabungan pribadi, misalnya dalam bentuk deposito maupun emas, sehingga ketika migran pulang, bisa digunakan sebagai biaya hidup di masa depan; (3) Pola personal investment, yaitu keluarga migrant akan menginvestasikan sebagian atau seluruh remitansi dalam bentuk investasi pribadi dan bersifat produktif, misalnya dalam wujud sawah, rumah kost, mobil angkutan atau motor ojek atau lainnya. Pilihan yang ketiga yaitu *personal investment* apabila digabungkan dengan *potential resources* dan *entrepreneur* diharapkan akan mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi migrant maupun masyarakat sekitarnya. Berdasarkan gambar 5.1 tersebut di atas, maka entrepreneur merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi, agar mampu menjadi entrepreneur maka diperlukan adanya peningkatan *human capital* bagi TKI yang diikuti dengan pemberdayaan sejak pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan.

Christian Dustmann and Albrecht Glitz dalam bukunya Handbook of the Economics of Education Chapter 4 Migration and Education menyatakan bahwa Keberhasilan ekonomi migran di negara tujuan dilatarbelakangi oleh pendidikan dan bagaimana dia melakukan transfer knowledge dan investasi ketrampilan yang dia peroleh, di sisi lain Christian juga menyatakan bahwa salah satu tujuan melakukan migrasi adalah keinginan untuk memperoleh keterampilan di negara tujuan yang memiliki return lebih tinggi dari negara asal (Dustmann & Glitz 2011).

Seorang migrant purna mempunyai nilai lebih karena telah bekerja di negara yang lebih maju baik dari segi teknologi maupun proses produksi sehingga mampu berperan dalam mengatasi kendala modal manusia. Jika pengetahuan baru dan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri dapat ditransfer dan digunakan secara produktif di negara asal, migran memutuskan untuk kembali, misalnya migrasi mahasiswa. (Dustmann & Kirchkamp 2002). Di sisi lain, migrasi juga memiliki efek tetap atau bahkan negatif pada modal manusia, pada kondisi di mana keterampilan dan tingkat pendidikan seorang migran di tempat tujuan tetap atau di bawah tingkat pendidikan, keterampilan dan kapasitasnya (Mattoo & Neagu 2006).

Remitten mempunyai hubungan erat dengan pendidikan di daerah asal, Mansuri (2006) meneliti pedesaan di Pakistan dan menemukan bahwa migrasi yang berdampak pada pengiriman remitten mempunyai hubungan dengan pendidikan perempuan yang ditunjukkan dengan jumlah pendaftaran sekolah. Di sisi lain, migrasi pekerja terampil tinggi dapat mengakibatkan *brain drain* yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan negara dalam jangka panjang (Adams & Page 2005). Banyak dari negara-negara Asia Pasifik baru-baru ini menikmati lonjakan pengiriman uang mulai dari krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan pada saat yang sama, tetapi belum ada penelitian, untuk pengetahuan kita, yang menilai dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara tersebut.

C. Remitten, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan remitansi mempunyai dampak terhadap perekonomian melalui tiga cara berikut *Pertama*, dengan mempengaruhi tingkat akumulasi modal, pengiriman uang tidak hanya meningkatkan laju akumulasi modal fisik dan manusia, tetapi juga menurunkan biaya modal di negara penerima. Dengan demikian, tambahan pinjaman dapat meningkatkan dan menyebabkan lebih

besar hutang. Ini juga mungkin memiliki peran dalam menstabilkan perekonomian, atau mengurangi volatilitas, dan karenanya, mengurangi premi risiko yang diminta investor. Dampak *kedua* adalah terkait dengan mengakibatkan perubahan dalam pertumbuhan angkatan kerja, penerimaan remitansi memiliki dampak negatif pada tenaga kerja memaksa partisipasi dengan menggantikan pendapatan remittance untuk pendapatan tenaga kerja, dan dengan mengkonsumsi lebih banyak rekreasi dan bekerja lebih sedikit. Dampak *Ketiga*, pengiriman uang berdampak pada efisiensi investasi dengan mempengaruhi pertumbuhan TFP, tergantung pada siapa yang membuat keputusan investasi (George J. Borjas 2015).

Jika penerima membuat keputusan atas nama pengirim itu, ada kemungkinan bahwa keputusannya tidak efisien sebagai salah satu yang dibuat oleh perantara keuangan domestik terampil dalam kasus aliran modal masuk yang resmi. Pengiriman uang dapat mengakibatkan pengembangan keuangan yang lebih besar. Hal ini juga dapat menyebabkan pertukaran. Perubahan tingkat - masuknya dana dapat mengakibatkan apresiasi mata uang dan penurunan ekspor.

Borjas et al. (2009) menguji dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan di 84 negara-negara penerima berdasarkan pengamatan tahunan selama 1970-2004. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; rasio pengiriman uang terhadap PDB dari semua negara penerima lain yang menangkap efek dari pengurangan global dalam biaya transaksi dan perubahan sistematis lainnya dalam penentu pengiriman uang secara mikro ekonomi. Dalam kasus ini, pengiriman uang memiliki tanda negatif dan, sementara di lainnya tidak, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara pengiriman uang dan pertumbuhan ekonomi. (George J, Borjas 2015). Model menunjukkan bahwa pengiriman uang secara alamiah akan naik seiring dengan tingkat altruisme pekerja migran kepada keluarganya, di sisi lain terdapat hubungan negatif antara tingkat pendapatan penerima dan tingkat pengiriman uang, semakin tinggi tingkat pendapatan penerima (semakin kaya) maka pengiriman

uang akan semakin sedikit. Ini adalah kebalikan dari apa yang akan terjadi, seandainya pengiriman uang berfungsi sebagai arus investasi. Model ini juga menyiratkan eksternalitas negatif baik pada pekerja migran maupun penerima. Mengingat masalah moral hazard - pekerja berkurangnya dengan pengiriman uang - ada efek negatif pada output agregat.

Berdasarkan data pada 113 negara selama periode 29 tahun (1970-1998), Chami et al. (2005) mengontrol gap pendapatan dan kesenjangan suku bunga antara negara penerima dan AS sebagai penentu pengiriman uang dan menunjukkan bahwa pengiriman uang pekerja memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, yang konsisten dengan masalah moral hazard dari upaya berkurangnya pengiriman uang pekerja dengan lebih tinggi. Pradhan, Upadhyay, dan Upadhyaya (2008) meneliti efek dari pengiriman uang pekerja pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 1980-2004 untuk 39 negara negara berkembang dan mengkonfirmasi dampak positif pada pertumbuhan. Menggunakan data untuk lebih dari 100 negara di 1975-2002 dan pengendalian efek endogeneity dari remitansi dan pengembangan keuangan dengan Sistem GMM, Giuliano dan Ruiz-Arranz (2009) meneliti hubungan antara pengiriman uang dan pertumbuhan dan interaksi pengiriman uang dengan perkembangan keuangan di negara penerima. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang telah mendorong pertumbuhan dalam waktu cepat dikembangkan secara finansial negara. (Presbitero et al. 2014)

Masih relatif sedikit penelitian yang meneliti dampak dari pengiriman remitten terhadap kemiskinan. Vargas Silva, Jha, dan Sugiyarto (2009) yang telah meneliti dampak dari pengiriman uang pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Asia menggunakan data tahunan. Dalam spesifikasi mereka, laju pertumbuhan PDB dan rasio kesenjangan kemiskinan dinyatakan sebagai fungsi dari pengiriman remitten yaitu menggunakan log kiriman uang sebagai rasio dari PDB, logaritma dari PDB awal per kapita, tingkat pendidikan, logaritma natural dari pembentukan modal bruto, keterbukaan perdagangan, dan

GDP deflator. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari pengiriman remitten terhadap pertumbuhan, sedangkan dampak terhadap kemiskinan adalah negatif. Secara statistik diperoleh bahwa Peningkatan pengiriman remitten sebesar 10 % akan menyebabkan kenaikan PDB pada tahun tersebut sekitar 0,9%-1,2% pada pertumbuhan tahunan. Kenaikan 10% dari remitten (sebagai rasio dari PDB) akan menurunkan kesenjangan kemiskinan sekitar 0,7% -1,4 %. (Lekhe et al. 2014)

Taylor melakukan penelitian pada negara di luar Asia, menunjukkan, bahwa berdasarkan data rumah tangga di Meksiko, bahwa pengiriman uang dari Amerika Serikat pada tahun 1982 membantu petani meningkatkan kepemilikan ternak, yang kemudian mengurangi ketidaksetaraan di tahun 1988. Kiriman remitten juga membantu dalam mengurangi ketidakstabilan konsumsi di negara-negara berkembang. Pengiriman remitten bertindak baik sebagai ex-ante alat penghindaran risiko serta ex-post mekanisme manajemen risiko (Misalnya pengiriman uang meningkat setelah bencana alam mempengaruhi daerah). (Taylor 2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Combes dan Ebeke (2011) dengan menggunakan model Sistem-GMM-IV untuk panel cross-sectional dari 87 negara-negara berkembang selama periode 1975-2004 dengan tujuan memperkirakan dampak remittance pada ketidakstabilan konsumsi. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang secara signifikan mengurangi ketidakstabilan konsumsi, dampak yang kuat di finansial kurang pada negara maju. Namun, dampak menstabilkan remitansi menurun pada tingkat yang lebih tinggi dari pengiriman uang. Pengiriman uang juga meningkatkan ketahanan terhadap guncangan, seperti bencana alam dan guncangan ekonomi secara makro.

Didit Purnomo pada tahun 2009 melakukan penelitian mengenai tenaga migran di Kabupaten Wonogiri menemukan hasil bahwa ternyata tenaga kerja yang merantau mempengaruhi keadaan ekonomi di daerah asalnya. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa 85,4% perantau mengalami peningkatan ekonomi yang ditunjukkan dengan

kepemilikan harta yang meningkat, peningkatan ini disebabkan adanya penambahan pendapatan di daerah rantau yang kemudian diwujudkan pembelian atau kepemilikan harta di daerah asal. Namun sebanyak 15,6% perantau ternyata mengalami penurunan dalam kepemilikan harta, hal ini disebabkan pendapatan dari daerah rantau digunakan untuk pendidikan atau untuk hal lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Ir Rukmadi dkk (2010) terhadap TKI dan mantan TKI di Jawa Tengah menyebutkan bahwa Remitten yang diperoleh TKI adalah dipergunakan untuk 58,33% untuk biaya hidup, 25% untuk biaya sekolah, 21,67% digunakan untuk rehab rumah dan tabungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mafruhah dkk menunjukkan bahwa penggunaan remiten, bisa dibedakan menjadi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai konsumsi, yang langsung habis dan tidak memiliki nilai ekonomi di masa datang. Pola penggunaan remitten seperti ini banyak ditemui pada TKI yang menjadi kepala rumah tangga, di mana remitten dikirimkan keada istri atau keluarganya memang sebagai satu – satunya nafkah atau pendapatan .
2. Remiten digunakan dalam bentuk personal saving seperti dalam wujud emas, motor atau uang tabungan. Pole penggunaan remitten seperti ini biasanya dilakukan pada keluarga yang sudah lebih mapan ekonominya, sehingga pendapatan yang diperoleh digunakan untuk menabung namun tidak digunakan sebagai usaha produktif. Tabungan akan dibuka ketika TKI pulang kembala ke tanah air. Pada pola ini remitten akhirnya akan habis karena di masa mendatang akan digunakan untuk berkonsumsi.
3. Remiten digunakan untuk personal investment maupun collevtive investment yang digabungkan dengan enterpreneur akan menghasilkan usaha produktif yang bermanfaat bagi pembangunan secara pribadi maupun masyarakat. Pola penggunaan remiten seperti ini dipenaruhi oleh tingkat pendidikan dan ekonomi

keluarga yang ditinggalkan. Apabila ekonomi sudah relatif mapan dan pendidikan cukup bagus, maka keluarga yang ditinggalkan akan memanfaatkan remitten bagi usaha produktif dan mampu memberikan pendapatan tambahan

D. Hasil Penelitian tentang Remittensi

Sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pekerja migrant akan dikirimkan pada keluarga di negara asal, yang biasa disebut dengan remitten. Pengiriman uang (remitten) mempunyai dua motif utama yaitu; Pertama altruisme atau kepedulian pekerja migrant terhadap keluarga yang ditinggalkan, dengan harapan remitten bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal. Bukti menunjukkan bahwa pekerja migrat akan mengirimkan uang lebih banyak pada saat kondisi ekonomi negara asal memburuk dengan harapan memperlancar konsumsi keluarga mereka saat terjadi keguncangan ekonomi; Kedua self interest yaitu motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Migran yang termotivasi oleh selfinterest akan mengirimkan uang untuk berinvestasi dalam aset sebaik mungkin, sehingga menunjukkan hubungan positif antara pengiriman uang dan kegiatan ekonomi domestik (Frankel Jeffrey A. 2009); (Lueth & Ruiz-Arranz 2006);

IMF (2005) mengadakan penelitian empiris lintas negara yang meneliti motivasi untuk mengirimkan remitten dengan menggunakan data panel 87 negara pada periode 1980 sampai dengan 2003. Data yang digunakan adalah remiiten, PDB dan pendapatan rumah tangga, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang artinya konsisten dengan hipotesis altruisme. Penelitian lain dilakukan dengan menggunakan data dari 36 negara di Sub-Sahara Afrika pada periode 1990 sampai 2005, menemukan bahwa pekerja migrant akan mengirim lebih banyak uang ke negara asal ketika negara asal mengalami kegoncangan pendapatan/ekonomi (Singh et al. n.d.). Lueth dan Ruiz-Arranz (2006) menemukan bahwa pengiriman uang yang procyclical dan positif terkait dengan tingkat pertumbuhan GDP per kapita, mendukung hipotesis altruisme yang mendasari pengiriman

remitten. Namun beberapa penelitian lain memberikan dampak yang berbeda, Abdih, Barajas, Chami, dan Ebeke (2012) tidak menemukan dampak signifikan antara pendapatan rumah dan pengiriman uang. Sayan (2006) menghitung korelasi antara detrended pengiriman uang dan detrended PDB untuk 12 negara-negara berkembang dan menemukan bahwa hubungan yang counter cyclical dalam dua kasus, procyclical dalam dua kasus dan acyclical sisanya. (Sayan 2006)

Hubungan negatif antara pengiriman uang dan pendapatan rumah mungkin berarti bahwa pengiriman uang termotivasi oleh sifat altruis, dapat juga berarti bahwa pengiriman uang bertindak sebagai pengganti pendapatan tenaga kerja dengan mengurangi jumlah tenaga kerja di rumah, tidak hanya sebagai hasil migrasi. Sedangkan hubungan positif antara pengiriman uang dan pendapatan rumah yang mendukung argumen kepentingan juga bisa berarti bahwa pengiriman uang yang meningkatkan ekonomi melalui efek pada pendidikan anggota keluarga lainnya, peningkatan keuangan, dan perbaikan institusional (Leon-ledesma et al. 2006); (Piracha & Vadean 2010)

Yang (2011) mencatat bahwa apakah pengiriman uang yang digunakan untuk konsumsi atau investasi mungkin tergantung pada pendapatan rumah tangga, (Yang 2008), pada rumah tangga miskin remiten cenderung dihabiskan lebih banyak pada makanan dan barang tahan lama, sedangkan rumah tangga kaya atau keluarga mampu akan menggunakan sebagian remittennya berinvestasi di masa depan melalui bisnis atau modal manusia. Penelitian dengan menggunakan potensi pertumbuhan endogenity terhadap kondisi migrant di Republik Dominika menunjukkan bahwa efek pengiriman uang untuk kemungkinan kepemilikan usaha rumah tangga dalam sistem model probit simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang hanya menerima pengiriman uang memiliki kemungkinan lebih rendah dibandingkan memiliki bisnis, tetapi rumah tangga yang memiliki bisnis lebih mungkin untuk menarik pengiriman uang (Amuedo-Dorantes & Mundra 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Yang (2004) dengan menunjukkan fakta bahwa selama krisis keuangan

Asia menyebabkan perubahan nilai tukar berbagai negara ternyata memberikan pengaruh pendapatan yang berbeda terhadap para tenaga kerja migran Filipina, tergantung pada negara di mana mereka tinggal. Yang juga melakukan pengujian dalam variasi ini sebagai alat untuk menguji pendapatan migran dan menguji efek dari perubahan pendapatan migran. Hasil menunjukkan bahwa pada kondisi krisis di mana nilai tukar dollar meningkat terhadap mata uang setempat, pada rumah tangga yang mempunyai kegiatan kewirausahaan, maka akan meningkatkan skala usaha. Hasil lain juga menunjukkan adanya efek positif keluarga migran untuk masuk ke aktivitas bisnis baru. (Yang 2008)

Keputusan pemilihan investasi dari remmiten dilakukan melalui proses musyawarah antara migran dan kepala rumah tangga di negara asal yang kebanyakan adalah istri, namun, dalam kenyataannya kepala rumah tangga yang menerima remitansi lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam menentukan bagaimana uang tersebut akan digunakan. Hasil penelitian di empat ibu kota propinsi di Mesir yaitu Kairo, Fayoum, Monofeya dan Shakira menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, sekitar 20 persen responden dan migran menggunakan beberapa bagian dari pendapatan mereka untuk investasi produktif. Data per propinsi menunjukkan bahwa di Kairo, setidaknya 31% rumah tangga menginvestasikan bagian dari remitten yang mereka terima. Sementara di Monofeya dan Shakira, 20 persen dari rumah tangga penerima remitten menginvestasikan pengiriman uang yang mereka terima. Di antara empat propinsi, Fayoum memiliki proporsi terendah dalam rumah tangga yang melakukan investasi yaitu sebesar 11%. (IOM 2010)

Pemilihan investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara individu maupun perekonomian regional dan nasional. Data IOM tersebut menunjukkan bahwa proporsi investasi yang dilakukan oleh keluarga migran adalah, 39% memilih untuk berinvestasi di real estate, kemudian 22% melakukan investasi dalam usaha bisnis pertanian kecil yang mempekerjakan kurang dari lima orang.

Sedangkan proporsi terkecil investor yaitu sebanyak 6% diinvestasikan di perusahaan swasta menengah yang mempekerjakan tidak lebih dari 20 orang. Di Kairo dan Fayoum, usaha kecil dan swasta adalah kegiatan investasi yang paling mewakili, sementara di propinsi Menofeya dan propinsi Sharkia, kegiatan investasi utama adalah di sektor real estate.

Pada level negara, ternyata remitten mempunyai efek positif, pengiriman uang merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak rumah tangga di Kenya. Pada tahun 2011, pengiriman uang pribadi yang diterima di Kenya mencapai \$ 934,000,000 dan menyumbang 3 persen dari GDP (Hines 2014). Remitten dari tenaga migrant merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian di Mesir, dan pada tahun 2008 mewakili 5,3 persen dari produk domestik bruto, (IOM 2010). Kondisi di Indonesia pun menunjukkan hasil yang sama, data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa remitten yang dikirim mencapai 120 triliun rupiah pada tahun 2015. Nilai sebesar itu tentu membawa dampak positif minimal bagi keluarga yang ditinggalkan oleh migran. (BNP2TKI 2015)

Migrant merupakan fenomena umum di dunia, berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sebab, proses dan hasil yang diperoleh dari migrasi. Kondisi ini menyebabkan banyak penelitian yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan review terhadap beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Review tersebut akan disusun dalam bentuk research gap yang dibedakan berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Pengaruh Remitten terhadap Pengurangan Kemiskinan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard H Adams JR (2013) dengan lokus Ghana dan alat analisis multinomial logit memperoleh hasil bahwa Remitten membawa dampak pengurangan kemiskinan. Hasil tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard H Adams dan Page (2005) terhadap 71 negara berkembang dengan Ordinary Least Square dengan variabel

yang digunakan adalah PDB per capita, Indeks Gini, persentase antara jumlah migrant dengan total penduduk, Negara sampel dibedakan menjadi Negara dibedakan menjadi Asia Timur, Asia Tengah, Eropa, Amerika Latin, Afrika Utara, Asia Selatan dan Timur Tengah hasil menemukan hasil bahwa rata-rata kenaikan 10% dari pengiriman uang internasional di negara berkembang akan mengakibatkan penurunan 3,5% dari jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa remitten menurunkan angka kemiskinan.

b. Pengaruh migrasi dan remitten terhadap peningkatan human capital bagi keluarga migrant.

Richard H Adams JR menemukan hasil penelitian di Ghana bahwa (1) Keluarga/rumah tangga yang menerima remitten menghabiskan lebih banyak pada tiga barang-barang investasi: pendidikan, perumahan, dan kesehatan; (2) Remitten dapat menyebabkan peningkatan investasi dalam modal manusia dan fisik pada negara penerima, hal tersebut menunjukkan bahwa remitten ternyata mampu memberikan peningkatan human capital khususnya dari aspek pendidikan dan kesehatan. Richard H Adams JR dan Page (2005) menemukan hasil bahwa rumah tangga yang menerima kiriman uang internasional memiliki modal manusia lebih dari rumah tangga tanpa pengiriman uang, sementara rumah tangga yang menerima remitten dalam negeri (domestic) biasanya memiliki modal manusia yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dengan migrant internasional mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan human capital lebih baik daripada keluarga tanpa migrant.

Penelitian lain dilakukan oleh Vania B Salas (2014) terhadap anak – anak yang ditinggalkan migrant di Peru, dengan menggunakan alat analisis model Probit random effects untuk melihat pemilihan sekolah swasta dan negeri dan model Pooled Probit dengan variabel instrument untuk mengetahui adanya bias endogen. Hasil menunjukkan bahwa remitten memiliki dampak positif pada

keputusan pendidikan terlepas dari ketidakhadiran orang tua yang diukur dengan jumlah orang tua yang hadir dalam rumah tangga.

c. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap peningkatan human capital migrant

Christian Dustman, Itzhak Fadlon b, Yoram Weiss (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan Teori dasar adalah model Roy dinamis di mana seorang pekerja memiliki dua keterampilan yang berbeda yang dapat ditambah dengan learning by doing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran yang kembali ke negara asal akan mampu mengimplementasikan ketrampilan yang diperolehnya sehingga menjadi brain gain dan meningkatkan akumulasi human capital. Migran yang kembali mampu melakukan mitigasi brain sehingga akan meningkatkan human capital (ketrampilan) bagi negara asalnya. Pia Pinger (2009) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara migrant temporer dan migrant permanen dimana migrasi temporer lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang, karena mendorong peningkatan keterampilan, tetapi juga pengiriman uang dan tabungan.

Christian Dustmann* and Albrecht Glitz* dalam bukunya Handbook of the Economics of Education Chapter 4 Migration and Education hal 327-439 menyatakan bahwa Keberhasilan ekonomi migran di negara tujuan dilatarbelakangi oleh pendidikan dan bagaimana dia melakukan transfer knowledge dan investasi ketrampilan yang dia peroleh. Hasil lainnya adalah keinginan untuk memperoleh keterampilan di negara tujuan yang memiliki return lebih tinggi dari negara asal menjadi alasan untuk migrasi.

Seorang migrant purna mempunyai nilai lebih karena telah bekerja di negara yang lebih maju baik dari segi teknologi maupun proses produksi sehingga mampu berperan dalam mengatasi kendala modal manusia. Jika pengetahuan baru dan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri dapat ditransfer dan digunakan secara produktif di negara asal, migran memutuskan untuk kembali,

misalnya migrasi mahasiswa. (Dustmann 2002, Kilic et al, 2007). Di sisi lain, migrasi juga memiliki efek tetap atau bahkan negatif pada modal manusia, pada kondisi di mana keterampilan dan tingkat pendidikan seorang migran di tempat tujuan tetap atau di bawah tingkat pendidikan, keterampilan dan kapasitasnya (Mattoo et al., 2008).

d. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap wirausaha

Tani Massimiliano, Stéphane Mahuteau, (2008) melakukan penelitian terhadap migran dari tiga negara di Maghreeb yaitu Al Jazair, Tunisia dan Maroko setelah kembali dari Eropa. Alat analisis yang digunakan adalah descriptive dan probit model dengan variabel dependent, masuk pasar kerja atau bekerja sendiri menjadi wirausaha, menemukan hasil bahwa Pekerja mandiri di luar negeri memiliki efek positif untuk menjadi wiraswasta setelah kembali ke negaranya. Hasil lainnya dengan menggunakan tabel cross diketahui bahwa ternyata tidak terjadi perubahan antara jenis pekerjaan migran ketika di negara tujuan dan setelah pulang ke negara asal.

e. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Barajas et al. (2009) menguji dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan di 84 negara-negara penerima remitten dengan menggunakan pengamatan tahunan selama 1970-2004. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; rasio pengiriman uang terhadap PDB dari semua negara penerima lain yang menangkap efek dari pengurangan global dalam biaya transaksi dan perubahan sistematis lainnya sebagai penentu pengiriman uang secara mikro ekonomi. Hasil penelitian dalam kasus ini menunjukkan bahwa, remitten memiliki tanda negatif sementara pada penelitian lainnya tidak, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara pengiriman uang dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chami et al (2005), dengan menggunakan data pada 113 negara selama periode 29 tahun (1970-1998), mengontrol gap pendapatan dan kesenjangan suku bunga antara negara penerima dan AS sebagai penentu pengiriman uang dan menunjukkan bahwa pengiriman uang pekerja memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, yang konsisten dengan masalah moral hazard dari upaya berkurangnya pengiriman uang pekerja dengan lebih tinggi. (Chami et al, 2005). Pradhan, Upadhyay, dan Upadhyaya (2008) meneliti efek dari pengiriman uang pekerja pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 1980-2004 untuk 39 negara berkembang dan mengkonfirmasi dampak positif pada pertumbuhan.

Giuliano dan Ruiz-Arranz (2009) meneliti hubungan antara pengiriman uang dan pertumbuhan dan interaksi pengiriman uang dengan perkembangan keuangan di negara penerima, data yang digunakan adalah lebih dari 100 negara pada kurun 1975-2002 dan pengendalian efek endogeneity dari remitansi dan pengembangan keuangan. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang telah mendorong pertumbuhan dalam waktu cepat dikembangkan secara finansial negara. (Giuliano, Ruiz-Arranz 2009)

BAB VI

TENAGA KERJA INDONESIA

A. Sejarah Migrasi di Indonesia

Migrasi dalam sejarah Indonesia dimulai sejak adanya peradaban Indonesia. Ketika jaman kerajaan – kerajaan di nusantara mulai berkembang, perdagangan membawa pengaruh besar terhadap migrasi. Kerajaan di kawasan Asia bahkan jazirah Arab menyebabkan migrasi bukan hanya pada aspek ekonomi namun juga ideology, agama, budaya maupun adat istiadat. Hubungan kebudayaan dengan China dan India menyebabkan berkembangnya agama Hindu dan Budha. Perdagangan dengan Gujarati dan Jazirah Arab menyebabkan berkembang pesatnya agama Islam di Indonesia. Selain itu terjadi hubungan pernikahan antara pribumi dan pendatang menyebabkan migrasi yang sifatnya permanen sehingga memunculkan komunitas baru yaitu masyarakat Thionghoa, India dan Arab.

Migrasi kembali berkembang pada masa kolonial Belanda. Kebutuhan untuk mengelola perkebunan sementara tenaga yang mempunyai kemampuan untuk mengurus pertanian adalah penduduk dari Jawa. Oleh sebab itu, pada masa colonial banyak penduduk Jawa yang dikirim ke daerah Sumatera, Kalimantan bahkan sampai ke Suriname, New Kaledonia dan Vietnam khususnya di perkebunan tembakau, teh dan pabrik gula.

Di sisi lain, perkebunan yang dikelola oleh VOC sering tidak memperlakukan tenaga kerja secara manusiawi, tenaga kerja migran cenderung diperlakukan sebagai budak dan mendapatkan kekerasan/penindasan, sementara bangsa Inggris yang menguasai semenanjung Malaka (Singapura dan Malaysia) membuka peluang kerja sebesar – besarnya bagi penduduk asal Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu banyak buruh di Jawa dan Sumatera yang melarikan diri dan menjadi migran untuk bekerja pada perkebunan – perkebunan di Semenanjung Malaka.

Setelah masa kemerdekaan khususnya sejak masa orde baru, migrasi di Indonesia semakin banyak baik masuk maupun keluar. Sebagai negara yang baru saja merdeka dengan kekayaan alam yang sangat banyak menyebabkan arus investasi dan tenaga kerja asing masuk dengan sangat cepat. Tenaga kerja asing masuk sebagai tenaga ahli dalam perusahaan – perusahaan dan investasi besar yang masuk. Tujuan utama tenaga kerja asing ini adalah sebagai media atau sarana untuk melakukan *transfer knowledge* bagi tenaga kerja di Indonesia. Di sisi lain kemudahan transportasi dan komunikasi menyebabkan jalur migrasi antar negara semakin terbuka lebar. Tenaga kerja Indonesia banyak yang memilih menjadi tenaga kerja migran di negara lain. Hanya sayangnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia selalu dalam posisi formal sebagai tenaga kerja kerah putih yang memperoleh pendapatan atau gaji yang tinggi, sementara tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih banyak pada posisi non formal sebagai tenaga kerja kerah biru yang mendapatkan upah relative rendah, posisi kurang aman dan perlindungan yang masih jauh dari harapan.

Posisi tenaga kerja Indonesia ini sering dikenal dengan istilah Tripple D yaitu Dangerous, Dirty dan Difficult artinya Tenaga Kerja Indonesia bekerja pada posisi mengerjakan pekerjaan pekerjaan berbahaya dan jauh dari perlindungan Keselamatan Kerja, apalagi bagi tenaga kerja di sektor domestic

B. Tenaga Kerja Indonesia

Program pengiriman TKI ke luar negeri sampai saat ini masih terlalu didominasi motif pendekatan bisnis yang didefenisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok *kapitalis*. Akibatnya prinsip hitung-hitungan ekonomi selalu menjadi ukuran. PJTKI menjadikan TKI yang bekerja di luar negeri tidak lebih sebagai komoditas yang diperdagangkan sehingga aspek – aspek psikologis tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan yang harus dialami TKI mulai dari persiapan akan berangkat ke luar negeri, proses selama pendidikan, pada saat bekerja di luar negeri dan pasca kepulangan di tanah air.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seharusnya dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas, selain peluang yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi maupun sosial budaya. “Mengekspor” TKI ke luar negeri bukan saja mengirim individu TKI secara fisik tetapi sekaligus mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari berbagai aspek. Hal ini potensial memunculkan persoalan budaya dalam bentuk akulturasi dan enkulturasi dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik yang positif maupun negatif.

Apabila TKI tersebut berhasil menyelesaikan kontrak tanpa masalah dan berhasil menanggung devisa maka persoalan mungkin hanya akan berhenti pada perubahan pola relasi gender dan hubungan dengan lag/kesenjangan sosial budaya. Namun apabila TKI tersebut gagal dalam menyelesaikan kontrak dan dikembalikan sebelum masa kontrak habis dengan menggendong masalah, maka permasalahan psikologis dan traumatik menjadi lebih berat. Permasalahan timbul karena dalam dari tahun ke tahun TKI yang bermasalah semakin banyak.

Kondisi ini cukup memperlihatkan karena menunjukkan bahwa TKI mendapatkan gaji yang relatif lebih rendah dibandingkan tenaga kerja lain karena:

1. Secara sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia kita menduduki posisi 111 dari 192 negara di dunia, hal ini terutama karena disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Angkatan kerja saat ini masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 57,44 juta atau 49,52 % dari jumlah angkatan kerja seluruhnya. Derajat kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini berada pada tingkat rendah bahkan di kalangan negara–negara Asean, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat ini diperkirakan sama dengan negara Kamboja dan Vietnam, kondisi ini mengakibatkan daya saing TKI yang bekerja di luar negeri semakin turun. Salah satu indikator penting dalam pengukuran kualitas tenaga kerja adalah unsur pendidikan.
2. TKI yang berangkat ke luar negeri rata – rata mempunyai tingkat skill dan kemampuan kerja yang rendah.
3. Kemampuan komunikasi TKI sangat rendah, rata – rata tenaga kerja berangkat tanpa bekal kemampuan komunikasi sama sekali.

Ketiga hal tersebut secara bersama – sama menyebabkan tenaga kerja kita cenderung memperoleh pekerjaan di sektor informal atau pada posisi D3 yaitu *Dirty, Dangerous, Difficult*. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, maka gaji yang diperoleh TKI menjadi rendah.

C. Data Tenaga Kerja di Indonesia

Pada tahun 2004, pemerintah membentuk Undang – Undang no 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Pasal 94 ayat 3, menyatakan bahwa BNP2TKI merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Perpres No 81/2006 tentang pembentukan BNP2TKI. Sebagai badan negara visi utama BNP2TKI adalah Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat. Visi tersebut kemudian diturunkan dalam misi

1. Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI;
3. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa,

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah “.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/2004 menyebutkan,

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan “

Pembentukan BNP2TKI membuat penempatan TKI menjadi terdata dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1. Penempatan TKI tahun 2004 - 2015

Tahun	TKI	FORMAL	%	INFORMAL	%
2004	380.690	NA	NA	NA	NA
2005	474.310	NA	NA	NA	NA
2006	680.000	177.495	26,1	502.505	73,9
2007	696.746	196.191	28,16	500.555	71,84
2008	748.825	269.346	35,97	479.470	64,03
2009	632.172	103.918	16,44	528.254	83,56
2010	575.804	124.683	21,65	451.121	78,35
2011	586.802	266.191	45,36	320.611	54,64
2012	494.609	258.411	52,25	236.198	47,75
2013	512.168	168.285	32,86	343.883	67,14
2014	429.872	247.610	57,6	182.262	42,2
2015	275.736	152.394	53,52	123.342	46,48

Sumber: BNP2TKI berbagai tahun

Data BNP2TKI pada tabel 6.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah penempatan TKI dari tahun ke tahun meningkat, namun kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan Penempatan TKI secara drastis dibandingkan pada tahun sebelumnya, data tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penempatan adalah sebanyak 429.872 sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 275,736, artinya terjadi penurunan sebesar 154.136 atau 35,8%. Dari jumlah tersebut terdapat 55% TKI yang bekerja di sektor formal sedangkan yang bekerja di sektor informal sebanyak 45%.

Jumlah tersebut tersebar pada seluruh propinsi di Indonesia dengan jumlah penempatan terendah adalah pada propinsi Papua Barat dan Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian akan mempertimbangkan daerah yang memiliki jumlah TKI terbanyak dengan harapan akan mampu merepresentasikan perilaku dari TKI dan keluarga dalam memanfaatkan remitten. Sebagai bahan pertimbangan akan disajikan sepuluh besar propinsi dengan penempatan TKI terbanyak bisa ditunjukkan pada tabel 6.2. berikut ini:

Tabel 6.2. Sepuluh Propinsi dengan TKI terbanyak di Indonesia

NO	PROPINSI	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1	Jawa Barat	119.620	129.885	105.479	63.102	418.086
2	Jawa Tengah	115.456	105.971	92.590	57.077	371.094
3	Jawa Timur	100.368	93.843	78.306	48.312	320.829
4	Nusa Tenggara Barat	46.245	63.438	61.139	51.743	222.565
5	Lampung	16.259	17.975	18.500	16.109	68.843
6	Sumatera Utara	13.728	13.299	14.782	12.054	53.863
7	DKI Jakarta	15.021	14.248	7.561	1.212	38.042
8	Bali	14.082	14.617	7.716	4.869	41.284
9	Banten	10.853	13.244	9.720	4.257	38.074
10	Sulawesi Selatan	13.875	10.358	7.497	2.348	34.078

Sumber: BNP2TKI, 2016

Berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah merupakan nomor dua terbanyak dalam penempatan TKI, bahkan apabila dilihat dari total penempatan seluruh Indonesia selama empat tahun terakhir yang berjumlah 1.721.385 TKI, maka total penempatan TKI propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 21,56%. Sedangkan penempatan TKI menurut kabupaten kota terbanyak adalah sebagaimana pada tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3 Jumlah penempatan TKI terbanyak menurut kabupaten/kota

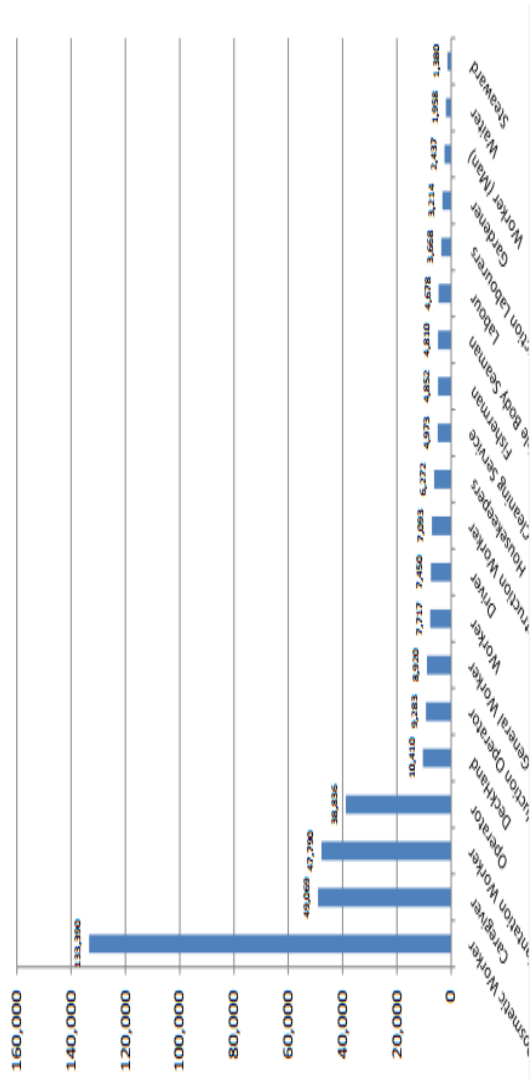
No.	DAERAH ASAL	2012	2013	2014	2015
1	LOMBOK TIMUR	19.936	33.287	29.510	25.772
2	INDRAMAYU	28.524	28.410	25.521	19.064
3	CILACAP	19.799	17.592	16.013	10.753
4	CIREBON (KAB)	16.755	18.675	15.786	10.953
5	LOMBOK TENGAH	13.675	14.793	14.109	12.175
6	CIANJUR	12.266	14.639	11.311	5.437
7	KENDAL	10.967	11.497	11.212	7.581
8	KARAWANG	10.338	11.749	8.499	3.906
9	PONOROGO	10.940	10.494	8.869	6.443
10	MALANG	11.657	10.218	8.114	3.873

Sumber : BNP2TKI

Jumlah penempatan TKI formal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun secara prosesentase masih di bawah penempatan TKI nonformal, beberapa faktor yang mendorong perubahan ini antara lain (1) Penurunan TKI Informal karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Diberlakukannya moratorium TKI PLRT di negara-negara di mana Pemerintah negara tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan bagi TKI; (2) Pemberlakuan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari (*finger print*); (3) Ketersediaan tenaga kerja unskill di daerah yang benar-benar berkurang; (4) Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat. Penurunan penempatan TKI secara keseluruhan dari tahun 2014 ke tahun 2015 merupakan imbas kebijakan Menteri Tenaga Kerja tentang penghentian penempatan TKI pada pengguna peserorangan atau *domestic worker* yang terdiri atas penerapan *hard policy* yang berupa penghentian penempatan TKI di 21 negara di kawasan Timur Tengah dan *soft policy* yaitu pengetatan penempatan TKI di negara – negara Asia Pasific. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan masuk ke dalam kategori tindak pidana *trafficking*. Peraturan ini menyebabkan PPTKIS menghentikan penempatan PLRT di negara negara tersebut dan tentu saja membawa dampak penurunan jumlah TKI.

Posisi pekerjaan TKI di luar negeri pada penempatan tahun 2014 masih didominasi oleh *domestic worker*, *caregiver*, dan *plantation worker* hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan TKI, secara detail jenis pekerjaan TKI pada penempatan tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6.1. sebagai berikut:

Gambar 6.1. Posisi Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan penempatan 2014



Sumber: Laporan BNP2TKI 201

D. Permasalahan TKI

Di era globalisasi ini, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut cukup menggembirakan karena menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia diterima di negara lain. Namun apabila dilihat dari sektor informal yang mendominasi, maka kondisi ini cukup memprihatinkan, karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal biasanya minim pengalaman dan perlindungan dalam kontrak kerja, sehingga bisa menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan yang dimulai sebelum bekerja di luar negeri, saat bekerja dan setelah kepulangannya di Indonesia.

Selain masalah internal atau pribadi yang dihadapi oleh TKI sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, berdasarkan hasil laporan penelitian, kondisi penempatan TKI yang kurang menguntungkan adalah disebabkan oleh beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya sistem informasi dan rekrutmen untuk mempertemukan antara pencari kerja dan peluang kerja di luar negeri
2. Kurang tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan sebagai TKI terampil/profesional yang memenuhi syarat rekrutmen kesempatan kerja di luar negeri
3. Belum adanya sistem pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan setiap calon TKI untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi kompetensi yang diminta pasar kerja ke luar negeri
4. Proses pemberangkat melalui jalur legal selama ini dinilai rumit, mahal dan berbelit – belit yang memiliki konsekuensi berbiaya tinggi sehingga banyak TKI memilih jalur illegal
5. Masih rapuhnya sistem dan infrastruktur perlindungan bagi TKI di luar negeri (BNP2TKI, 2009)

Kelima kelemahan tersebut menyebabkan TKI tidak mempunyai pilihan dalam bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Jumlah TKI yang semakin banyak, mencapai lebih dari tujuh juta, memunculkan permasalahan yang banyak dan beragam. Permasalahan TKI dibagi menjadi tiga titik utama yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Ketiga titik tersebut saling berhubungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mafruhah tahun 2012 dengan menggunakan metode AHP menunjukkan bahwa titik penempatan mempunyai permasalahan yang paling kompleks yang membutuhkan penanganan serius. BNP2TKI mengklasifikasikan kasus yang dihadapi oleh TKI pada masa penempatan menjadi 21 kasus. Kasus yang paling banyak dihadapi adalah TKI ingin dipulangkan, setelah dilakukan identifikasi mendalam maka diperoleh hasil bahwa kasus ini berhubungan dengan ketidak sesuaian antara pekerjaan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pekerjaan ketika di negara tujuan. Kasus yang dihadapi kedua adalah gaji tidak dibayar dan meninggal di tempat kerja. Jumlah permasalahan terbanyak berdasarkan negara tujuan, terjadi di jazirah Arab yaitu di Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar, sedangkan negara dengan jumlah kasus yang bisa dikatakan tidak ada adalah Korea Selatan dengan jumlah kasus sebanyak 4 selama 3 tahun. Permasalahan TKI bervariasi dibedakan menjadi 21 item kasus, permasalahan tertinggi adalah pada TKI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayarkan dan meninggal dunia di negara tujuan.

Tabel 6.4. Kasus yang dilaporkan TKI data tahun 2012 - 2015

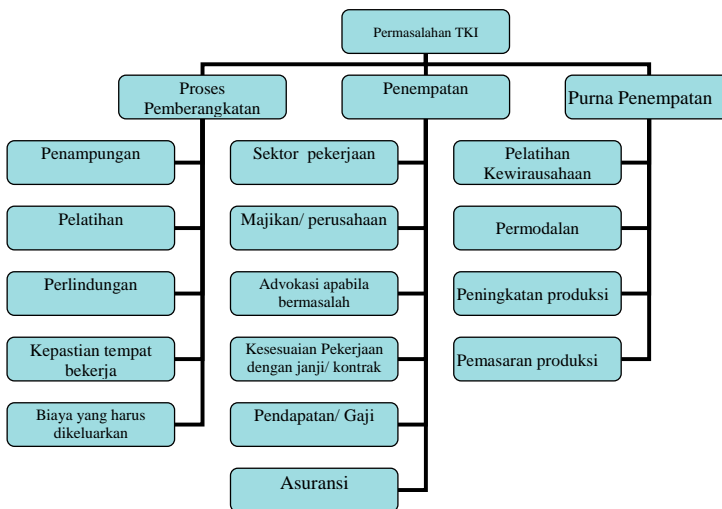
NO	JENIS KASUS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1	TKI Ingin Dipulangkan	1030	1055	818	524	3427
2	Gaji tidak dibayar	898	666	514	488	2566
3	Putus Hubungan Komunikasi	636	527	359	287	1809
4	Meninggal dunia di negara tujuan	550	363	496	680	2089
5	Pekerjaan tidak sesuai PK	622	329	234	171	1356
6	TKI sakit/rawat inap	227	196	175	244	842
7	Tindak kekerasan dari majikan	206	120	105	104	535
8	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak	147	147	90	167	551
9	TKI gagal berangkat	84	96	136	658	974
10	TKI mengalami kecelakaan	97	89	93	95	374
11	TKI tidak berdokumen	30	120	73	81	304
12	TKI dalam tahanan/ proses tahanan	97	60	63	46	266
13	Pasport & dokumen TKI ditahan PPTKIS	88	56	50	39	233
14	PPTKIS Ilegal merekrut TKI	31	37	110	37	215
15	TKI sakit	45	64	38	38	185
16	TKI lari dari Majikan (Saudi)	60	44	41	38	183
17	TKI tidak harmonis dengan pengguna	40	45	47	0	132
18	Potongan gaji melebihi ketentuan	60	38	33	34	165
19	Meninggal dunia	55	48	28	0	131
20	Pelecehan seksual	68	40	22	0	130
21	Lainnya	355	292	428	1163	2238
TOTAL		5.426	4.432	3.953	4.894	18.705

Sumber : BNP2TKI, beberapa tahun

Data pada periode sebelum tahun 2004 belum tercatat secara rapi, karena belum terbentuknya BNP2TKI, namun disinyalir jumlah masalah pada periode sebelumnya lebih banyak. Permasalahan dan kasus – kasus yang lain menjerat tentu saja merugikan bagi TKI. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2004, pemerintah membentuk Undang – Undang no 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Permasalahan yang dihadapi oleh TKI diklasifikasikan menjadi tiga permasalahan utama yaitu 1) Permasalahan pra penempatan; 2) Permasalahan pada saat penempatan; dan 3) Permasalahan Purna Penempatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pada masing – masing klasifikasi baik yang bersifat internal TKI maupun eksternal, yaitu permasalahan dari luar TKI. Secara grafis permasalahan TKI bisa digambarkan pada gambar 6.2 berikut ini :

Gambar 6.2 Pohon permasalahan TKI



Sumber: Mafruhah, 2012

D.1. Permasalahan Pra Penempatan

Permasalahan pada proses pemberangkatan yang dimaksudkan di sini adalah faktor – faktor yang dihadapi oleh seorang calon TKI sebelum dia diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri, meliputi:

- (i) Penampungan, yaitu tempat yang disediakan sebagai asrama atau penampungan sebelum seorang TKI diberangkatkan ke luar negeri, pada peraturan pemerintah, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), harus melakukan berbagai macam pelatihan baik yang sifatnya *hardskill* maupun *softskill* sebelum seorang TKI diberangkatkan ke luar negeri, termasuk di dalamnya komunikasi dan pemahaman mengenai budaya setempat dan adaptasi yang harus dilakukan. Pelatihan dilakukan secara terstruktur dengan jenis pelatihan, materi pelatihan dan waktu pelatihan yang telah ditentukan. Tempat penampungan harus memenuhi kebutuhan TKI dan memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan
- (ii) Pelatihan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diberikan baik bersifat teknis (*hardskill*) maupun non teknis (*softskill*) seperti komunikasi, motivasi, budaya dan psikologi baik yang merupakan keharusan dan bersertifikat maupun yang tidak
- (iii) Perlindungan, merupakan perlindungan yang diberikan kepada TKI selama menunggu proses keberangkatan khususnya ketika berada di tempat penampungan
- (iv) Kepastian tempat usaha. Seorang TKI sebelum berangkat keluar negeri harus sudah memiliki kepastian tempat di mana dia akan bekerja dan juga disampaikan kepada keluarga sehingga akan bisa melakukan kontak apabila dibutuhkan
- (v) Biaya yang dikeluarkan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang TKI agar bisa ditempatkan dan bekerja di luar negeri. Biaya meliputi biaya pelatihan dan penampungan sebelum diberangkatkan, biaya transportasi pemberangkatan dan berbagai macam tes kesehatan. Biaya bisa dibayarkan secara langsung oleh

Calon TKI atau dilakukan dengan mekanisme potong gaji, namun bagaimanapun biaya yang dikeluarkan maupun metode pembayaran harus transparan dan diketahui oleh CTKI.

Selain kelima permasalahan tersebut, sebenarnya terdapat permasalahan yang cukup berpengaruh bagi CTKI yaitu sumber informasi, kecukupan usia yang dibutuhkan dan tempat keberangkatan. Selama ini CTKI paling banyak memperoleh informasi dari sponsor atau calo dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari dinas tenaga kerja. Informasi awal tersebut inilah yang sering kali menyebabkan TKI rentan bermasalah khususnya pada aspek legalitas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dengan keberangkat melalui calo atau sponsor menjadi penyebab utama munculnya TKI ilegal. Pada beberapa kantong TKI, dinas tenaga kerja mulai melakukan kegiatan aktif yang akan memberikan kesempatan kepada CTKI untuk mendapatkan peluang kerja secara legal dan melalui lembaga penyalur yang legal dan kompeten.

D.2. Permasalahan Penempatan

Permasalahan pada tempat Bekerja yaitu permasalahan yang akan dihadapi oleh TKI ketika bekerja di luar negeri, permasalahan pada tempat kerja meliputi:

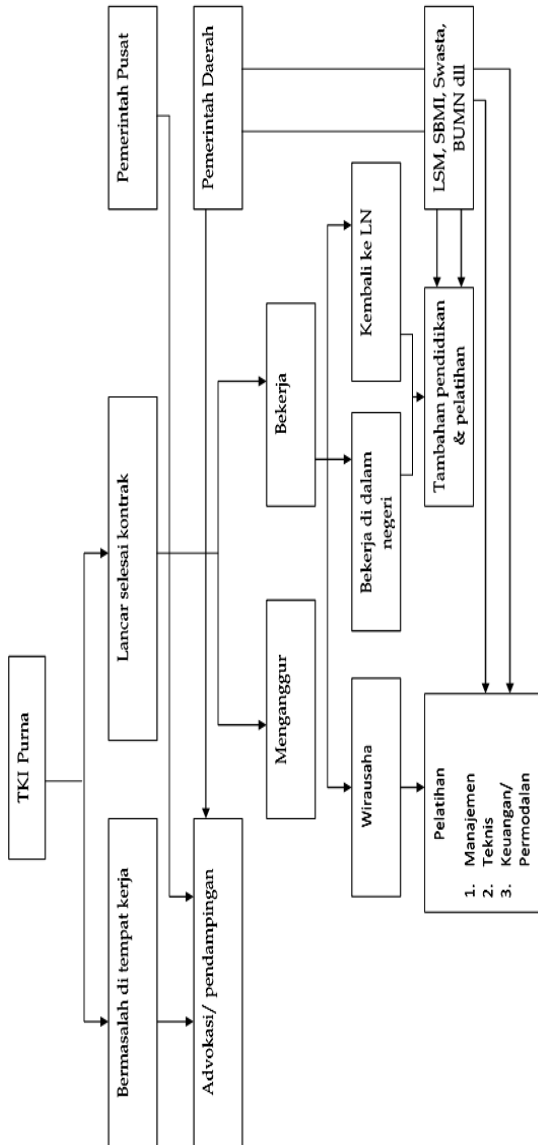
- (i) Sektor Pekerjaan, yaitu sektor formal maupun non formal
- (ii) Majikan atau perusahaan tempat bekerja, yaitu seberapa nyaman dan terjaminnya posisi di tempat bekerja, bonafid atau tidaknya tempat kerja
- (iii) Advokasi atau pendampingan, yaitu seberapa besar pendampiang-an atau advokasi yang akan diperolehnya ketika menghadapi masalah di tempatnya bekerja di luar negeri
- (iv) Kesesuaian pekerjaan dengan kontrak yang dijanjikan yaitu apakah pekerjaan yang diperolehnya di luar negeri seperti kontrak yang ditandatangani atau dijanjikan oleh PPTKIS

- (v) Pendapatan atau gaji yang diterima yaitu besaran gaji atau pendapatan yang akan diterima oleh TKI selama berkeja di luar negeri
- (vi) Asuransi, yaitu perlindungan yang akan diperolehnya apabila dia mengalami kecelakaan atau masalah di tempat kerja, baik itu asuransi disiapkan oleh PPTKIS dalam negeri maupun oleh perusahaan atau majikan tempatnya bekerja di luar negeri

Dari tahun ke tahun penempatan TKI pada sektor informal semakin berkurang terlebih lagi dengan berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan peluang kerja sektor informal yang lebih baik baik CTKI.

D.3. Permasalahan purna penempatan yaitu permasalahan yang dihadapi oleh TKI setelah kepulangan kembali ke tanah air. Kebijakan pemerintah melalui BNP2TKI menyebutkan bahwa bekerja menjadi TKI hanya merupakan katup pengaman ketika lapangan kerja sulit di tanah air, sehingga setelah menyelesaikan kontrak dan kembali ke tanah air maka TKI purna diharapkan akan memanfaatkan keahlian yang diperolehnya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia atau menjadi wirasaha. Secara detail harapan dan permasalahan yang dihadapi oleh TKI purna sebagaimana dalam gambar 6.3 berikut ini:

Gambar 6.3 TKI purna penempatan



Gambar 6.3 menunjukkan bahwa terdapat dua harapan utama bagi TKI purna yaitu untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya atau memulai pekerjaan sebagai wirausaha baru. Pada masing – masing pilihan TKI purna tetap membutuhkan adanya berbagai pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan yang dimilikinya baik dalam usaha atau memproduksi barang sampai dengan ketrampilan untuk mengelola atau manajemen sederhana bagi usaha.

E. Remittansi TKI

Jumlah TKI yang berada di luar negeri berbanding lurus dengan jumlah remitansi yang dikirimkan ke Indonesia. Semakin banyak TKI, maka semakin banyak remitansi yang akan dikirimkan. Remitansi adalah dana yang dikirimkan oleh tenaga kerja dari luar negeri kepada keluarganya di tanah air. Jumlah remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kawasan penyumbang remitansi tertinggi adalah 1) Timur Tengah dengan jumlah remitansi sebesar 3.521 juta dollar; 2) Asean yaitu sebesar 2.599 juta dollar dengan remitansi tertinggi dibukukan oleh TKI dari Malaysia; 3) ASIA selain ASEAN yaitu sebesar 2.111 juta dollar; 4) Amerika dengan remitansi sebesar 714 juta dollar; 5) Eropa dengan remiten sebesar 159 juta dollar; 6) Australia dengan remitansi sebesar 58 juta dollar dan terakhir adalah di kawasan 7) Afrika dengan remitansi yang dikirimkan sebesar 52 juta dollar. Sedangkan berdasarkan negara maka penyumbang remitansi terbanyak adalah dari Saudi Arabia, kemudian Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Amerika Serikat.

Tabel 6.3

Data Remitansi TKI per negara 2010 – 2015 (dalam millions US \$)

NO	NEGARA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	ASEAN	2.586	2.628	2.711	3.723	2.943	2.599
1	Malaysia	2.312	2.306	2.321	3.194	2.542	2.193
2	Singapura	226	261	308	403	304	300
3	Brunei Darussalam	48	59	75	108	82	91
4	Lainnya	-	2	7	18	15	15
II	Asia selain ASEN	1.186	1.275	1.474	1.973	1.616	2.111
1	Hongkong	450	486	554	734	573	734
2	Taiwan, Provinsi China	457	492	578	801	668	897
3	Korea Selatan	91	94	123	190	178	269
4	Jepang	152	160	175	196	154	163
5	Makau	36	42	40	44	36	41
6	Lainnya	-	1	4	8	7	7
III	AUSTRALIA DAN OCEANIA	3	3	6	18	46	58
1	Australia	3	3	6	14	40	48
2	Lainnya	-	-	-	4	6	10
IV	Timur Tengah	2.760	2.652	2.376	2.717	2.870	3.521
1	Arab Saudi	2.284	2.213	1.938	2.142	2.267	2.762
2	UEA	197	204	206	271	279	333
3	Kuwait	75	32	23	34	37	42
4	Bahrain	11	14	17	24	24	33
5	Qatar	40	50	62	87	81	103
6	Oman	30	30	28	38	56	103
7	Yordania	103	90	77	94	101	117
8	Mesir	-	-	-	-	1	-

9	Siprus	4	14	13	5	2	2
10	Sudan	-	-	-	-	-	-
11	Lainnya	16	5	12	22	22	26
V	AFRIKA	6	6	16	41	46	52
1	Afrika Selatan	5	6	14	39	44	48
2	Lainnya	1	-	2	2	2	4
VI	AMERIKA	100	150	374	668	691	714
VII	EROPA	88	20	59	125	136	159
1	Belanda	-	2	7	16	25	32
2	Italia	-	5	19	37	32	38
3	Jerman	4	4	6	13	18	21
4	Inggris	3	3	5	8	11	11
5	Perancis	-	-	-	4	4	4
6	Spanyol	4	5	11	20	16	19
7	Lainnya	77	1	11	27	30	34

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2016

Remitansi mempunyai beberapa implikasi antara lain (1) Terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga TKI di daerah asal; (2) Bertambahnya permintaan baik secara lokal maupun regional yang akan disambut dengan pertambahan produksi; (3) Sebagian remitansi digunakan sebagai dana pendidikan sehingga akan meningkatkan jumlah anak yang sekolah di kantong TKI; (4) Remittan yang digunakan untuk berwirausaha akan mampu menyerap tenaga kerja (Flachaire et al. 2014)

BAB VII

PERATURAN KEBIJAKAN TKI DI INDONESIA

A. Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan yang mendukung penyelesaian permasalahan TKI ditetapkan baik pada tataran pemerintah pusat melalui Kementerian ketenagakerjaan, BNP2TKI maupun pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebenarnya telah secara detail mengatur kegiatan serta program kerja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten/kota, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sampai dengan perwakilan pemerintah yang ada di luar negeri. Secara rinci masing – masing instansi bertanggung jawab sebagaimana tabel berikut 7.1

Tabel. 7.1. Kegiatan dan Instansi Penanggung Jawab Penanganan TKI dari titik para penempatan, penempatan sampai dengan pasca penempatan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
1.	Memorandum Of Understanding	Pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	pasal 11 ayat (1) UU 39/2004
2.	Surat Ijin PPTKIS	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	pasal 12 UU 39/2004
3.	Penilaian Mitra Usaha di Negara Tujuan (Agency)	Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	pasal 25 ayat (1) UU 39/2004
4.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Penempatan	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
5.	Dokumen Surat Permintaan TKI	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
6.	Dokumen Rancangan Perjanjian Kerja	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
7.	Surat Izin Pengerahan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	pasal 32 ayat (1) UU 39/2004
8.	Persetujuan Bahan penyuluhan Informasi Peluang Kerja di Luar Negeri	BNP2TKI	pasal 34 ayat (3) UU 39/2004
9.	Surat Pengantar Rekrut	BP3TKI	pasal 9 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
10.	Pendaftaran SIP, Surat Pengantar Rekrut, Rancangan Perjanjian Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	pasal 10 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
11.	Pendaftaran Petugas Rekrut dari PPTKIS	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota	pasal 12 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
12.	Pendaftaran Calon TKI	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 12 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
13.	Seleksi minat, bakat, dan ketrampilan calon TKI	Petugas antar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dan Petugas PPTKIS	pasal 16 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
14.	Pembuatan daftar nominasi calon TKI yg lulus seleksi	Petugas antar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dan Petugas PPTKIS	pasal 19 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
15.	Penerbitan Berita Acara Hasil seleksi calon TKI	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 19 ayat (4) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
16.	Izin Perusahaan Asuransi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
17.	Penetapan Biaya Penempatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 46 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
18.	Penandatanganan Perjanjian penempatan TKI (dilampiri bukti pembayaran asuransi Para Penempatan)	Diketahui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 19 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
19.	Rekomendasi Paspor	Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota	Penjelasan pasal 51 huruf f UU 39/2004
20.	Penerbitan Paspor	Diijai Imigrasi	
21.	Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
22.	Izin Tempat Penampungan	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	
23.	Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
24.	Pedoman Pendidikan dan Pelatihan kerja Calon TKI	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 23 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
25.	Sertifikasi Kompetensi	Lembaga sertifikasi profesi yg dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Pasal 22 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
26.	Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 36 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
27.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan	BP3TKI difasilitasi oleh dinas Ketenagakerjaan Provinsi	Pasal 32 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
28.	Pembayaran Asuransi Masa dan Pra Penempatan	PPTKIS	
29.	Pembayaran DP3TKI	PPTKIS	
30.	Bebas Fiscal Luar Negeri	Ditjen Pajak	
31.	Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	BNP2TKI	Pasal 38 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
32.	Penandatanganan Perjanjian Kerja	Dilakukan dihadapan pejabat dinas ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/ Kota	Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
33.	Persetujuan Perjanjian Kerja Perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja	Perwakilan Republik Indonesia	Pasal 29 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
34.	Pelaporan kedatangan TKI pada Perwakilan RI	PPTKIS	Pasal 74 ayat (2) UU 39/2004
35.	Perlindungan TKI di Luar Negeri	Perwakilan RI	Pasal 78 ayat (1) UU 39/2004
36.	Pelaporan TKI perseorangan	Dinas Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik Indonesia	Pasal 52 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
37.	Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
38.	Pelaporan Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI (setiap 6 bin) kepada Menteri dan BNP2TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (4) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
39.	Pelaporan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan RI , tibusan kepada Menteri dan BNP2TKI	PPTKIS melalui Mitra Usahanya dan atau Perwakilan PPTKIS	Pasal 56 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
40.	Pelayanan Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal	PPTKIS	Pasal 56 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
40.	Pelayanan Kepulangan TKI	Pos Pelayanan TKI	Pasal 58 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
41.	Penyelesaian hak-hak TKI yg mengalami PHK	PPTKIS	Pasal 59 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
42.	Penyelenggaraan Layanan satu Atap di Daerah	Gubernur sebagai wakil Pemerintah	Pasal 43 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
43.	Koordinasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI	BP3TKI, dinas provinsi, dinas Kabupaten / Kota dan instansi pemerintah terkait.	Pasal 42 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
44.	Izin Penempatan TKI oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta bukan PPTKIS	Menteri atau pejabat yang ditunjuk	Pasal 50 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/Men/X/2010
45.	Penerbitan KTKLN untuk TKI yang bekerja secara perseorangan	BNP2TKI	Pasal 52 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
46.	Pelayanan data dan informasi TKI	BNP2TKI	Pasal 53 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
47.	Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
48.	Pelayanan Kepulangan TKI	Pos Pelayanan TKI	Pasal 58 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
49.	Penyelesaian hak-hak TKI yg mengalami PHK	PPTKIS	Pasal 59 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
50.	Pelaporan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri	BNP2TKI	Pasal 60 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
51.	Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI	Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.	Pasal 61 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010

Sumber: Peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan

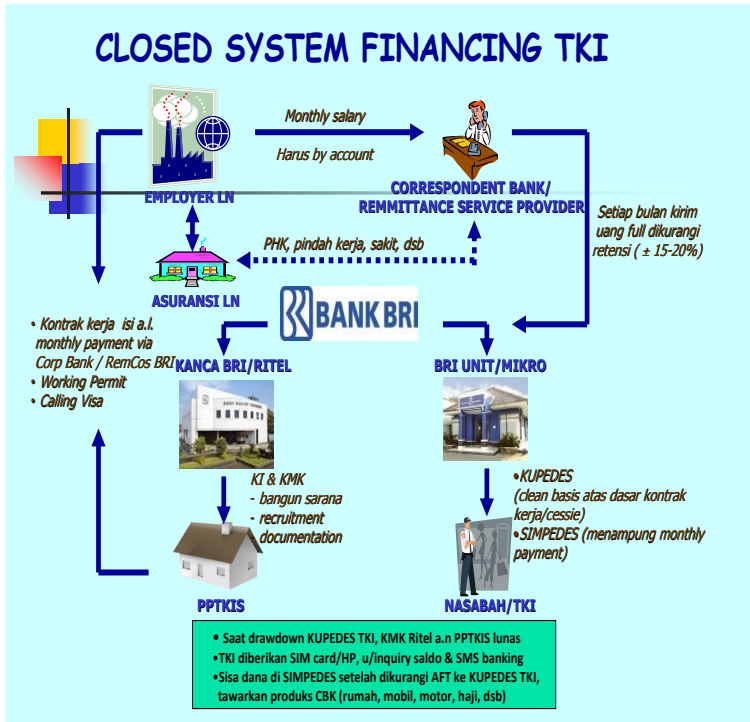
B. Program Kebijakan BUMN/swasta yang mendukung fasilitasi TKI

Masukan berikutnya adalah dari Perbankan, BUMN dan LSM. Salah satu Perbankan yang secara intens ikut terlibat dalam fasilitasi TKI adalah BRI. Beberapa program yang dilakukan oleh BRI antara lain sebagai berikut:

Program BRI fast. Terdapat 3 titik sasaran yang dibidik oleh pemerintah kabupaten Sragen dalam hal ini yaitu

- a. Pada titik pra penempatan, yaitu pihak BRI memberikan pinjaman pembiayaan bagi TKI yang sudah memiliki kepastian berangkat dengan kompensasi pengiriman remitten melalui BRI dan pelunasan bisa dilakukan dengan pemotongan remmitten yang dikirm ke luar negeri. Dalam perjanjian ini, yang bisa diakomodasi baru bagi TKI pada sektor formal
- b. Pada titik penempatan atau setelah bekerja, maka BRI fast akan melayani dalam pengiriman remitten. Sesuai dengan MOU, BRI fast untuk wilayah Jateng dan Yogyakarta dipusatkan di Sragen. Dengan dilengkapi satu kantor cabang pembantu, satu kantor teras serta 32 kantor unit, sehingga akan memberikan kemudahan bagi keluarga TKI untuk mengambil remitten tanpa harus melewati atau minta bantuan pihak – pihak lain, karena hampir di setiap titik kantong TKI pasti terdapat kantor unit BRI.
- c. Pada titik Purna Penempatan atau setelah pulang dari luar negeri, BRI memberikan fasilitas KUR dengan prioritas bagi TKI, sehingga sampai saat ini banyak TKI pur yang sudah sukses mengelola usahanya. Secara lebih detail beberapa contoh kasus TKI purna yang sukses mengelola wirausaha akan dibahas dalam sub bab tersendiri. Berikut ini system yang dibuat oleh BRI dalam rangka fasilitasi bagi TKI

Gambar 7.1. Fasilitas BRI untuk TKI



C. Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung fasilitasi TKI

Hasil penelitian terhadap TKI menunjukkan prioritas lain yang membutuhkan pelatihan dan pendampingan adalah pada pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas produksi. Oleh sebab itu maka Perguruan Tinggi melalui Tri Dharma melakukan kegiatan – kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi TKI purna antara lain:

1. Business Motivation Training, merupakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi bagi TKI purna untuk berani memulai usaha baru
2. Pelatihan pengembangan produk, merupakan pelatihan untuk mengidentifikasi produk yang bisa dipilih oleh TKI
3. Pelatihan manajemen keuangan dasar. Salah satu titik lemah wirausaha baru adalah ketidak mampuan untuk membedakan antara keuangan rumah tangga dan keuangan usaha sehingga sering sekali usaha yang tengah berjalan gagal karena kegagalan dalam mengelola keuangannya.
4. Pembukaan jejaring permodalan dan jejaring pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R.H. & Page, J., 2005. Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), pp.1645–1669.
- Ambrosius, C. & Cuecuecha, A., 2016. Remittances and the Use of Formal and Informal Financial Services. *World Development*, 77, pp.80–98. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.08.010>.
- Amuedo-Dorantes, C. & Mundra, K., 2013. Immigrant Homeownership and Immigration Status: Evidence from Spain. *Review of International Economics*, 21(2), pp.204–218.
- BNP2TKI, 2015. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2014*, JAKARTA.
- Borjas, G.J., 2015. Immigration and Globalization: A Review Essay. *Journal of Economic Literature*, 53(4), p.14.
- Borjas, G.J., 2015. Immigration s and Globalization Journal of Economic Literature 2015 Immigration. , pp.961–974.
- Carling, J., 2005. *Migrant remittances and development cooperation*, Oslo Norway: PRIO.
- Dustmann, C. & Glitz, A., 2011. *Chapter 4 - Migration and Education*, Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53444-6.00004-3>.
- Dustmann, C. & Kirchkamp, O., 2002. The optimal migration duration and activity choice after re-migration. *Journal of Development Economics*, 67(2), pp.351–372.

- Flachaire, E., García-Peñalosa, C. & Konte, M., 2014. Political versus economic institutions in the growth process. *Journal of Comparative Economics*, 42(1), pp.212–229. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2013.05.001>.
- Frankel Jeffrey A., 2009. *Are Bilateral Remittances Countercyclical ?*, CAmbridge.
- Gagnon, 2014. *Migration with Labour*, Europ. Available at: ean Union.
- Ghosh, B., 2006. *Migrants Remittances and Development; Myths, Rhetoric and Realities*, Den Haag.
- Hines, A., 2014. Migration , Remittances and Human Capital Investment in Kenya.
- Hugo, G., 1993. Theories of Internatonal Migration.
- Imai, K.S. et al., 2014. Remittances, growth and poverty: NEW evidence from Asian countries. *Journal of Policy Modeling*, 36(3), pp.524–538. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2014.01.009>.
- IOM, 2010. *Remittances and Investment Opportunities for Egyptian Migrants*, Cairo.
- Khodeir, A.N., 2015. Migration Remittances Inflows and Macroeconomic Shocks : The Case of Egypt. , 5(4), pp.1001–1010.
- Lekhe, F.S. et al., 2014. Giffen Behavior for Rice Consumption in Rural Bangladesh. *International Journal of Applied Economics*, 11(1), pp.48–59.
- Leon-ledesma, M. et al., 2006. Remittances , Institutions and Economic Growth. , (2139).
- Lueth, E. & Ruiz-Arranz, M., 2006. A Gravity Model of Workers ' Remittances. *IMF Working Paper - Asia and Pacific Department*, 06.

- Massey, D.S., 1999. International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century The Role of the State. *Population and Development Review*, 25(2), pp.303–322.
- Massey, D.S. et al., 1993. Theories of International A Review Migration : and Appraisal. *Population English Edition*, 19(3), pp.431–466. Available at: <http://www.jstor.org/pss/2938462>.
- Mattoo, A. & Neagu, I.C., 2006. Brain Waste ? Educated Immigrants in the US Labor Market. , (June).
- Michael Todaro, S.S., 2012. *Ekonomi Pembangunan* 11th ed., Surabaya: Erlangga Surabaya.
- Piracha, M. & Vadean, F., 2010. Return Migration and Occupational Choice: Evidence from Albania. *World Development*, 38(8), pp.1141–1155. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.015>.
- Pozo, S. & Thieme, 2006. Classical Migration Research. , (2006), pp.36–40.
- Presbitero, A.F., Bettin, G. & Spatafora, N., 2014. Remittances and Vulnerability in Developing Countries. *the World bank*, (March).
- Sayan, S., 2006. *Business Cycles and Workers' Remittances: How Do Migrant Workers Respond to Cyclical Movements of GDP at Home?*, TURKEY.
- Singh, R.J., Haacker, M. & Lee, K., Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in Sub-Saharan Africa.
- Taylor, J.E., 2006. International migration and economic development. *In International symposium on international migration and development*, 28(June), p.30.
- Yang, D., 2008. International Migration , Remittances and Household Investment : Evidence From Philippine Migrants ' Exchange Rate Shocks *. , 118(2004), pp.591–630.

Buku Migrasi

by Nurul Isriqomah

Submission date: 16-Dec-2019 01:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 1235248730

File name: 2.1_-_Buku_Migrasi.pdf (3.42M)

Word count: 24406

Character count: 152453

Izza Mafruhah, dkk.

MIGRASI DAN PERMASALAHAN

SEBUAH OVER VIEW KONDISI DI INDONESIA



**MIGRASI DAN PERMASALAHAN
SEBUAH OVER VIEW KONDISI
DI INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Izza Mafruhah, dkk

**MIGRASI DAN PERMASALAHAN
SEBUAH OVER VIEW KONDISI
DI INDONESIA**

CV. Djiwa Amarta Press - Solo

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Migrasi dan Permasalahan Sebuah Over View Kondisi di Indonesia. Cetakan I. CV. Djiwa Amarta Press. Surakarta. 2017

viii + 115 hal; 14.8x21 cm

MIGRASI DAN PERMASALAHAN SEBUAH OVER VIEW KONDISI DI INDONESIA

Hak Cipta© Izza Mafruhah,dkk. 2017

Penulis

Izza Mafruhah, SE., M.Si
Dra. Nunung Sri Mulyani, M.Si
Nurul Istiqomah, SE., M.Si

Editor

Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum

Ilustrasi Sampul

cakraArtdesign

Penerbit

CV. Djiwa Amarta Press
Jl. Awan RT 03/RW 21 Gulon, Jebres, Surakarta
Email: djiwaamartapress@gmail.com
Telp. 081938709199

Cetakan I, Edisi I, Desember 2017
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

ISBN 978-602-60585-6-0

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah atas terselesainya buku mengenai Migrasi dan Permasalahannya, sebuah over view kondisi di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data – data kepustakaan, literatur terkait, data – data sekunder dan primer yang terkait dengan migrasi.

Buku ini mencoba memberikan beberapa permasalahan *backward dan forward* tentang migrasi yang dimulai dari permasalahan demografi, di mana migrasi merupakan salah satu dari permasalahan utama yang mempengaruhi struktur demografi suatu negara, teori – teori kependudukan, yang akan dikombinasikan dengan teori tenaga kerja dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Migrasi sebagai sebuah bahasan akan menjadi salah satu bab dalam buku ini yang berisikan teori migrasi dan beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan migrasi baik secara global maupun nasional. Pada bab berikutnya penulis akan membahas tentang migrasi di Indonesia, TKI dan permasalahan yang dihadapi. Buku akan ditutup dengan beberapa peraturan perundangan tentang migrasi dan langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun BUMN dalam menyelesaikan permasalahan TKI.

Buku ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada BNP2TKI khususnya kepada bapak Edi Subagyo, mantan sekretaris utama BNP2TKI, bapak Agusdin, Deputi penempatan, bapak AB Rahman, kepala BP3TKI Jawa Tengah, sahabat dan teman yang senantiasa membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Di akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I DEMOGRAFI DAN PERMASALAHANNYA	1
A. Kependudukan	1
B. Teori Kependudukan	7
C. Struktur Kependudukan	11
BAB II KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	19
A. Kondisi Kependudukan Secara Nasional	19
B. Kondisi Kependudukan per Propinsi	21
BAB III KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	27
A. Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja	27
B. Teori – teori Ketenagakerjaan	30
C. Permintaan Tenaga Kerja	32
D. Penawaran Tenaga Kerja	36
E. Elastisitas Tenaga Kerja	38
F. Angkatan Kerja dan Pengangguran	39
G. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia	44
H. Sistem Perencanaan Tenaga Kerja di Indonesia	46
BAB IV MIGRASI	51
A. Pengertian Migrasi	51
B. Teori – Teori Migrasi	53
C. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi	57
D. Karakter Migrasi	63
E. Penelitian tentang Migrasi Internasional	64
BAB V REMITANSI	67
A. Pengertian Remitansi	67
B. Pemanfaatan Remitansi	69
C. Remitansi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	73
D. Hasil Penelitian Tentang Remitansi	78

BAB VI TENAGA KERJA INDONESIA	87
A. Sejarah Migrasi di Indonesia	87
B. Tenaga Kerja Indonesia	89
C. Data Tenaga Kerja Indonesia	90
D. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia	97
E. Remitansi Tenaga Kerja Indonesia	105
BAB VII PERATURAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA	109
A. Peraturan Perundangan	109
B. Program Kebijakan BUMN/Swasta yang Mendukung Fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia	113
C. Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Mendukung Fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia	115
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB 1

DEMOGRAFI DAN PERMASALAHANNYA

A. Kependudukan

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk termasuk perubahan – perubahan yang terus berjalan karena adanya kelahiran, kematian, migrasi dan penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan pada kriteria – kriteria yang sesuai dengan kebutuhan meliputi pendidikan, kesehatan, aspek social, ekonomi dan ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dan keagamaan. Ilmu kependudukan tersebut berhubungan dengan matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, kedokteran dan statistika. Dalam kependudukan terdapat tiga komponen penting yang perlu kita perhatikan yaitu *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migration* (perpindahan). Faktor pendukung kependudukan dalam suatu wilayah adalah perkawinan dan mobilitas social.

Kependudukan tidak mempelajari penduduk secara individu, tetapi penduduk secara agregat dalam suatu wilayah tertentu baik internasional nasional, regional maupun lokal. Kependudukan mempunyai fungsi kuantitatif sehingga sering dihubungkan dengan ilmu statistic. Variabel – variable dalam kependudukan senantiasa berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Semakin lama

kebutuhan masyarakat semakin banyak dan berkembang sehingga akan Informasi tentang kependudukan menjadi sangat *urgent* (penting) untuk menyusun perencanaan pembangunan di berbagai bidang, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi kependudukan akan digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah daerah, informasi kependudukan yang lengkap akan membantu perencanaan program kerja yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Sebagai contoh jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu acuan dalam penghitungan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah kelahiran hidup, angka kematian bayi, jumlah manula, jumlah angkatan kerja dan informasi kependudukan baik yang umum maupun spesifik akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan prioritas program kerja baik jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun rencana kerja tahunan.

Salah satu program kerja pemerintah yang terbukti fenomenal dan mengubah peta kependudukan di Indonesia adalah Keluarga Berencana (KB).

- b. Bagi pengusaha, Informasi kependudukan akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan produk yang akan dibuat, jenis dan model produk yang dibuat, peluang pasar yang akan dituju, segmentasi dan sebagainya. Dengan memahami kependudukan maka pengusaha akan bisa melakukan diferensiasi produk yang tepat dan mampu meningkatkan jumlah penjualan.
- c. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat swasembada dan swadaya khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sector kependudukan menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat kemajuan dan kemakmuran suatu Negara. Semakin sejahtera individu – individu dalam masyarakat maka akan semakin makmur suatu Negara.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, terdapat tiga komponen utama kependudukan yaitu *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migration* (perpindahan) yang merupakan unsur penting dalam pembangunan sebuah negara. Tiga komponen tersebut secara rinci bisa ditunjukkan dalam sub bab sebagai berikut:

A.1. Angka Kelahiran

Angka Kelahiran, merupakan salah satu komponen utama dalam laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Angka kelahiran kasar mempunyai pengertian jumlah bayi yang lahir hidup pada setiap 1.000 penduduk selama periode 1 tahun. Angka tersebut akan memberikan gambaran mengenai pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dan bagaimana struktur penduduknya. Angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan penduduk berstruktur muda, permintaan akan kebutuhan fisik baik private maupun public akan bertambah, khususnya di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan.

Faktor yang dapat mendorong angka kelahiran di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pernikahan di usia muda;
- 2) Adanya beberapa anggapan di masyarakat, bahwa a) anak sebagai penentu status sosial; b) punya banyak anak merasa terpandang di mata masyarakat; c) anak sebagai penerus keturunan; d) banyak anak banyak rezeki.

Selain faktor pendorong di atas, terdapat pula faktor-faktor penghambat angka kelahiran, di antaranya yaitu:

- 1) Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Alasan ekonomi atau pendidikan, orang menunda perkawinan;
- 3) wanita karier, merasa repot jika mempunyai anak banyak;
- 4) Karena suatu penyakit tertentu yang diderita perempuan, seperti kanker rahim, atau keguguran ketika melahirkan;

Pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sumber daya alam dan efisiensi secara tidak langsung mempunyai pengaruh negative terhadap kesejahteraan masyarakat. Struktur penduduk muda biasanya dimiliki oleh negara – negara sedang berkembang.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mencanangkan program keluarga berencana (KB). Tujuan Keluarga Berencana adalah sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk terbukti Program KB yang kemudian berubah menjadi gerakan KB adalah salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang sangat berhasil dan mampu menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan angka kelahiran.

A.2. Angka Kematian

Angka kematian kasar (*crude death rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa besar kematian yang terjadi per 1000 penduduk. Pada kasus umum, persentase kematian pada usia tua lebih besar dibandingkan usia muda. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk, selain itu juga bisa dipakai sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Semakin rendah angka kematian kasar mengindikasikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian antara lain

- a) adanya bencana alam dan wabah penyakit;
- b) fasilitas kesehatan yang kurang;
- c) tingkat kesehatan masyarakat yang rendah;
- d) makanan kurang bergizi;
- e) kecelakaan lalu lintas;
- f) adanya peperangan.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat tingginya angka kematian antara lain

- a) fasilitas kesehatan yang lengkap;
- b) kemajuan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
- c) larangan agama membunuh orang;
- d) makanan cukup bergizi;
- e) lingkungan yang bersih dan teratur.

Angka kelahiran kasar dan angka kematian secara bersama – sama akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Ukuran kesejahteraan yang lain adalah angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Terdapat banyak sebab dalam kasus kematian ibu dan bayi selain karena aspek kesehatan atau fisiologis, kasus kematian juga dipengaruhi oleh permasalahan sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi anak – anak, faktor gizi buruk juga menyebabkan anak-anak rentan terhadap penyakit menular, sehingga mudah terinfeksi dan menyebabkan tingginya kematian bayi dan balita di daerah.

A.3. Migrasi

Secara harfiah migrasi diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik masih dalam konteks suatu negara atau pemerintahan maupun sudah menyeberangi batasan politik dan administrasi, baik menetap secara permanen maupun menetap sementara. International Organisations of Migration (IOM) menjelaskan bahwa migrasi terdiri dari perpindahan yang sifatnya legal maupun illegal, pengungsi karena politik, keamanan, bencana alam maupun karena faktor – faktor ekonomi. Migrasi secara ekonomi sering dijelaskan sebagai

perpindahan penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja (IOM 2010).

Migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja. Pada konsep lama, migrasi lebih banyak dilakukan antar wilayah atau daerah dalam satu negara, namun pada tiga dasa warsa terakhir, dimulai sejak awal tahun 1980an, konsep migrasi di Indonesia sudah berubah paradigma-nya menjadi migrasi Internasional.

Migrasi tidak hanya berpengaruh dalam meningkatkan ukuran populasi, tetapi juga mengubah piramida usia bagi negara tujuan dan negara asal. Migran cenderung lebih terkonsentrasi di kelompok usia muda dan produktif secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk asli sehingga akan memberikan kontribusi pada pengurangan rasio ketergantungan (Gagnon 2014).

Migrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor di mana penduduk akan mengalir dari daerah yang miskin ke daerah kaya, daerah peperangan ke daerah aman, daerah dengan kesempatan kerja rendah khususnya ke daerah dengan kesempatan kerja tinggi. Migrasi akan membawa dampak bukan hanya pada daerah yang tujuan namun juga pada daerah asal.

Ketiga indicator tersebut yaitu angka kelahiran, angka kematian dan migrasi secara bersama – sama akan mempengaruhi kondisi kependudukan di suatu Negara, baik secara umum maupun khusus untuk bidang ketenagakerjaan.

B. Teori Kependudukan

Teori kependudukan mulai banyak dibahas setelah munculnya kekhawatiran semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia sementara lahan yang digunakan untuk tinggal dan hidup terbatas, menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Keterbatasan lahan akan menghasilkan bahan pangan yang terbatas sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kelaparan massal bagi masyarakat dunia, habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan menimbulkan perebutan penguasaan sumber daya tersebut.

Peningkatan kebutuhan hidup penduduk yang selama ini disokong oleh alam akan menyebabkan kerusakan terhadap alam dan lingkungan hidup sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan yang di masa depan akan merugikan bagi masyarakat dunia. Salah satu tanda – tanda serius terjadinya kerusakan lingkungan adalah pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem seperti yang terjadi akhir – akhir ini.

Para ahli kependudukan mulai memberikan pendapat dan gagasan yang terangkai dalam teori – teori kependudukan sejak awal abad 18, dengan beberapa tokoh utama yang memberikan peran dan warna dalam penentuan teori – teori para ahli abad – abad berikutnya. Terdapat beberapa perbedaan yang significant dari masing – masing teori yang telah dibangun namun semuanya mengacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia.

Pemikiran ini menyebabkan kependudukan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Beberapa tokoh yang berperan dalam teori kependudukan antara lain Robert Malthus, Karl Marx, Warren Thompson,

B.1. Robert Malthus (1766 – 1834)

Robert Malthus adalah ahli politik ekonomi berasal dari Inggris. Kepeduliaannya kepada masalah kependudukan didorong oleh kekhawatiran atas bertambahnya penduduk yang tak terkendali karena kelahiran. Terdapat 2 tulisan penting yang dibuat yaitu *The Principle of Population (1798)* dan *A Summary View of The Principle of Population (1830)*. Teori Malthus yang terkenal adalah bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan mengikuti deret hitung. Teori tersebut mengandung arti bahwa jumlah penduduk akan naik dengan lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan kenaikan jumlah bahan makanan. Pendapat Malthus menyatakan bahwa hukum alamiah (*natural law*) akan berpengaruh atau menentukan pertumbuhan penduduk, penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan penambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh adanya wabah penyakit, malapetaka, bencana alam dan perang.

Teori Malthus ini dikembangkan oleh ahli – ahli generasi berikutnya disebut sebagai *Neo Malthusian* antara lain Paul Ehrlich, Garret Hardin dan Meadow. Pada tahun 1971, Paul Ehrlich menulis buku *The Population Bomb* yang kemudian direvisi menjadi *The Population Explosion*, yang intinya adalah (a) Sudah terlalu banyak manusia di bumi, (b) Keadaan bahan makanan sangat terbatas, (c) Lingkungan akan menjadi rusak apabila populasi manusia meningkat.

Teori – teori tersebut diperkuat oleh analisis yang dilakukan Meadow melalui buku *The Limit Growth* yang menarik hubungan antara variable lingkungan yang terdiri atas penduduk, produksi pertanian, produksi industry, sumber daya alam dan polusi. Permasalahan ini apabila tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan adanya *population disaster* (bencana populasi).

B.2. Karl Marx

Teori Marxist yang berangkat dari pemahaman Karl Marx berbeda dengan Malthus yang menganggap bahwa tekanan penduduk akan menyebabkan tekanan pada penyediaan bahan makanan. Karl Marx berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan produksi meningkat sehingga kekurangan bahan pangan akan terpenuhi. Menurut Karl Marx pertumbuhan penduduk menyebabkan masalah pada kesempatan kerja.

Permasalahan ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan miskin bukan disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk, namun karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh, sebenarnya hal ini bisa diselesaikan oleh Negara. Namun institusi tidak punya keberanian untuk mengambil kebijakan dan program yang berkaitan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang akan mendorong peningkatan pendapatan dan pengatasan atas masalah – masalah kependudukan.

Manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam organisasi ekonomi baik yang memproduksi barang maupun jasa. Secara teori semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang siap ditawarkan di pasar kerja. Keterampilan (*skill*) yang tinggi pada sumber daya manusia akan mendukung produktivitas yang terus meningkat. Hal ini akan semakin bertambah apabila SDM bisa berjalan bersanding dengan teknologi dan tidak saling menggantikan.

Pemikiran tersebut di atas mendasari teori Karl Marx yang menyebabkan manusia tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Peningkatan kesejahteraan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk menyediakan bahan makanan akan bisa diatasi dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara. Pada kondisi ini maka penduduk akan menjadi modal dasar dalam pembangunan secara organisasi ekonomi maupun secara nasional.

B.3. Teori/Mazhab Fisiologi

Mazdhab fisiologi mendasarkan pertumbuhan penduduk berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Thomas Jarold salah satu pendukung utama teori ini adalah seorang tabib (ahli kesehatan) menyatakan bahwa reproduksi manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani seseorang. Semakin manusia bekerja keras secara fisik maupun psikisnya maka akan mengurangi kemampuannya untuk bereproduksi. Teori ini menyatakan bahwa tidak perlu terdapat kekhawatiran antara bahan makanan dan jumlah penduduk karena pasti akan berjalan seimbang dengan semakin majunya kondisi suatu masyarakat.

Ahli lain dalam teori ini adalah Michael Thomas Sadler menyatakan bahwa semakin lama kemampuan seseorang bereproduksi berkurang, dan menuju ceteris paribus. Jika jumlah penduduk itu bertambah dan kemampuan menurunkan keturunan itu akan berkurang dan jika jumlah penduduk itu berkurang maka kemampuan menurunkan keturunan akan bertambah, sehingga akan terjadi keseimbangan.

B.4. Teori Transisi Demografi

Tokoh utama teori ini adalah Warren Thompson (1929), teori ini didasari oleh pada fenomena yang terjadi pada abad 20 setelah berahirnya perang dunia pertama yang menunjukkan adanya gejala pertumbuhan penduduk yang semakin melambat. Warren Thompson melakukan observasi dan menemukan adanya teori transmisi demografis yang menunjukkan bahwa terdapat empat tahap pertumbuhan dan berubahnya penduduk yaitu:

1. Angka kematian tinggi sebanding dengan angka kelahiran, menghasilkan angka pertumbuhan nol atau yang sering disebut sebagai *Zero population Growth (ZPG)*

2. Angka kematian menurun tidak disertai dengan penurunan angka kelahiran akan menghasilkan angka pertumbuhan positif dan meningkat
3. Angka kematian terus menerus disertai dengan menurunnya angka kelahiran akan menghasilkan pertumbuhan positif tapi menurun
4. Angka kematian dan angka kelahiran rendah maka hasilnya akan semakin berkurang dan menuju pada nol

C. Struktur Kependudukan

Struktur penduduk adalah penggolongan penduduk menurut ciri tertentu. Struktur penduduk disebut juga komposisi atau susunan penduduk, merupakan pembentuk komposisi penduduk, yang bisa diklasifikasikan menurut: (a) Karakteristik demografi, (b) Karakteristik social, (c) Karakteristik ekonomi dan (d) Karakteristik geografi/ persebaran.

Secara social ekonomi, struktur Kependudukan berguna untuk

1. Mengetahui sumberdaya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin
2. Mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan
3. Membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lain
4. Mengetahui proses demografi yang terjadi (melalui piramida penduduk)

Susunan penduduk dibedakan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Susunan penduduk menurut umur biasanya dikelompokkan dengan jarak masing-masing 4 tahun. Susunan penduduk tersebut biasa dikenal dengan istilah piramida penduduk. Piramida penduduk dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a) Bentuk piramida muda (*Expansive*) yaitu bentuk piramida yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia tua. Bentuk piramida penduduk muda bagian atasnya besar, makin ke puncak makin sempit, sehingga berbentuk limas. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh, jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian (jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari usia dewasa). Karakteristik negara yang disebut dengan penduduk muda adalah apabila jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun mencapai 40 % atau lebih dari jumlah seluruh penduduk.

Ciri penduduk struktur muda:

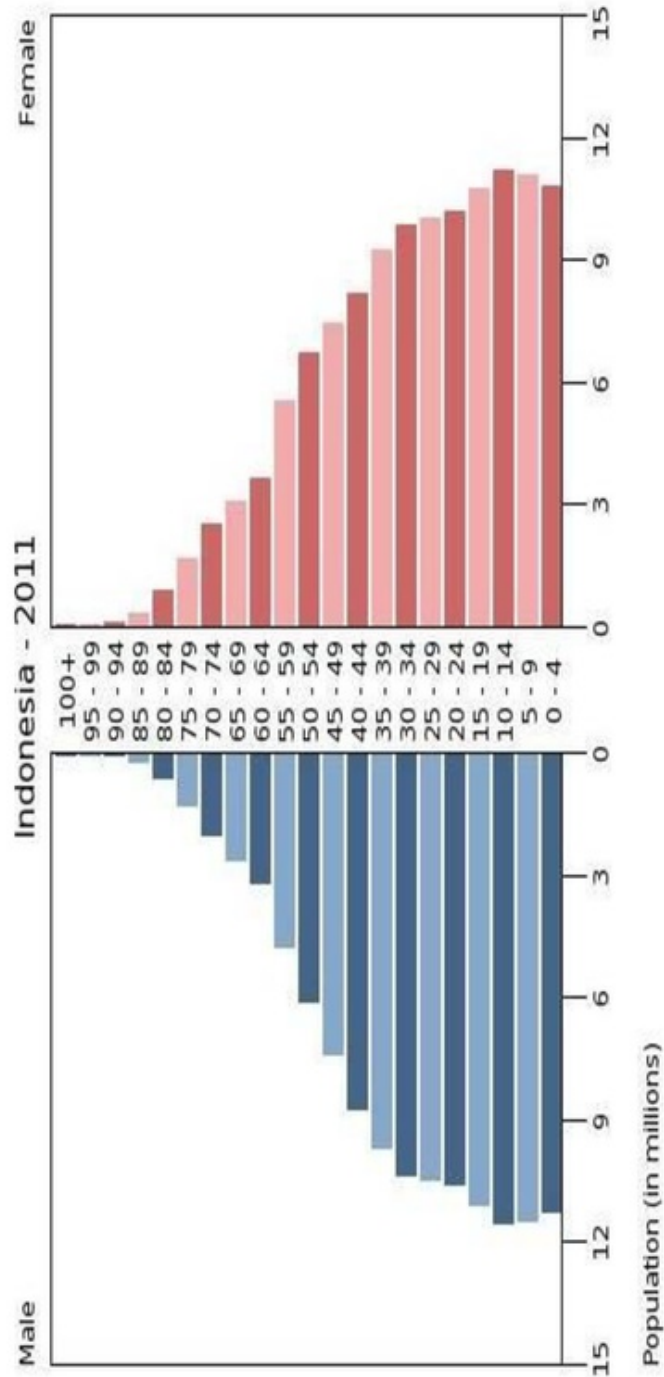
- (i) Sebagian besar penduduk dalam usia muda (di bawah 15 tahun)
- (ii) Kondisi penduduk mengalami pertumbuhan yang cepat
- (iii) Angka pertumbuhan penduduk tinggi
- (iv) Angka kelahiran bayi tinggi sementara angka kematian usia tua semakin rendah karena tingkat kesehatan yang semakin membaik

Bentuk piramida muda ini banyak dimiliki oleh negara – negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena adanya pola pikir tradisional tentang (a) pemikiran usia perkawinan yang mendorong masyarakat untuk kawin muda (b) adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan (c) Kurang berhasilnya sosialisasi keluarga berencana.

Konsekwensi struktur penduduk dengan piramida muda ini adalah adanya angka ketergantungan yang relatif tinggi karena jumlah penduduk usia produktif yang rendah sementara jumlah penduduk usia muda tinggi, artinya jumlah anggota keluarga non produktif yang harus ditanggung oleh anggota keluarga yang produktif lebih besar

Bentuk piramida muda sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1. Bentuk Piramida Muda



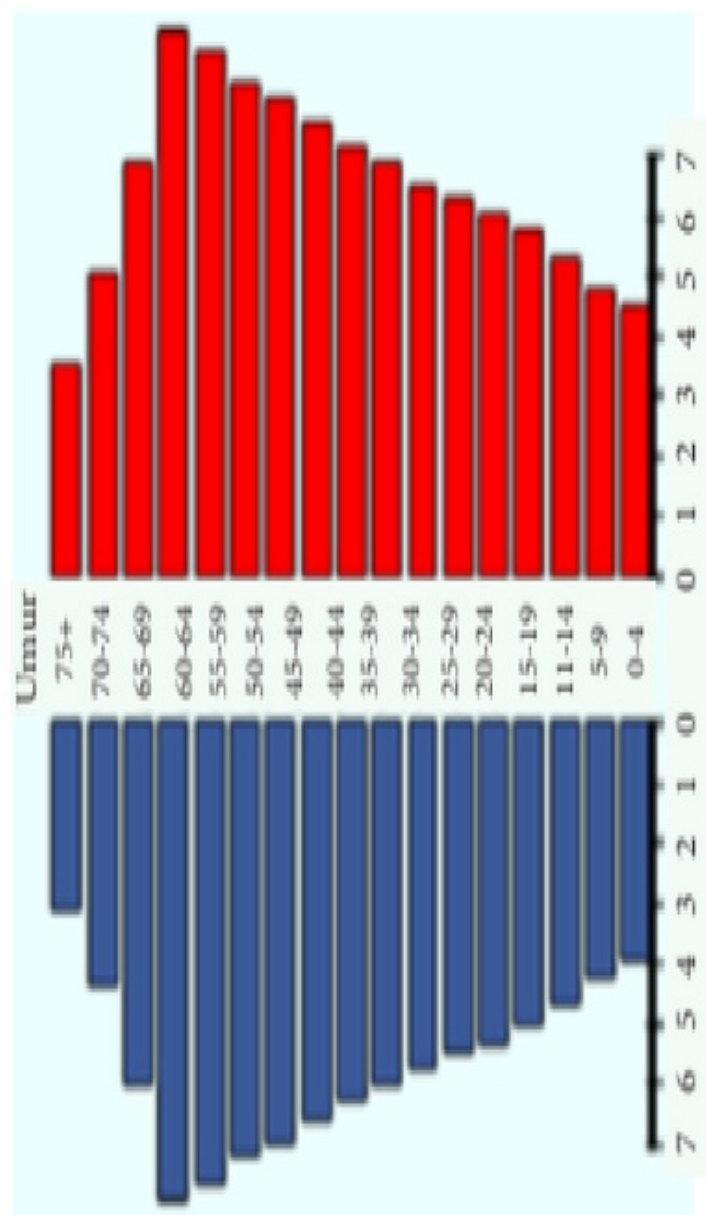
- b) Bentuk piramida tua (***constrictive***) yaitu bentuk piramida yang menunjukkan kondisi masyarakat berusia tua lebih banyak dibandingkan dengan yang berusia muda. Bentuk piramida ini di bagian bawah kecil dan di bagian atas besar, sehingga berbentuk seperti batu nisan. Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih pesat dari angka kematian, sehingga jumlah penduduk usia muda lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Jumlah penduduk mengalami penurunan.

Ciri – ciri penduduk struktur penduduk usia tua adalah

- (i) Sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia dewasa atau tua dan jumlah penduduk usia muda sangat sedikit, kurang dari 30% sementara jumlah penduduk usia tua di atas 10%
- (ii) Tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian
- (iii) Pertumbuhan penduduk terus berkurang.

Bentuk piramida tua ini banyak dimiliki oleh negara – negara yang sudah maju, di mana kaum perempuannya banyak yang tidak mau bereproduksi karena alasan karier. Selain itu tingkat kemajuan bidang kesehatan juga menjadi salah penyebab struktur penduduk tua. Diseluruh dunia penduduk Lansia (usia 60 +) tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya. Diperkirakan mulai tahun 2010 akan terjadi ledakan jumlah penduduk lanjut usia. Hasil prediksi menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia akan mencapai 9,77 persen dari total penduduk pada tahun 2010 dan menjadi 11,34 persen pada tahun 2020. Bentuk Piramida Tua sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2. Bentuk Piramida Tua

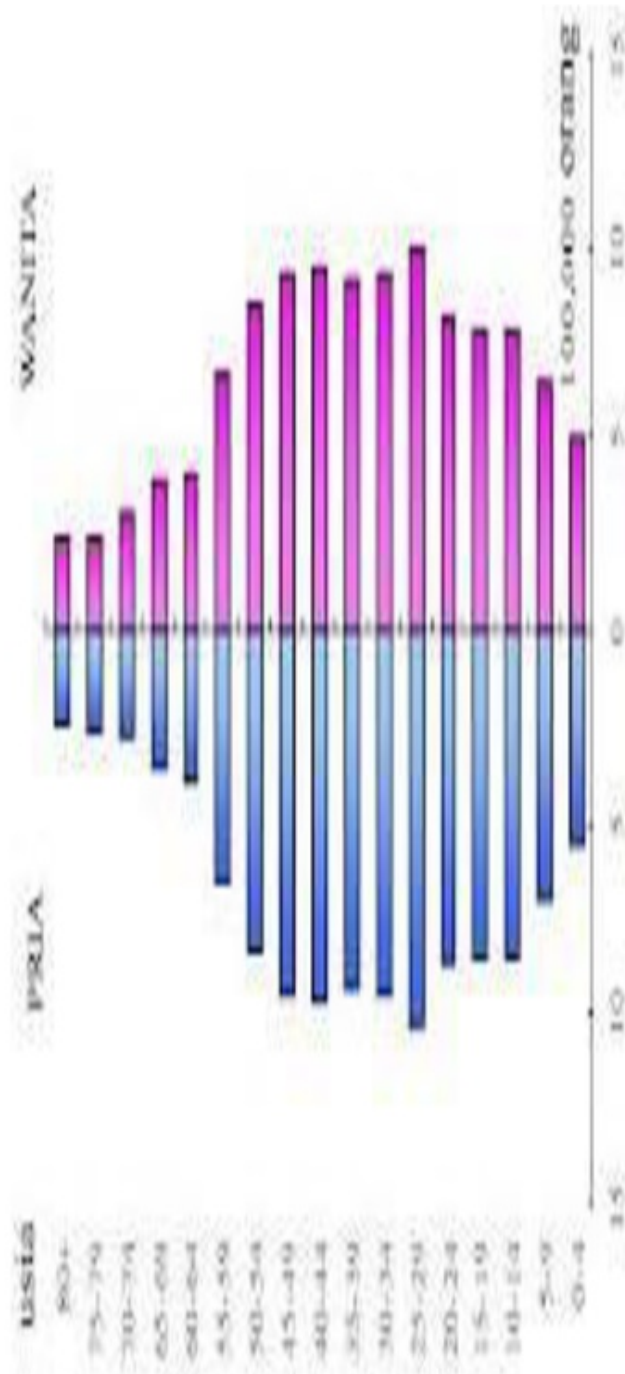


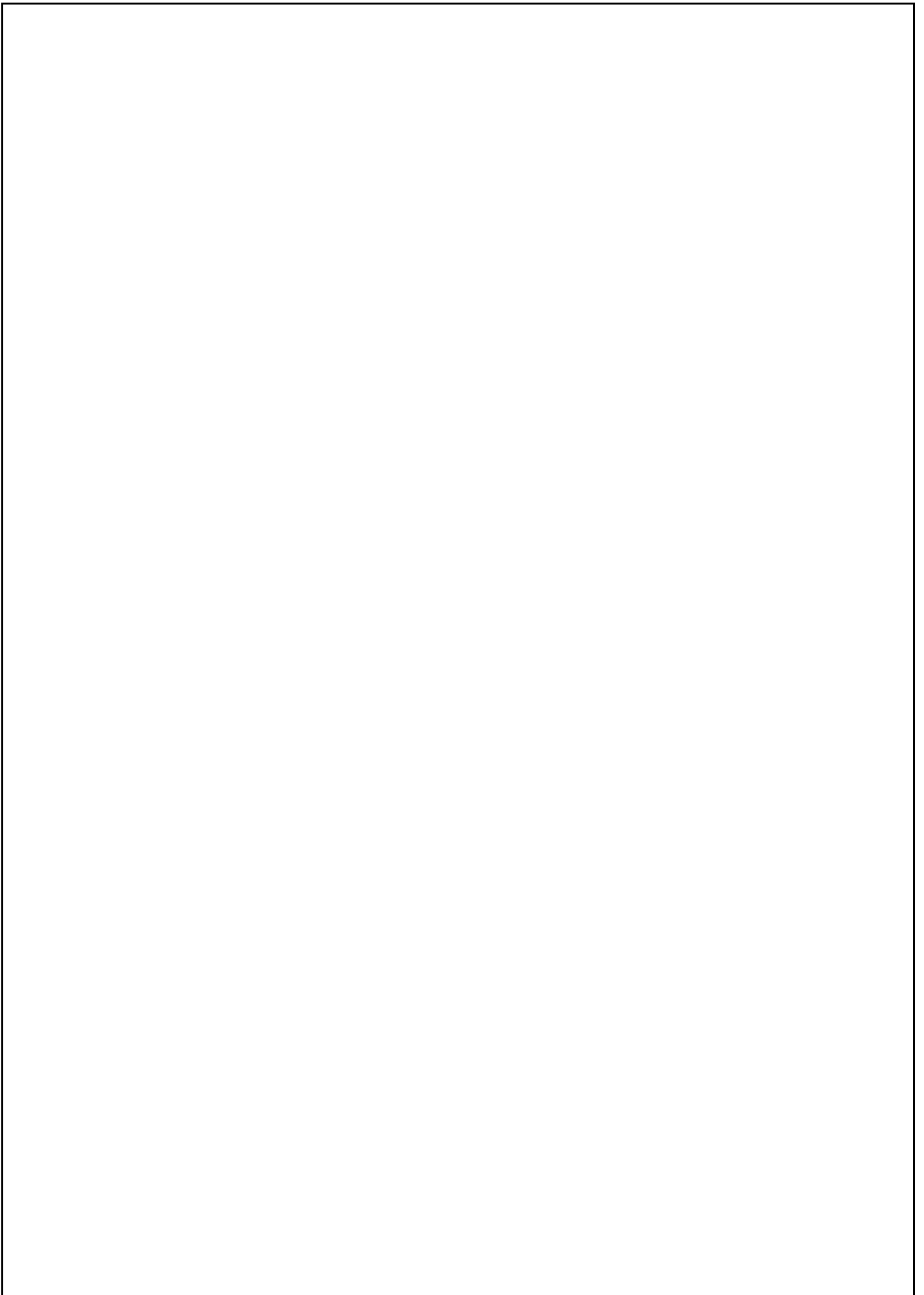
c) Bentuk piramida tetap (*stationary*) Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal ini menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa. Kondisi ini yang diharapkan oleh hampir semua negara di dunia, di mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai atau mendekati 0% atau sering disebut sebagai *Zero Population Growth (ZPG)*. Ciri – ciri struktur penduduk usia tetap ini adalah:

- (i) Jumlah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama,
- (ii) Tingkat kelahiran rendah,
- (iii) Tingkat kematian rendah,
- (iv) Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat

Program Keluarga Berencana (KB) mencanangkan pada tahun 2020 bangsa Indonesia sudah mencapai ZPG, namun dengan kondisi Indonesia saat ini, ZPG menjadi sulit tercapai. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa angka fertilitas total (TFR) Indonesia 2,6 dan mengalami stagnasi selama 10 tahun. Target menurunkan TFR pada tahun 2015 menjadi 2,1 tidak tercapai. Berdasarkan ketidak tercapaian hasil tersebut, maka BKKBN melakukan penyesuaian TFR secara bertahap sebagai berikut yakni 2,3 pada tahun 2015; 2,2 pada tahun 2020; dan 2,1 pada tahun 2025. Jika target tercapai, penduduk Indonesia diproyeksikan menjadi 281,5 juta pada tahun 2025 dan 330 juta jiwa pada tahun 2050. Jika target tidak tercapai, maka akan terjadi peledakan penduduk Indonesia yang pada gilirannya akan menjadi beban bagi anggaran Negara khususnya dalam penyediaan kebutuhan dasar seperti penyediaan pangan, layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan kesempatan kerja. Struktur piramida tetap atau *stationary* bisa ditunjukkan pada gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3. Bentuk Piramida stasioner





BAB II

KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

A. Kondisi Kependudukan secara Nasional

Negara Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada periode awal setelah tumbanganya orde lama, yaitu pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1990an. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya keamanan negara, tumbuhnya kesempatan bagi penduduk untuk bekerja dan berusaha serta bertambahnya sarana kesehatan. Kondisi kependudukan semacam ini memang umum terjadi pada negara – Negara yang sedang berkembang. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 1971 sampai 2010 adalah sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Indonesia tahun 1971 - 2010

Tahun	Jumlah Penduduk
1971	119.208.229
1980	147.490.298
1990	179.378.946
1995	194.754.808
2000	206.264.595
2010	237.641.326

Sumber: BPS, 2013

Data angka pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1967 sampai 1990 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1967 – 1990

Tahun	Pertumbuhan penduduk
1967 - 1970	5,6 %
1971 – 1975	5,2 %
1976 – 1979	4,7 %
1980 – 1984	4,1 %
1987 – 1990	3,2 %
1990 – 2000	1,49%
2000 – 2012	1,49 %

Sumber: BPS diolah

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia mencanangkan program keluarga berencana (KB). Tujuan Keluarga Berencana adalah sebagai upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk terbukti Program KB yang kemudian berubah menjadi gerakan KB adalah salah satu kebijakan pemerintah orde baru yang sangat berhasil dan mampu menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan angka kelahiran.

Angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada akhir tahun 1970an, kemudian menurun seiring dengan mulai digerakkannya program Keluarga Berencana, berdasarkan Undang – Undang No 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana yang menyatakan bahwa KB adalah upaya untuk peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB tersebut terbukti berhasil dengan semakin menurunnya angka pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara langsung peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut akan mampu mengembangkan perekonomian secara nasional dan kemampuan bersaing di pasar global.

Seiring dengan masa reformasi, perubahan beberapa kebijakan menyebabkan Keluarga Berencana bukan lagi menjadi salah satu prioritas pembangunan, kampanye KB semakin menurun, dukungan dana terhadap program KB semakin sedikit. Faktor lain yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli alat kontrasepsi. Di sisi lain kehidupan masyarakat yang mulai permisif dan terjadinya degradasi moral di kalangan anak muda menyebabkan naiknya usia pernikahan dini. Kondisi ini menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa angka pertumbuhan penduduk akan kembali meningkat.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, rata – rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia kembali naik menjadi 1,49%. Angka pertumbuhan penduduk terendah dicapai oleh Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan mencapai 0,37%, disusul oleh Propinsi Jawa Timur sebesar 0,76%, sementara angka pertumbuhan tertinggi terjadi di Propinsi Papua yang mencapai 5,39% disusul Propinsi Kalimantan Timur sebanyak 3,81%. Kondisi Papua ini sangat memprihatinkan karena beberapa indikator kualitas penduduk yang lain relative rendah antara lain IPM yang hanya mencapai 65,36 sementara angka rata – rata nasional sudah mencapai 72,77.

B. Kondisi Kependudukan Per Propinsi

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut propinsi dari waktu ke waktu terlihat adanya perbedaan variasi. Secara rata – rata terjadi penurunan yang signifikan pada periode tahun 1990 – 2000 yang menunjukkan keberhasilan program KB satu decade sebelumnya.

Tapi pada periode tahun 2000 – 2010 di beberapa provinsi kembali terjadi peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara rinci data pertumbuhan penduduk per provinsi akan ditunjukkan dalam table 2.3. berikut ini

Tabel 2.3 Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut Propinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			
	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Nanggroe Aceh Darussalam	2.93	2.72	1.46	2.36
Sumatera Utara	2.60	2.06	1.32	1.10
Sumatera Barat	2.21	1.62	0.63	1.34
Riau	3.11	4.30	4.35	3.58
Jambi	4.07	3.40	1.84	2.56
Sumatera Selatan	3.32	3.15	2.39	1.85
Bengkulu	4.39	4.38	2.97	1.67
Lampung	5.77	2.67	1.17	1.24
Bangka Belitung	-	-	0.97	3.14
Kepulauan Riau	-	-	-	4.95
DKI Jakarta	3.93	2.42	0.17	1.41
Jawa Barat	2.66	2.57	2.03	1.90
Jawa Tengah	1.64	1.18	0.94	0.37
DI Yogyakarta	1.10	0.57	0.72	1.04
Jawa Timur	1.49	1.08	0.70	0.76
Banten	-	-	3.21	2.78
Bali	1.69	1.18	1.31	2.15
Nusa Tenggara Barat	2.36	2.15	1.82	1.17
Nusa Tenggara Timur	1.95	1.79	1.64	2.07
Kalimantan Barat	2.31	2.65	2.29	0.91
Kalimantan Tengah	3.43	3.88	2.99	1.79

Kalimantan Selatan	2.16	2.32	1.45	1.99
Kalimantan Timur	5.73	4.42	2.81	3.81
Sulawesi Utara	2.31	1.60	1.33	1.28
Sulawesi Tengah	3.86	2.87	2.57	1.95
Sulawesi Selatan	1.74	1.42	1.49	1.17
Sulawesi Tenggara	3.09	3.66	3.15	2.08
Gorontalo	-	-	1.59	2.26
Sulawesi Barat	-	-	-	2.68
Maluku	2.88	2.79	0.08	2.80
Maluku Utara	-	-	0.48	2.47
Papua Barat	-	-	-	3.71
Papua	2.67	3.46	3.22	5.39
INDONESIA	2.31	1.98	1.49	1.49

Catatan : Tidak Termasuk Timor Timur

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

Tabel 2.3. di atas menunjukkan di propinsi – propinsi mengalami peningkatan laju pertumbuhan meskipun di beberapa propinsi yang lain terjadi penurunan laju pertumbuhan, sehingga pada periode 2000 – 2010 laju pertumbuhannya relative sama yaitu sebesar 1,49%.

Data kependudukan tersebut menyebabkan target utama pada saat penancangan Keluarga Berencana (KB) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai ZPG (*Zero Population Growth*) tahun 2020 menjadi sulit untuk dicapai. ZPG adalah keadaan di mana penduduk tidak mengalami perubahan jumlah dari waktu ke waktu. Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk diperkirakan masih pada kisaran 0,99%.

Menyikapi kondisi kependudukan sekarang ini, maka disahkanlah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar untuk

melakukan revitalisasi kebijakan kependudukan di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, UU tersebut memberikan kesempatan yang besar untuk mengelola kebijakan kependudukan secara memadai dengan mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UU No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan terbentuknya BKKBD (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah) di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun sampai dengan akhir tahun 2012 belum ada tanggapan yang serius dari masing – masing daerah untuk mewujudkan amanah UU tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara nasional masalah kependudukan di Indonesia dari aspek pengendalian kuantitas cenderung mengalami stagnasi. Kinerja kependudukan baik level pemerintah pusat maupun daerah hanya berjalan di tempat. Di sisi lain kesenjangan laju pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan dua masalah utama yaitu kesenjangan dalam kualitas penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata juga. Di masa yang akan datang ketidak merataan persebaran penduduk ini akan berimbas pada tidak meratanya aktivitas pembangunan dan pemerataan hasil – hasilnya bagi seluruh penduduk di Indonesia.

Dampak lain dengan adanya laju pertumbuhan penduduk ini menyebabkan struktur penduduk Indonesia cenderung mengalami perubahan dan berbeda untuk tiap propinsi. Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali merupakan propinsi dengan struktur menua karena keberhasilan laju penurunan penduduk, sementara propinsi yang lain masih pada struktur penduduk yang muda.

Secara nasional piramida Penduduk Indonesia tahun 2000 dibandingkan tahun 2010 menunjukkan sedikit perubahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Piramida kependudukan Indonesia 2000 - 2010



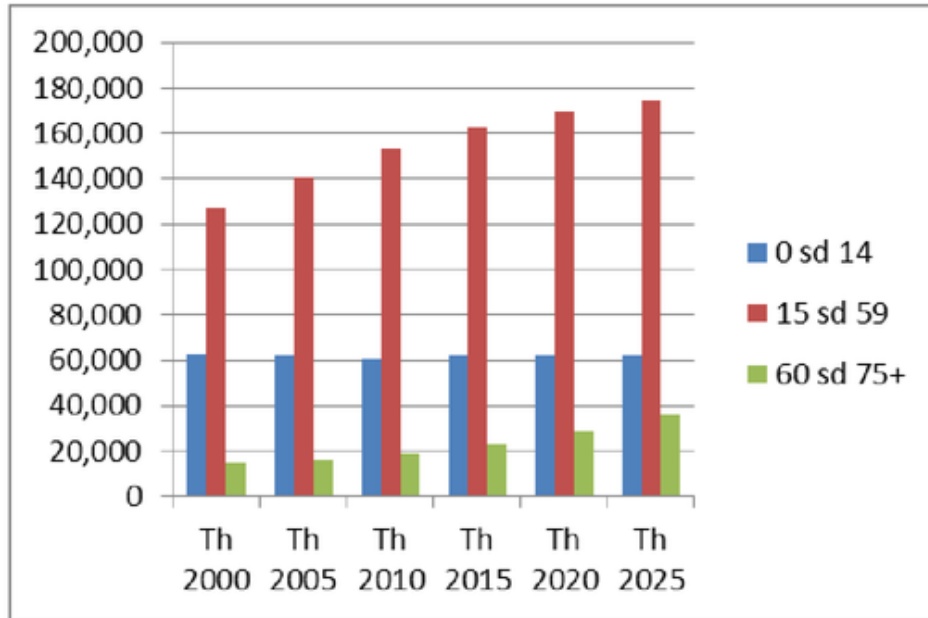
Sumber: BPS 2010

Piramida kependudukan pada gambar 2.1. tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada penduduk usia muda dan meningkatnya penduduk usia tua, meski belum begitu terlihat perubahan yang significant.

BPS dalam rangka memperkirakan bonus kependudukan melakukan proyeksi atas penduduk usia produktif untuk periode 2015 – 2025 dengan menggunakan dasar tahun 2000 – 2010 dan memperoleh hasil seperti gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Proyeksi penduduk Indonesia menurut kelompok umur produktif tahun 2000 -2025 dengan selisih 5 tahunan (dalam juta jiwa).



Sumber: Proyeksi Kependudukan BPS 2000

Gambar 2.2. tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15 – 60 tahun) yang signifikan. Penduduk usia produktif juga meningkat dan akan semakin tinggi pada tahun 2020 – 2030, apabila diasumsikan bahwa laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan seminimal mungkin.

BAB III

KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA

A. Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

A.1. Definisi

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas, namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Indikator *manpower* ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya.

Definisi – definisi dalam ketenagakerjaan berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik. Definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Tenaga kerja (*manpower*)** adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
2. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)** adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu

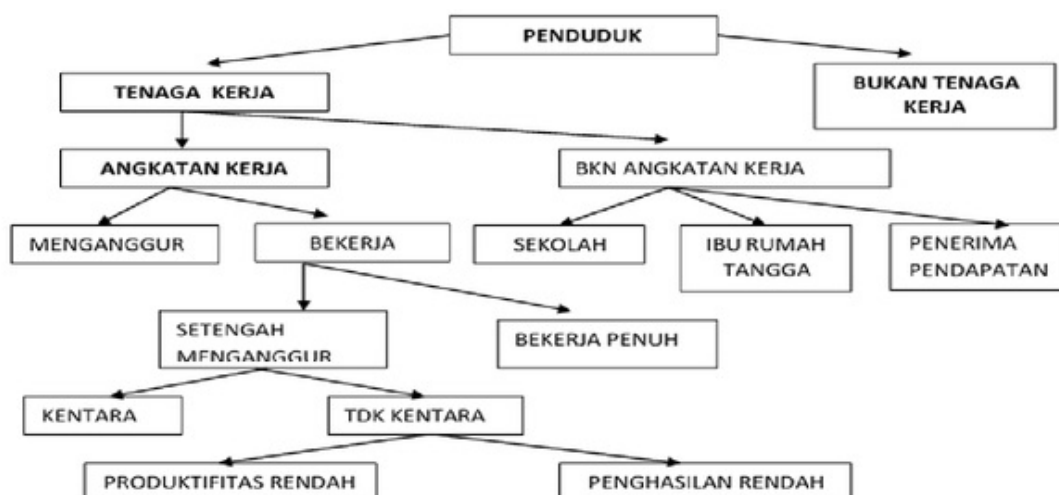
panenan atau cuti. Di samping itu, tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan

3. **Bukan Angkatan Kerja**, adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya yaitu lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental dan lainnya.
4. **Bekerja atau mempunyai pekerjaan** adalah tenaga kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.
5. **Sementara tidak bekerja**, yaitu penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam yaitu:
 - a. Pekerja tetap atau pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatan sementara dan sebagainya
 - b. Petani – petani yang mengusahakan tanah pertanian, menunggu panen, menunggu hujan dan sebagainya.
6. **Pengangguran Terbuka** merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja yang terdiri atas
 - a. Angkatan Kerja yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja),
 - b. Angkatan Kerja yang sedang mempersiapkan suatu usaha,
 - c. Angkatan Kerja yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan
 - d. Angkatan Kerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

7. **Setengah menganggur** adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok:
 - a. **Setengah Penganggur Terpaksa**, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
 - b. **Setengah Penganggur Sukarela**, yaitu tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.
8. **Upah** adalah imbalan/balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada
 - a) Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
 - b) Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja, UMK
 - c) Produktivitas marginal tenaga kerja.
 - d) Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha dan
 - e) Perbedaan jenis pekerjaan.
9. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100.
10. **Produk Domestik Regional Bruto** merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja** merupakan nilai tambah dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut.
12. **Koefisien tenaga kerja** adalah jumlah kesempatan kerja dibagi dengan keluaran (output)
13. **Elastisitas kesempatan kerja** merupakan rasio antara kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

Secara grafis, skema ketenagakerjaan di Indonesia bisa ditunjukkan pada gambar 3.1. berikut ini:

Gambar 3.1. Skema Ketenagakerjaan di Indonesia



B. Teori-teori Ketenagakerjaan

B.2.1. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

B. 2.2. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat

dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunnya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh malthus adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

B.2.3. Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal labor (*marginal value of productivity of labor*) yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan labor akan turun. Jika penurunan harga tidak begitu besar maka kurva nilai produktivitas hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis, ini menyebabkan kurva nilai produktivitas marjinal labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin luas.

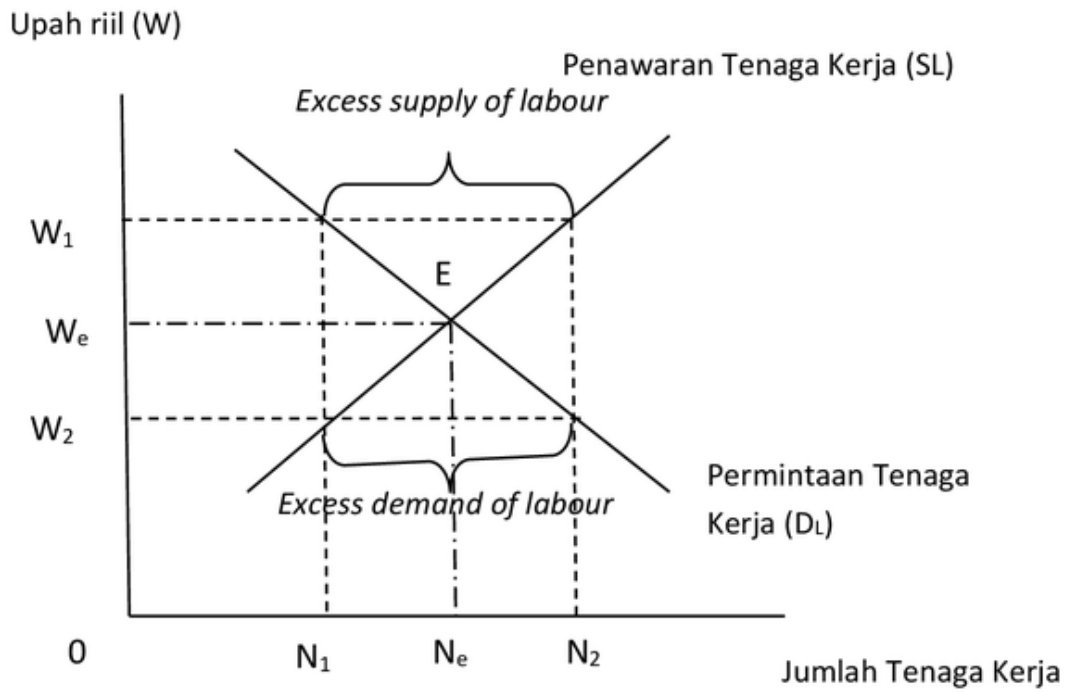
B.2.4. Teori Harrod-domar

Teori Harrod-domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

C. Permintaan Tenaga Kerja

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja seperti yang sudah dibukakan dalam Latar belakang dari pemelihan judul ini adalah ketidak seimbangan akan permintaan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut penawaran yang lebih besar dari permintaan terhadap tenaga kerja (*excess supply of labor*) atau lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (*excess demand for labor*) dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 3.2: Kurva Penawaran Tenaga Kerja



C.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja

a. Tingkat Upah

Yang mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan adalah tingkat upah para tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan mengakibatkan kenaikan biaya produksi, sehingga akan meningkatkan harga per unit produk yang dihasilkan. Apabila harga per unit produk yang dijual ke konsumen naik, reaksi yang biasanya timbul adalah mengurangi pembelian atau bahkan tidak lagi membeli produk tersebut. Sehingga akan muncul perubahan skala produksi yang disebut efek skala produksi (*scale effect*) dimana sebuah kondisi yang memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang selanjutnya juga dapat mengurangi tenaga kerja perusahaan. Suatu kenaikan upah dengan asumsi harga barang-barang modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyai kecenderungan untuk menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurunan jumlah tenaga kerja akibat adanya penggantian dengan mesin disebut efek substitusi (*substitution effect*).

b. Teknologi

Penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mempengaruhi berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi saja belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja. Karena dapat terjadi kecanggihan teknologi akan menyebabkan hasil produksi yang lebih baik, namun kemampuannya dalam menghasilkan produk dalam kuantitas yang sama atau relatif sama. Yang lebih berpengaruh dalam menentukan permintaan tenaga kerja adalah kemampuan mesin untuk menghasilkan produk dalam kuantitas yang jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia. Misalnya, mesin pengemasan produk makanan yang dulunya berbasis tenaga kerja manusia dan beralih ke mesin-mesin dan robot akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja manusia lebih rendah untuk memproduksi makanan tersebut.

c. Produktivitas tenaga kerja

Berapa jumlah tenaga kerja yang diminta dapat ditentukan oleh berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Apabila untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dibutuhkan 50 karyawan dengan produktivitas standar yang bekerja selama 9 bulan. Namun dengan karyawan yang produktivitasnya melebihi standar, proyek tersebut dapat diselesaikan oleh 25 karyawan dengan waktu 9 bulan. Kita mengetahui bahwa kekuatan permintaan tenaga kerja dalam pekerjaan tertentu sebagian bergantung pada produktivitas (MP). Perusahaan mengontrol kebanyakan faktor-faktor yang menentukan produktivitas pekerja. Tetapi dua cara serikat buruh dapat mempengaruhi output per jam pekerja adalah berpartisipasi dalam komite manajemen produktivitas tenaga kerja gabungan—yang seringkali disebut “lingkaran kualitas”—dan “*codetermination*”, yang terdiri dari partisipasi langsung para pekerja dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang sebelumnya juga disebut “demokrasi buruh”. Tujuan kedua pendekatan tersebut adalah memperbaiki komunikasi internal dalam perusahaan dan meningkatkan produktivitas melalui penekanan lebih melalui kerjasama dan insentif profit.

Dalam banyak kasus, serikat buruh telah menolak partisipasi dalam lingkaran kualitas dan *codetermination*, memperdabatkan bahwa program-program ini memperlancar proses tawar menawar dan memperkecil otoritas serikat. Dalam contoh lainnya, serikat setuju untuk berpartisipasi dalam basis eksperimental. Sampai pada saat pendekatan mereka meningkatkan marginal product tenaga kerja, permintaan tenaga kerja akan meningkat, sehingga meningkatkan prospek serikat untuk menegosiasi peningkatan upah.

d. Kualitas Tenaga Kerja

Pembahasan mengenai kualitas ini berhubungan erat dengan pembahasan mengenai produktivitas. Karena dengan tenaga kerja yang berkualitas akan menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitas

tenaga kerja ini tercermin dari tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan tenaga kerja dalam bekerja.

e. Fasilitas Modal

Dalam prakteknya faktor-faktor produksi, baik sumber daya manusia maupun yang bukan sumber daya alam dan lainlain, seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. Misalnya, dalam suatu industri air minum, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan, maka apabila perusahaan menambah modalnya, maka jumlah tenaga kerja yang diminta juga bertambah.

D. Penawaran Tenaga Kerja

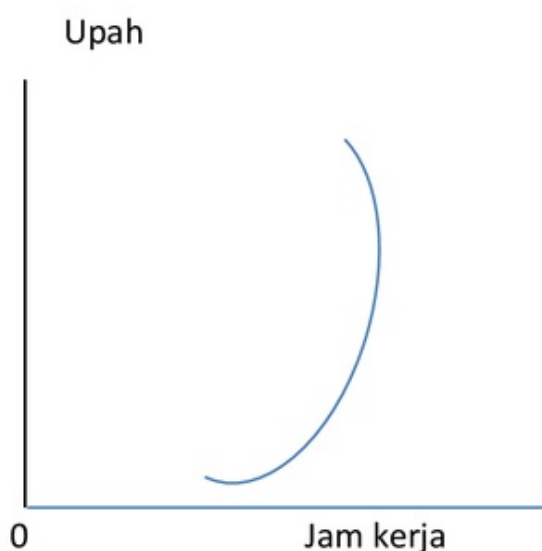
Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya.

Menurut G.S Becker (1976), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu peryediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah. Mula – mula slope akan bersifat positif namun kemudian penawaran upah melebihi upah reservasi maka pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja. Hal ini disebut *Backward Bending Supply Curve*, yaitu kondisi di mana tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik sehingga upah yang ditawarkan semakin berkurang. Sebagaimana gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3.

Kurva Penawaran tenaga kerja



Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta. Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (*variable proportions*) umumnya

digunakan kurva isokuan (*isoquantities*) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi factor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggambarkan laju substitusi teknis marginal atau *Marginal Rate of Technical Substitution* atau dikenal dengan istilah MRTS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan kapital yang merupakan lereng dari kurva isoquant.

E. Elastisitas Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja (*demand of Labor*) pada dasarnya adalah tergantung pada output perusahaan/industri dalam konteks mikro, artinya semakin banyak output yang dihasilkan pada akhirnya akan menciptakan permintaan input diantaranya adalah tenaga kerja (*labor*) sering dikenal dengan *derived demand*. Sedangkan dalam tataran makro, produksi nasional (GDP, PDB) sangat menentukan laju tambah kesempatan kerja pada suatu perekonomian, artinya kalau ekonomi suatu negara tumbuh (tercermin pada pertumbuhan PDB) maka akan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dalam hal ini penting untuk dianalisis seberapa besar kepekaan perubahan output tersebut terhadap laju tumbuh kesempatan kerja, biasanya dipakai rumus Elastisitas Kesempatan Kerja (Ekk) yang merupakan rasio pertumbuhan output dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Ekk bisa dihitung secara sektoral berdasarkan lapangan pekerjaan/usaha dalam perekonomian. Di Indonesia misalnya ada 9 sektor/lapangan usaha dari pertanian hingga jasa, atau juga bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar seperti pertanian, industri dan jasa (sering digunakan istilah AMS : *Agliculture, Manufactory and Service*), penjumlahan/gabungan semuanya akan menjadi Ekk total. Ekk dapat pula dipergunakan sebagai data awal untuk proyeksi ketenagakerjaan melalui beberapa skenario dalam membuat perencanaan untuk kebijakan baik makro maupun mikro

Langkah – langkah yang digunakan untuk menghitung elastisitas kesempatan kerja adalah:

1. Menghitung laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per sektor dan total sektor kegiatan ekonomi
2. Menghitung laju kesempatan kerja per sektor kegiatan ekonomi
3. Menghitung koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (Ekk) per sektor kegiatan ekonomi yang dihitung dengan formula

$$Ekk = \frac{rkk}{rPDB}$$

F. Angkatan Kerja dan Pengangguran

F.1 Angkatan Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas, namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Indikator *manpower* ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Disamping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Untuk itu kemudian digunakan indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara

tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sementara itu penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah tenaga kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah, dengan angkatan kerja Indonesia pada tahun 2012 adalah sebanyak 116 juta jiwa. Dari angka sebanyak itu, yang bekerja sebanyak 107,41 juta jiwa dan sisanya sebanyak 8,59 juta menganggur penuh sementara 35,42 juta jiwa pada posisi setengah pengangguran. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena pada saat yang sama kesempatan kerja yang ada sangat terbatas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Ali Syahbana menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mampu menciptakan kesempatan kerja baru sebanyak 400 ribu. Artinya dengan pengangguran sebanyak 8,59 juta angkatan kerja, maka apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4 % sampai dengan 5 % pertahun dibutuhkan waktu sekitar 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk menyerap keseluruhan angkata kerja tersebut, itupun dengan asumsi bahwa jumlah pengangguran tidak selalu bertambah setiap tahun. Melihat kondisi dalam negeri yang seperti itu, maka memang berkerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif utama bagi Tenaga Kerja Indonesia yang gagal bersaing masuk di dunia kerja dalam negeri. (*Detik.com, 18 Agustus 2010*).

F.2. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan yang paling berat. Lucas *dalam* Romer (1996) menyatakan bahwa pengangguran disebabkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Pekerja membuat kesalahan mengenai upah riil dan melepas pekerjaannya atau menolak pekerjaan yang ditawarkan karena upah yang terlalu rendah. Pengusaha juga membuat kesalahan tentang permintaan dan kadang-kadang memproduksi dalam jumlah yang terlalu kecil dan sedikit mempekerjakan pekerja. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang rasional, yang melihat ke depan dalam membuat pengharapan, kesalahan akan diperbaiki dengan segera dan pengangguran akan hilang.

Setengah Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok:

- Setengah penganggur terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
- Setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dalam perekonomian dibandingkan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya, pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. Meskipun demikian, terbuka kemungkinan bagi tingkat permintaan keseluruhannya mencapai taraf cukup tinggi untuk memberikan kesempatan kerja bagi seluruh angkatan kerja, tetapi bagi

sejumlah besar pekerja berada dalam keadaan menganggur. Para pekerja ini dapat digolongkan sebagai penganggur yang bersifat friksional maupun struktural.

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaklancaran dalam proses bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penyebab dari ketidaklancaran ini adalah karena tempat dan waktu. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan dominasi peranan ekonomi setiap sektor dalam kegiatan produksi maupun dalam pemberian kesempatan kerja. Banyak aspek pekerjaan yang mempunyai tuntutan atau persyaratan yang belum tentu dapat dipenuhi oleh penawaran tenaga kerja dari sektor atau subsektor lain. Pengangguran dapat juga disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Permintaan total masyarakat merupakan dasar untuk diadakannya kegiatan investasi. Pengeluaran investasi memberikan peluang untuk tumbuhnya kesempatan kerja. Bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka akan menimbulkan kelesuan pada permintaan tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kurangnya permintaan agregat disini merupakan kondisi dalam jangka panjang. Profil yang perlu diketahui adalah tempat terjadinya pengangguran menurut sektor ekonomi, baik disektor pertanian maupun manufaktur, distribusi menurut pendidikan, jenis jabatan dan pekerjaan yang diminati, umur, dan jenis kelamin (Arfida, 2003).

Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak pernah surut. Para penganggur akan menjadi kelompok yang terpinggirkan, dan apabila tidak memperoleh penanganan yang serius akan berpotensi sebagai pengganggu stabilitas negara. Menurut Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdapat beberapa faktor penyebab masalah pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi konglomerasi yang dijadikan sebagai *engine of growth* oleh Indonesia selama rezim orde baru sangat bertumpu dan mengandalkan aspek pertumbuhan. Pada saat itu perusahaan

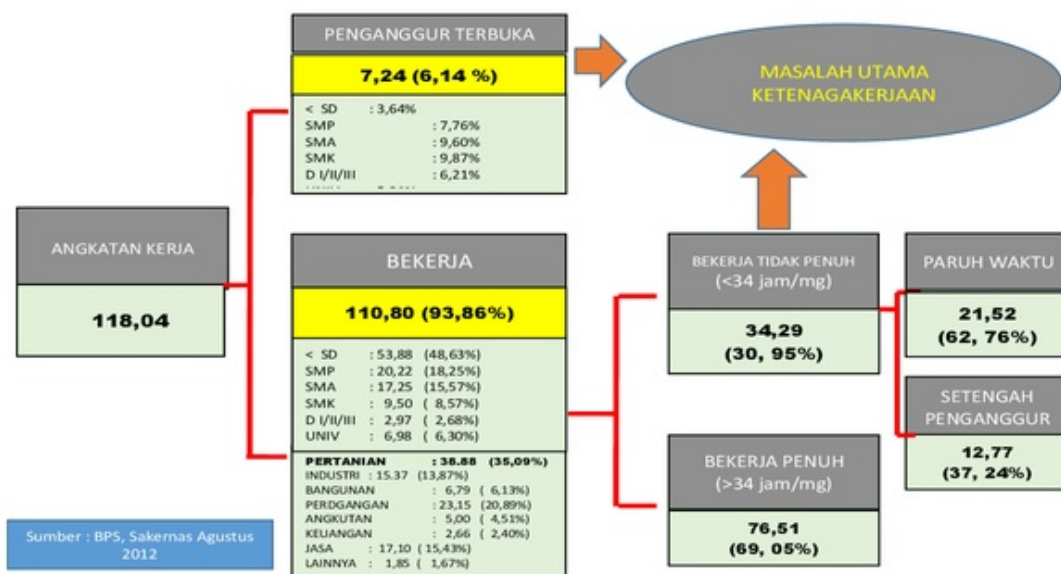
perusahaan besar tumbuh dengan pesat dan memperoleh *privilege* (hak istimewa) dari pemerintah. Akibatnya faktor kesempatan kerja penuh terabaikan, sehingga pengangguran semakin meningkat.

2. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia. Rendahnya perhatian pemerintah pada bidang pendidikan terlihat dari persentase pengeluaran pemerintah pada bidang tersebut. Pada sisi lain, pendidikan non formal atau pelatihan sebagai cara untuk mempersiapkan tenaga kerja siap pakai juga belum berjalan sesuai keinginan. Lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola Kementrian melalui Balai Latihan Kerja di masing – masing daerah belum mampu mengimbangi syarat-syarat edukasi yang diminta pihak pengusaha.
3. Daya saing industri. Asumsinya, bila industri memiliki daya saing yang kuat, maka industri akan maju, dan kesempatan kerja akan tercipta, dan pengangguran akan tertekan serendah mungkin. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, daya saing industri di Indonesia masih tergolong rendah, hanya beberapa golongan industri yang memiliki daya saing tinggi, seperti industri makanan, pengolahan tembakau, industri kayu, industri perabot dan kelengkapan rumah tangga, pulp dan kertas dan industri elektronik. Sementara industri tekstil dan pakaian jadi memiliki daya saing sedang, sedangkan industri kulit dan alas kaki memiliki daya saing rendah.
4. Globalisasi. Pada aspek ketenagakerjaan, aspek turunan dari globalisasi adalah persaingan bebas yang terjadi di dalam dan luar negeri. Pergerakan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain semakin bebas, sehingga menjadi suatu tekanan bagi tenaga kerja yang tidak dapat bersaing. Pada sisi lain, bagi Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.

G. Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja namun dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, jumlah penduduk yang tinggi mendorong tingginya angkatan kerja, Secara detail kondisi ketenagakerjaan Indonesia bisa ditunjukkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:

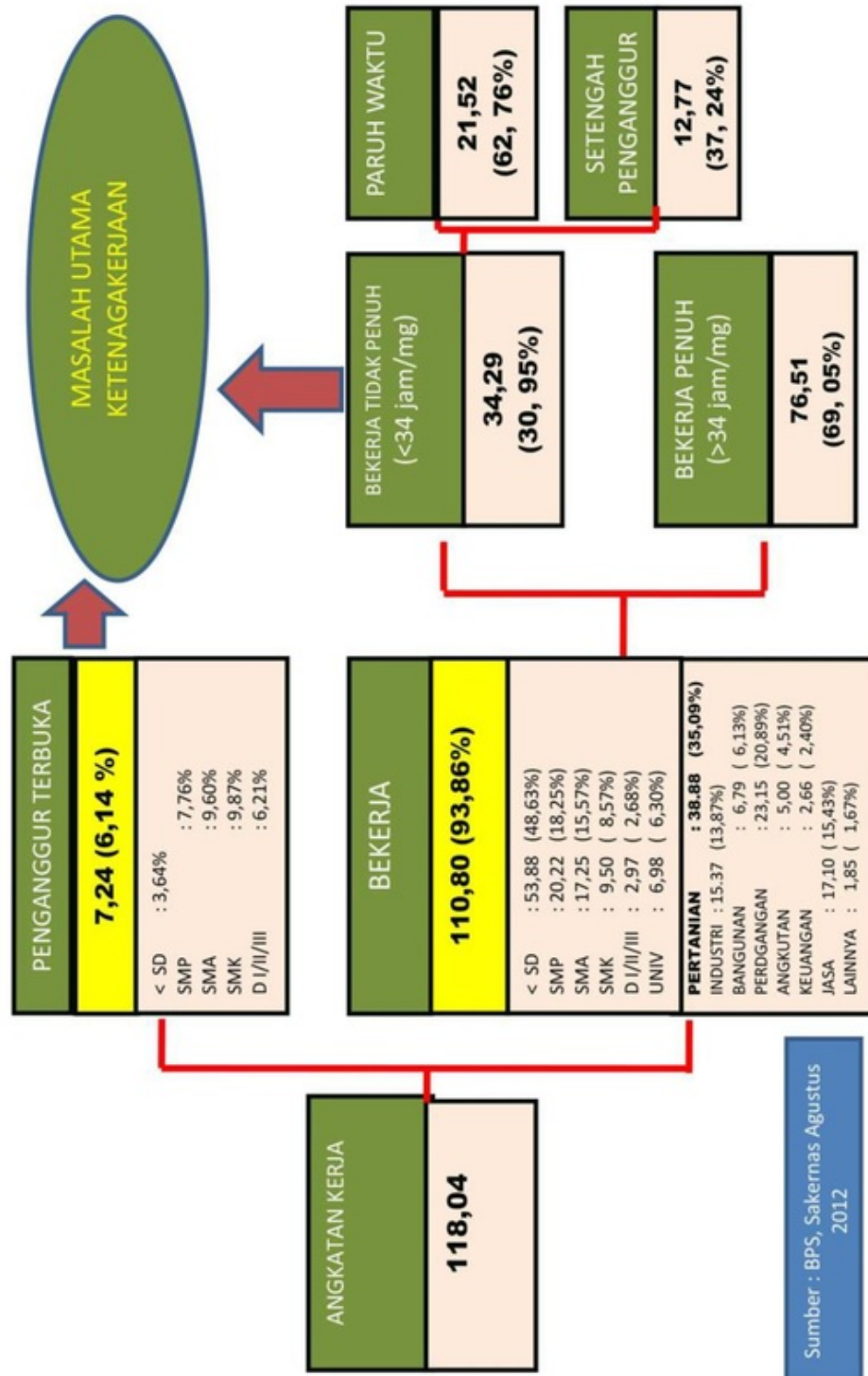
Gambar 3.4. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia



1. Indonesia dengan kondisi berlebihan tenaga kerja dan negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri, globalisasi merupakan kesempatan untuk mengurangi penekanan dari tingginya jumlah pengangguran dan pekerja migran yang datang dari luar negeri.

Gambar 2.1.

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia



Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2012

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan pendidikan formal yang sangat rendah tersebut membutuhkan penanganan yang ekstra keras. Informasi terbaru menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia pada februari 2013 mencapai 121,2 orang, jumlah ini meningkat sebanyak 3,1 juta dibandingkan dengan bulan Agustus 2012 yang berjumlah 118,1 juta. Sedangkan jumlah yang bekerja pada Februari 2013 adalah sebesar 114 juta. kondisi ini sesuai dengan data pengangguran pada bulan Februari 2013 mencapai 7,2 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 5,92% atau menurun dibandingkan data Februari 2012 yang besarnya mencapai 6,32%. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan SMA sederajat diikuti oleh pendidikan SMP.

H. Sistem Perencanaan tenaga kerja di Indonesia

Penanganan masalah ketenagakerjaan terutama kesempatan kerja dan pengangguran, hanya dapat berhasil apabila berpegang pada perencanaan tenaga kerja yang tepat. Dengan perencanaan tenaga kerja baik nasional maupun daerah yang tepat, akan dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk daerah tertentu, pada sektor tertentu, pada waktu tertentu untuk keahlian tertentu dan atau juga sebaliknya. Upaya pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran ditujukan untuk merubah status penduduk dari beban pembangunan menjadi tenaga kerja produktif dan potensial sebagai aset bangsa.

Terdapat beberapa strategi yang bisa dilaksanakan untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama adanya perencanaan tenaga kerja yang matang untuk mencapai tujuan perluasan kesempatan kerja. Melalui perencanaan tenaga kerja ini maka akan bisa dideteksi kelompok – kelompok masyarakat yang termasuk dalam kriteria pengangguran, setengah pengangguran maupun yang bekerja penuh. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan demand dan

supply di pasar tenaga kerja. Perbedaan antara kebutuhan dan persediaan tenaga kerja akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja untuk per sektor, jenis jabatan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan dan status tenaga kerja tertentu.

Manfaat lain yang bisa dipetik dengan adanya perencanaan tenaga kerja adalah akan terpetakan industri atau usaha – usaha yang menggunakan tenaga kerja banyak dengan yang menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang sedikit. Sebagai contoh, perusahaan yang sumbangan yang besar terhadap nilai tambah daerah ternyata hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang kecil karena rata – rata mereka menggunakan padat tehnologi, sementara industri kecil menengah mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dalam rancangan kebijakan yang dilakukan oleh daerah akan memberikan perhatian lebih banyak bagi industri – industri kecil menengah termasuk dalam fasilitasi – fasilitasi pembangunan.

Manfaat ketiga dengan adanya perencanaan tenaga kerja adalah bisa dirancang suatu kebijakan untuk penyerapan tenaga kerja dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada.

Strategi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mereformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global. Pasar tenaga kerja di luar negeri menjadi sangat menarik bagi jumlah pengangguran yang mencapai 10 juta angkatan kerja ini, apalagi jumlah pendapatan yang ditawarkan lebih besar dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri.

Perencanaan Tenaga Kerja secara Makro, menurut Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No 16/ MEN/ XI/ 2010, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara

nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas – luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.

Permen Naker No 16/MEN/XI/2010 pada Bab II Pasal 4 menyebutkan PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan yaitu PTK nasional. PTK propinsi dan PTK kabupaten/kota dan lingkup sektoral. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/kota (PTKK) adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/ kota.

Pembangunan ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sehingga membicarakan bidang ketenagakerjaan dalam hal ini perencanaan tenaga kerja (PTK) tidak dapat dipisahkan dengan bidang ekonomi. Terdapat hubungan fungsional antara ekonomi dengan ketenagakerjaan. Kepala Bappenas Armaida mentakan bahwa berdasarkan hasil analisis kementrian PPN, dalam setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, akan mampu diciptakan lapangan kerja sebanyak 400.000. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konsisten mencapai 5 % per tahun, maka jumlah pengangguran yang terserap di pasar kerja akan mencapai 2.000.000 jiwa untuk setiap tahunnya, artinya 10 juta pengangguran tersebut akan bisa terserap semuanya di pasar kerja dalam waktu 5 tahun, dengan catatan tidak ada penambahan pengangguran baru, padahal dengan jumlah penduduk usia kerja yang bertambah setiap tahunnya jelas memberikan sumbangan yang besar terhadap bertambahnya pengangguran baru setiap tahun. Oleh sebab itu, maka perencanaan ketenagakerjaan harus direncanakan secara matang seiring dengan perencanaan pembangunan.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya, perubahan dari kedua sisi

tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target – target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel – variabel ekonomi lainnya.

Kebutuhan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia dalam suatu sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing atau seluruh sektor untuk melaksanakan kegiatan produksi. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja adalah penentuan target pertumbuhan ekonomi nasional/regional serta penjabarannya menjadi pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi umumnya dinyatakan sebagai kenaikan PDB/PDRB nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga konstan suatu tahun dasar atau nilai tambah bruto (NTB). Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi ini kemudian dicari pola hubungan antara pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi menggunakan model dan teknik tertentu.

Upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya adalah menyusun dokumen rencana tenaga kerja. Peran penting dokumen rencana tenaga kerja dalam pembangunan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, rencana tenaga kerja merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun strategi, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan (pasal 7 dan Pasal 8). Kewajiban dan ketentuan penyusunan perencanaan tenaga kerja dari tingkat nasional hingga tingkat daerah juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan saling terkait antara sektor satu dengan sektor yang lain, oleh karena itu perencanaan tenaga kerja dan penyediaan informasi ketenagakerjaan harus dijadikan sebagai bentuk

tanggungjawab, sekaligus perekat hubungan antar instansi/lembaga baik pusat, daerah, sektoral, maupun swasta dalam upaya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Perencanaan tenaga kerja ini patut disadari sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, mengingat permasalahan ketenagakerjaan begitu kompleks. Upaya tersebut dilakukan agar kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan lebih mengarah pada pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (*employment-growth friendly*), yaitu penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Melalui perencanaan tenaga kerja tersebut, diharapkan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan lebih sistematis dan terpadu antar sektor, sehingga mampu menekan jumlah pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai sasaran pokok pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran. Dalam pelaksanaannya, perubahan dari kedua sisi tersebut dapat disiasati dengan menetapkan pilihan strategi kebijakan dan penetapan target – target pembangunan. Perencanaan tenaga kerja selama 5 tahun mendatang secara spesifik, dipengaruhi oleh penetapan beberapa variabel – variabel ekonomi lainnya.

BAB IV

MIGRASI

A. Pengertian Migrasi

Migrasi merupakan salah satu fenomena penting dalam kependudukan, baik ditinjau dari aspek demografis maupun geografis. Migrasi berpengaruh terhadap kondisi spasial atau territorial yaitu perubahan tempat tinggal, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah yang akan berpengaruh terhadap kebijakan kependudukan dan pembangunan yang akan ditetapkan pada daerah tersebut. Migrasi mengandung pengertian perubahan tempat tinggal yang permanen atau relatif permanen (berjangka waktu tertentu). (Ghosh 2006)

Migrasi penduduk juga merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja. Pada konsep lama migrasi lebih banyak dilakukan antar wilayah atau daerah dalam satu negara, namun pada tiga dasa warsa terakhir, dimulai dari awal tahun 1980an, konsep migrasi di Indonesia sudah berubah

paradigmanya menjadi migrasi Internasional. Secara teori, migrasi bisa didefinisikan sebagai berikut: (Hugo 1993)

- a. **Migrasi** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. berdasarkan dimensi waktu Migrasi bisa dibedakan menjadi:

- (i) Migran sirkuler, (**migrasi musiman**) adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sikuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali
 - (ii) **Migran ulang-alik (commuter)** adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, (misal setiap hari atau setiap minggu), pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula (misal pada sore atau pada akhir minggu). Migran ulang-alik mempunyai konsekwensi kebutuhan transportasi yang meningkat.
- b. **Migrasi internasional** adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
 - c. **Migrasi internal** adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antarpropinsi, antarkota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat

kabupaten/kota, seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.

B. Teori – teori migrasi

B.1. Teori Neo Classic

Teori makro ekonomi Neo Classic menyoroiti migrasi dari aspek ekonomi di mana perpindahan tenaga kerja berasal dari daerah yang kelebihan tenaga kerja menuju daerah yang kekurangan tenaga kerja. Selain itu perpindahan juga disebabkan oleh kekayaan alam dan kelebihan modal yang ada di suatu negara menjadi daya tarik tenaga kerja dari daerah lain untuk melakukan migrasi, (Massey et al. 1993). Merujuk pada teori ini keputusan dipengaruhi oleh pendapatan yang akan diterima oleh tenaga kerja, apabila pendapatan memberikan peluang yang lebih baik maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja baik sirkuler ataupun menetap. Ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh migran dibuat secara individu dibanding sebagai pertimbangan kelompok.

Teori makro ekonomi Neo Klasik menyebutkan bahwa dalam membuat keputusan migran mempertimbangkan manfaat-biaya perpindahan ke area tujuan yang potensial. Tentu saja, lebih besar penghasilan yang akan mereka peroleh lebih banyak perpindahan tenaga kerja ke negara tujuan tersebut. Besarnya perbedaan upah tenaga kerja antar negara menentukan besarnya perpindahan emigrasi diantara kedua negara tersebut. Bagaimanapun, besarnya penghasilan yang akan diperoleh di negara tujuan tersebut ditentukan juga oleh karakteristik individual dari tenaga kerja migran, seperti pendidikan, keahlian (skill), dll.

B.2. Teori Ekonomi Rumah Tangga

Teori ekonomi rumah tangga menerangkan bahwa aliran emigrasi menentukan strategi rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala kegagalan pasar, (Massey 1999)

Pendekatan dalam teori ini adalah bahwa salah satu kunci pengambilan keputusan seseorang untuk bermigrasi tidak dibuat sendiri melainkan dengan pertimbangan keluarga sebagai unit terkecil. Artinya dasar pertimbangan dilakukan secara kolektif " (Massey 1999). Pada teori ini upah yang tinggi bukan merupakan satu – satunya alasan bagi seseorang untuk melakukan migrasi, pendorong adanya migrasi adalah karena kegagalan perekonomian negara asal dalam arti yang luas. Berdasarkan kondisi ini maka keluarga akan mempertimbangkan salah satu anggota keluarganya atau bahkan semua untuk melakukan migrasi ke daerah yang lebih menjanjikan.

Teori ekonomi rumah tangga ini berhubungan secara langsung dengan teori jaringan yang menyatakan bahwa teori jaringan menciptakan bangunan teori migrasi internasional yang menekankan pada peranan keluarga dan pertalian kekeluargaan memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja. Teori jaringan ini banyak terjadi pada migrasi yang ada di Indonesia. Tenaga kerja yang sudah melakukan migrasi akan menjadi pembuka jalan bagi anggota keluarganya untuk melakukan migrasi dengan cara memberikan informasi potensial, membantu biaya perjalanan, menemukan pekerjaan, dan sebagainya.

B.3. Teori Pasar Tenaga Kerja

Teori pasar kerja menyatakan bahwa pasar merupakan aktivitas bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja bervariasi bisa sebentar namun juga bisa memakan waktu yang relative lama. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar adalah: setiap pemberi kerja menawarkan lowongan kerja dan

menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah, di sisi lain pencari kerja juga memiliki keahlian yang berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula.

Permasalahan lain yang berkembang adalah bahwa tidak setiap daerah atau negara akan memberikan tingkat upah sesuai yang diinginkan oleh tenaga kerja, sehingga kondisi ini akan mendorong migrasi tenaga kerja dari daerah yang kekurangan peluang kerja dan memiliki tingkat upah rendah ke daerah dengan peluang kerja yang lebih banyak dan memiliki tingkat upah yang lebih menjanjikan.

Teori ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu dan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja, akan bergerak mencari peluang kerja ke daerah yang lebih menjanjikan upah lebih tinggi. Tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian akan tetap berada di daerah asal karena tidak memiliki peluang untuk bersaing masuk ke pasar kerja. Artinya teori pasar tenaga kerja (*labor market theory*) menyatakan bahwa, migrasi tenaga kerja didorong oleh permintaan pasar yang tinggi (Todaro, 1997; Massey et al 1993; Hugo et al, 1996). Pasar yang menarik imigrasi tenaga kerja terlihat lebih dominan dibanding tekanan untuk keluar dari negara asal.

B.4. Teori Pusat – Pinggiran (*The Centre – Periphery Theory*)

Teori pusat-pinggiran (*the centre-periphery theory*) menerangkan bahwa perpindahan penduduk dari daerah atau negara pinggiran ke daerah atau negara yang berada di pusat. Migrasi tenaga kerja mengalir dari negara miskin bertujuan untuk mengumpulkan modal dari negara kaya yang ingin mengumpulkan modal/kapital dari negara tujuan (kaya), agar bisa meningkatkan perekonomiannya. Namun tujuan teori Pusat – Pinggiran ini belum berhasil dengan baik karena beberapa sebab antara lain:

- 1) Pendapatan yang dikumpulkan masih banyak yang digunakan secara konsumtif oleh tenaga migran atau keluarganya sehingga tidak membeikan nilai produktif bagi negara asal.

- 2) Tenaga kerja yang bekerja di ke luar negeri adalah tenaga kerja produktif dengan skill tinggi sementara yang masih tinggal di negara asal adalah tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tidak produktif, sehingga tidak bisa memacu peningkatan nilai produktif negara tersebut.
- 3) Fasilitas dan sarana prasarana di negara asal masih jauh dari kondisi yang diharapkan sehingga belum mampu menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi negara asal.

Teori pusat-pinggiran (*the centre-periphery theory*) menunjukkan bahwa perbedaan fasilitas dan sarana prasarana pembangunan ini akan menyebabkan kesenjangan ekonomi akan selalu terjadi pada daerah pusat dan pinggiran. Perubahan yang terasa pada hasil migrasi ini hanya terfokus pada peningkatan ekonomi migran dan keluarga migran.

Negara pinggiran masih selalu menjadi negara miskin sebab yang pergi ke luar negeri untuk bekerja adalah pekerja dengan produktivitas tinggi sehingga yang tertinggal/tersisa di negara asal hanyalah tenaga kerja dengan produktivitas yang rendah sementara remitan/kiriman yang dikirimkan ke negara asal kebanyakan digunakan untuk kegiatan konsumtif rumah tangga (Khan, 1991:218). Melihat fenomena semacam ini, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa emigran hanya dapat berbuat sedikit bahkan tidak sama sekali untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah asalnya.

B.5. Teori Ekonomi Rumah Tangga

Teori ekonomi rumah tangga menyatakan bahwa, aliran emigrasi menentukan strategi rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala kegagalan pasar (Massey et al, 1993; 1998; Hugo, et al, 1996). Hal ini menerangkan bahwa keputusan migrasi tidak dibuat oleh individu secara sendirian, tetapi oleh unit yang lebih besar, seperti keluarga atau rumah tangga, dimana orang melakukannya secara kolektif (Massey, et al, 1993:436). Teori ini juga menyatakan bahwa tekanan

untuk bekerja ke luar negeri tidak dipengaruhi adanya perbedaan tingkat upah diantara kedua negara tersebut, tetapi oleh kegagalan perekonomian di negara asal (Hugo, et al, 1996:14). Untuk meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala dalam lingkungan perekonomian lokal, rumah tangga mengalokasikan anggota keluarga mereka yang mempunyai perbedaan kapasitas, karakteristik dan keahlian untuk mengambil pekerjaan yang berbeda ke lokasi yang berbeda termasuk ke luar negeri untuk memaksimalkan penghasilan mereka. Teori ekonomi rumah tangga ini sejalan dengan teori jaringan yang menyatakan bahwa migrasi disebabkan oleh adanya peranan keluarga dan pertalian kekeluargaan yang memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja (Hugo, 1981a). Massey menerangkan bahwa jaringan kekeluargaan sudah berjalan sebelum dan selama perpindahan aktual dengan memberikan informasi potensial, membantu biaya perjalanan, menemukan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan berbagai bantuan, individu yang kurang mampu dapat pergi bekerja ke luar negeri dan ini diaplikasikan dalam kasus migrasi tenaga kerja dari Flores Timur ke Sabah.

C. Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi

Faktor penarik dan pendorong seseorang melakukan migrasi, merupakan perkembangan teori migrasi (*law of migration*) yang dikemukakan E. G. Ravenstein (1885) (Pozo & Thieme 2006), yaitu:

1. Migrasi dan jarak
 - a. Kebanyakan migran menempuh jarak dekat
 - b. Migran yang menempuh jarak jauh, pada umumnya lebih suka menuju pusat-pusat perdagangan dan industri.
2. Migrasi bertahap
 - a. Adanya arus migrasi terarah
 - b. Adanya migrasi dari desa – kota kecil – kota besar

- c. Proses penyebaran adalah kebalikan proses penyerapan dan memperlihatkan gejala yang sama
3. Migrasi Arus Balik, setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik penggantinya.
 4. Perbedaan desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Di desa lebih besar daripada di kota.
 5. Wanita melakukan migrasi pada jarak yang lebih dekat daripada pria.
 6. Teknologi dan migrasi. Teknologi menyebabkan migrasi meningkat.
 7. Motif ekonomi, merupakan dorongan utama seseorang melakukan migrasi.

Migrasi juga bervariasi menurut volumenya, sebagai berikut:

1. Besarnya volume migrasi sebanding dengan keanekaragaman orang.
2. Volume migrasi berkaitan dengan kesulitan mengatasi penghalang.
3. Volume migrasi bervariasi sesuai dengan fluktuasi ekonomi.
4. Volume maupun tingkat migrasi cenderung makin naik, kecuali bila keadaan rintangan yang ketat.
5. Volume dan tingkat migrasi sebanding dengan kemajuan di suatu negara atau wilayah.

Sedangkan karakteristik migran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Migran yang tertarik oleh faktor positif di daerah tujuan, cenderung merupakan seleksi positif.
2. Migran yang memberi reaksi terhadap faktor negatif di daerah asal, umumnya hasil dari seleksi negatif. Bila faktor negatif yang mendorong kelompok penduduk untuk bermigrasi, mereka bukan migran selektif sama sekali.

3. Jika diperhatikan secara keseluruhan, seleksi yang terjadi cenderung bersifat bimodial atau dua bentuk.
4. Tingkat seleksi bertambah sebanding dengan kesulitan dari rintangan-rintangan yang menghambat.
5. Tingginya taraf kecenderungan untuk bermigrasi pada tingkat-tingkat perkembangan kehidupan seseorang penting artinya bagi seleksi migran.
6. Ada kecenderungan bahwa migran mempunyai cirri-ciri diantara penduduk daerah asal dan cirri-ciri diantara penduduk daerah tujuan.

Adapun Ravenstein pada tahun 1889 mengemukakan hukum migrasi, yang kemudian dikembangkan oleh Everett S. Lee, maka Zelinsky pada tahun 1971, mengemukakan hipotesisnya mengenai transisi mobilitas, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berbeda pada proses modernisasi, akan mengalami perubahan dari mobilitas special dan sosial yang rendah menuju mobilitas sosial dan special yang tinggi.
2. Untuk masyarakat tertentu, perkembangan transisi mobilitas berlangsung sejalan dengan transisi demografi dan transisi lainnya yang belum pasti.
3. Dalam berbagai tahap transisi, terjadi perubahan dalam fungsi, jenis, kelompok sosial dalam migrasi serta daerah asal dan daerah tujuan,
4. Dengan berkembangnya arus informasi, mudahnya memanfaatkan informasi itu dapat menyebabkan orang tidak perlu pindah untuk mendapatkan manfaat yang sama.
5. Gerak penduduk semula menuju ke pusat dan kemudian menyebar keluar dari pusat-pusat pertumbuhan.

Sementara itu Zelinsky, membagi transisi mobilitas dalam 5 (lima) tahap.

1. Tahap pertama, tahap masyarakat tradisional, dimana migrasi yang terjadi sangat kecil. Terjadi sirkulasi karena adat kebiasaan, misalnya lading berlimpah, kunjungan keluarga, berdagang, perang atau alasan pindah karena agama.
2. Tahap kedua, pada tahap ini, merupakan awal dari masyarakat transisi. Pada tahap ini terjadi migrasi dari desa ke kota dan migrasi menuju tanah kosong baik di dalam maupun di luar negeri. Mobilitas sirkuler dari berbagai jenis mulai tampak.
3. Tahap ketiga, tahap ini merupakan tahap akhir masyarakat dalam transisi. Pada tahap ini mulai terjadi penurunan migrasi dari desa ke kota. Migrasi menuju tanah kosong mulai menurun, baik di dalam maupun di luar negeri. Sirkulasi penduduk meningkat dan menjadi lebih kompleks.
4. Tahap keempat, tahap ini merupakan tahap masyarakat maju. Mobilitas mulai mendatar pada tingkat yang tinggi. Migrasi dari desa ke kota terus berlangsung, tetapi berkurang secara absolute maupun relatif. Mobilitas antar kota dan intra kota terus meningkat. Migrasi menuju daerah yang kosong terus menurun, bahkan berhenti. Terjadi arus tenaga kerja tidak terampil dari daerah terbelakang ke daerah yang terus maju. Sirkulasi terus meningkat baik untuk tujuan ekonomi maupun tujuan rekreasi.
5. Tahap kelima, tahap ini tahap masyarakat yang sangat maju. Migrasi akan menurun karena kemajuan komunikasi. Migrasi yang terjadi bersifat intra atau antar kota serta mobilitas sirkuler meningkat.

Migrasi secara umum dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya,

hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian bermigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Secara rinci penyebab migrasi bisa dikelompokkan sebagai berikut:

C. 1. Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah:

Faktor pendorong berasal dari daerah asal migran,

- a. Makin berkurangnya sumber-sumber daya seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menipisnya sumber daya alam, berkurangnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian;
- b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit), pertumbuhan penduduk banyak sementara lapangan kerja yang tersedia terbatas;
- c. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, ideology, agama, dan suku bahkan menjurus pada peperangan, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal;
- d. Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan;
- e. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Kelima faktor tersebut secara sendiri ataupun bersama – sama mendorong terjadinya migrasi baik yang sifatnya sirkuler maupun migrasi permanent.

C.2. Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah:

Faktor penarik berasal dari daerah tujuan yang menunjukkan alasan mengapa seseorang melakukan migrasi antara lain:

- a. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup khususnya ekonomi yang lebih mapan.
- b. Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- c. Harapan memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang lebih baik dan menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
- d. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

Faktor pendorong dan penarik tersebut menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila terdapat harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, yang menjamin keamanan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Terdapat beberapa hal yang berpengaruh secara nyata terhadap kemauan tenaga kerja untuk bermigrasi ke daerah/ negara lain yaitu:

- a. Keputusan migrasi atau keinginan seseorang untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak dibuat oleh individu secara sendirian, tetapi oleh unit yang lebih besar – seperti keluarga atau rumah tangga, apalagi apabila yang berangkat migran adalah tenaga kerja wanita.
- b. Tekanan untuk bekerja ke luar negeri bukan hanya dipengaruhi adanya perbedaan tingkat upah diantara kedua negara tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh kegagalan perekonomian di negara asal.
- c. Untuk meminimumkan resiko dan menghilangkan kendala dalam lingkungan perekonomian atau negara yang baru maka tenaga

kerja dengan masukan dari keluarga akan memilih negara dengan budaya, karakteristik masyarakat atau agama yang relatif sama dengan lingkungan di mana dia tinggal.

- d. Keberadaan teman atau kerabat akan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan negara tempat tujuan. Hal ini disebabkan dengan adanya pertalian keluarga maka akan memainkan inisiatif dan jalur migrasi tenaga kerja.

D. Karakteristik Migran

Karakteristik migran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu karakteristik demografi, pendidikan dan ekonomi (Michael Todaro 2012).

D.1. Karakteristik Demografi

Para migran di negara berkembang umumnya terdiri dari pemuda yang berumur 15 hingga 24 tahun. Sedangkan migran wanita dapat dikelompokkan dalam dua tipe yaitu (1) migrasi wanita sebagai **pengikut**. Kelompok migran ini terdiri dari para istri dan anak-anak perempuan yang mengikuti migran utama yaitu laki-laki yang menjadi suami atau ayah mereka. (2) Migran wanita **solo** atau **sendirian**, yaitu para wanita yang melakukan migrasi tanpa disertai oleh siapapun. Tipe migran wanita solo ini yang sekarang terus bertambah dengan pesat. Bahkan di Indonesia jumlah tenaga kerja wanita yang melakukan migrasi ke luar negeri mencapai 70%. Jauh lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja pria yang bekerja di luar negeri. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pola hidup dan pola hubungan dalam sebuah rumah tangga, di mana wanita tidak lagi menjadi variabel pengikut namun sudah mulai mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga.

D.2. Karakteristik Pendidikan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara taraf pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan atau dorongan personal untuk melakukan migrasi (*propensity to migrate*). Mereka yang bersekolah lebih tinggi, kemungkinan untuk bermigrasi lebih besar. Kondisi ini disebabkan oleh perolehan kesempatan kerja sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan semakin kuat keinginan untuk melakukan migrasi.

D.3. Karakteristik Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir persentase terbesar para migran adalah mereka yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak memiliki keahlian dan yang tidak memiliki kesempatan untuk maju di daerah asalnya. Para migran dari daerah pedesaan, baik laki-laki maupun perempuan dengan segala status sosioekonomi (mayoritas berasal dari golongan miskin) sengaja pindah secara permanen untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan di daerah - daerah pedesaan.

E. Penelitian Tentang Migrasi Internasional

Migrasi merupakan salah satu komponen demografi yang memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk pada wilayah tujuan maupun wilayah asal. Secara harfiah migrasi diartikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain baik masih dalam konteks suatu negara atau pemerintahan maupun sudah menyeberangi batasan politik dan administrasi, baik menetap secara permanen maupun menetap sementara. International Organisations of Migration (IOM) menjelaskan bahwa migrasi terdiri dari perpindahan yang sifatnya legal maupun illegal, pengungsi karena politik, keamanan, bencana alam

maupun karena faktor – faktor ekonomi. Migrasi secara ekonomi sering dijelaskan sebagai perpindahan penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara nyata memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi bagi angkatan kerja (IOM 2010).

Piramida penduduk juga sangat dipengaruhi oleh adanya migrasi, negara maju cenderung mempunyai tingkat fertilitas yang rendah sehingga bentuk populasinya cenderung menua, di sisi lain negara berkembang mempunyai tingkat fertilitas yang relatif lebih tinggi dengan jumlah penduduk muda dan usia produktif yang lebih besar, kondisi ini menyebabkan negara maju membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan membuka kesempatan lebar bagi migrasi tenaga kerja. Migrasi tidak hanya berpengaruh dalam meningkatkan ukuran populasi, tetapi juga mengubah piramida usia bagi negara tujuan. Migran cenderung lebih terkonsentrasi di kelompok usia muda dan produktif secara ekonomi dibandingkan dengan penduduk asli sehingga akan memberikan kontribusi pada pengurangan rasio ketergantungan (Gagnon 2014).

Aspek lain yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan adalah seberapa besar pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik bagi individu yang melakukan migrasi dan keluarganya, wilayah atau negara asal migrant dan wilayah atau negara tujuan migrant. Salah satu tujuan utama seseorang melakukan migrasi adalah faktor ekonomi, sehingga masalah peningkatan ekonomi bagi pekerja migrant dan keluarga, negara asal dan negara tujuan, menjadi topik penelitian yang sangat penting. Sebuah review yang dilakukan oleh George J Borjas menunjukkan bahwa banyaknya migrant dari Puerto Rico yang menuju Amerika Serikat adalah karena tingginya perbedaan tingkat upah. Pekerja di sektor konstruksi rata – rata akan memperoleh pendapatan sebanyak \$ 23.000 per tahun ketika tinggal di Puerto Rico, namun apabila dia bekerja di Amerika Serikat, maka pendapatannya adalah sebesar \$

43.000 per tahun. Selisih sebesar \$ 20.000 atau hampir dua kali lipat ini menyebabkan banyak migrasi dari Puerto Rico ke USA. (George J, Borjas 2015)

BAB V

REMITTANSI

A. Pengertian Remittansi

Remittansi adalah pengiriman uang dari pekerja migran kepada keluarga di negara asal mereka. Efek dari pengiriman uang pada pembangunan sering kompleks dan kontradiktif, tapi terlihat dalam pandangan yang positif oleh mayoritas analis. Dalam beberapa negara-negara berkembang, pengiriman uang dari emigran berjumlah lebih dari 10% dari PDB. Pengiriman uang ditransfer melalui berbagai saluran yang berbeda sehubungan dengan biaya, kecepatan, kenyamanan dan faktor lainnya. Dari perspektif kebijakan, untuk mengurangi biaya transfer, maka mencegah penggunaan saluran tidak resmi, dan mempromosikan transfer yang masuk lembaga keuangan di negara penerima. (Carling 2005).

Pengiriman uang global untuk negara-negara berkembang tercatat meningkat dari USD 88 miliar pada tahun 2002 menjadi sekitar 93 miliar pada tahun 2003. Pengiriman remittansi secara global terus meningkat menjadi USD 325 miliar dollar pada tahun 2010 (Imai et al. 2014). Negara-negara berkembang secara total menerima satu atau setengah kali lebih banyak uang daripada pengiriman uang yang tercatat sebagai bantuan pembangunan resmi. Aliran terbesar remittansi yang tercatat di dunia salah satunya adalah dari Amerika Serikat ke Meksiko, arus besar lainnya pergi dari Arab Saudi ke negara-

negara Asia dan Arab dan dari Amerika Serikat ke negara-negara asal komunitas imigran yang besar (Cina, Filipina, India dan Vietnam). Negara-negara dengan pengiriman uang aliran terbesar adalah Meksiko, India, Spanyol, Pakistan, dan Portugal. Selain Pakistan, Bangladesh, China, Guatemala, Nigeria, Sri Lanka dan Indonesia. Data tahun 2004 menunjukkan estimasi aliran remiten selama tahun 2000 adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Aliran dana dari negara tujuan ke negara asal migrant

NO	ALIRAN DANA	NO	ALIRAN DANA
1	USA → Mexico7.6	9	USA → Philippines..... 1.2
2	Saudi Arabia → India.....3.6	10	Japan → Korea..... 1.0
3	Malaysia → Indonesia..... 3.1	11	USA → India..... 1.0
4	Saudi Arabia → Pakistan..... 1.8	12	Saudi Arabia → Indonesia.. 1.0
5	Saudi Arabia → Philippines 1.6	13	USA → Vietnam 0.8
6	Saudi Arabia → Egypt1.4	14	Saudi Arabia → Bangladesh.. 0.7
7	USA → China..... 1.4	15	USA → Korea..... 0.7
8	Germany → Turkey..... 1.2	16	France → Portugal 0.7

Sumber: Harrison (2004).

Peningkatan pengiriman uang ke negara-negara berkembang terjadi karena lebih banyak orang menetap di luar negeri, dan pengiriman menjadi lebih mudah, mode lebih cepat dan lebih murah dari transmisi uang ke negara. Hasil empiris tentang dampak migrasi terhadap pertumbuhan dan kemiskinan pada level negara. Sementara pengiriman uang yang dihasilkan meningkatkan pendapatan negara penerima dan akibatnya menurunkan kemiskinan, ada biaya sosial tidak diperhitungkan dalam pendapatan ini. Di satu sisi, pengiriman uang mengurangi upaya kerja dan meredam pertumbuhan jangka panjang, dan di sisi lain, mereka meningkatkan pembangunan sektor

keuangan dan dengan demikian merangsang pertumbuhan. Pengiriman uang memiliki dampak positif pada peringkat kredit suatu negara, menyediakan sumber yang besar dan mata uang asing stabil yang dapat mengurangi kepanikan investor, membantu mengatasi krisis neraca pembayaran, dan dapat digunakan untuk proyek pembangunan (Khodeir 2015)

B. Pemanfaatan Remittensi

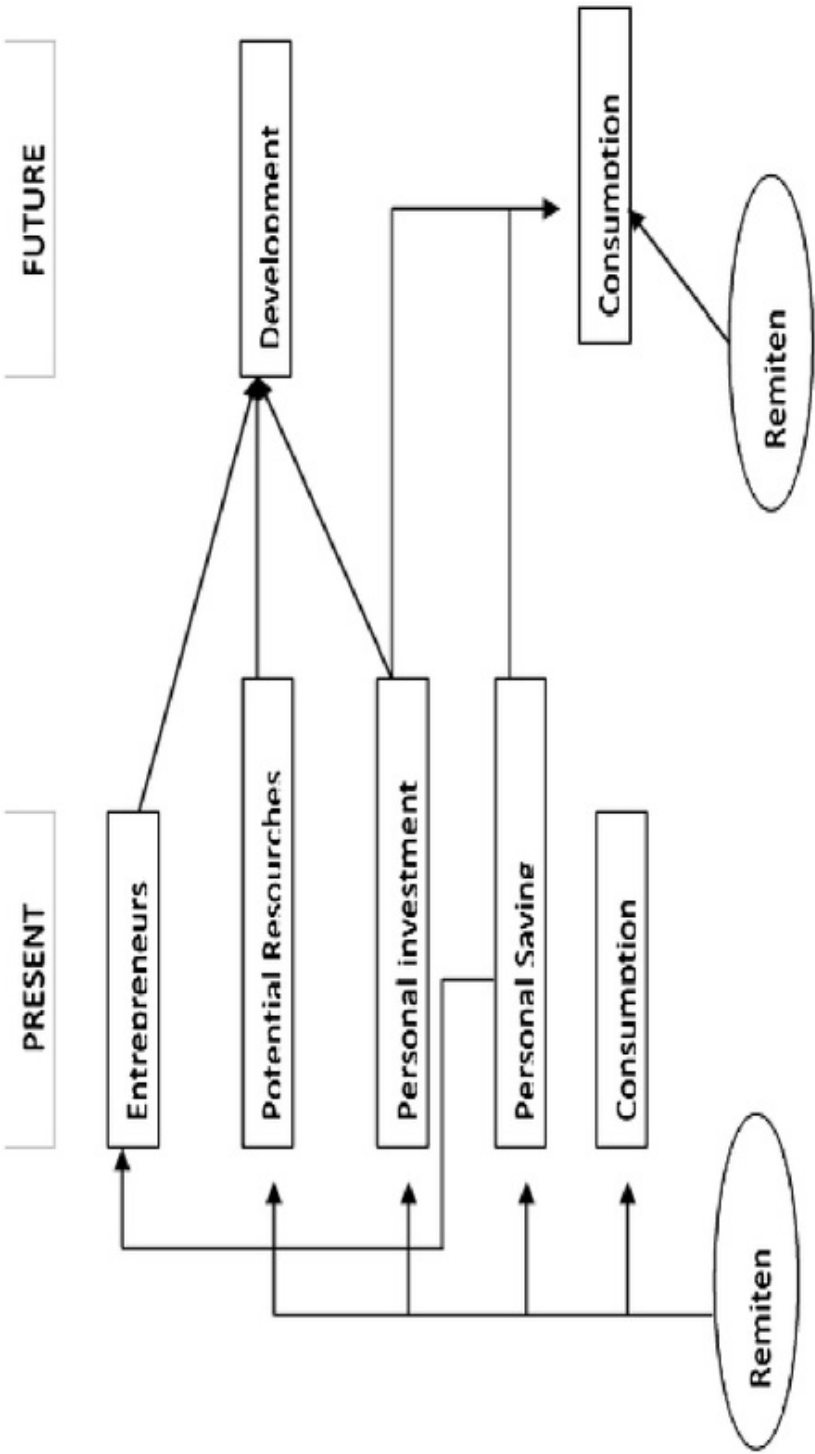
Remitten memberikan pengaruh secara nyata pada pekerja migrant dan keluarga, serta negara tujuan. Pengiriman remitten bisa mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan memungkinkan untuk investasi yang lebih tinggi pada aset fisik dan pendidikan dan kesehatan, dan juga memungkinkan akses pengetahuan yang lebih luas. Penelitian yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) tahun 2008 tentang *Remittances and Investment Opportunities for Egyptian Migrants* menunjukkan hasil sebagian besar (80%) dari populasi penelitian lebih peduli tentang memanfaatkan pengiriman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan. Survei menemukan terdapat hubungan antara volume pengiriman uang ditransfer dan tingkat pendidikan migran serta hubungan antara media transfer apakah lembaga formal maupun informal. Semakin besar volume pengiriman uang dan semakin tinggi tingkat pendidikan migran, semakin besar kemungkinan itu adalah bahwa mereka akan memilih jalur formal dalam transfer remitten yaitu melalui bank dan lembaga pengiriman uang resmi. (IOM 2010)

Akumulasi pengiriman remitten dari pekerja migran akan meningkatkan modal fisik melalui peningkatan akses pembiayaan, meskipun ini tergantung pada kecenderungan batas penerima remitten dalam melakukan konsumsi. Salah satu contohnya, di Nepal, terjadi penurunan rasio angka kemiskinan dari 42 persen pada tahun 1995-1996 menjadi 31 persen pada tahun 2003-2004 diperkirakan karena

adanya peningkatan pengiriman remitten (Bank Dunia, 2006). Pengiriman uang berkontribusi hingga 40 persen dari pendapatan rumah tangga Mesir, dan secara nasional menjadi sumber utama pendapatan mata uang asing di tingkat nasional, pengiriman uang terutama disalurkan untuk biaya penting dan konsumsi. (Ambrosius & Cuecuecha 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran yang kembali ke negara asal akan mampu mengimplementasikan ketrampilan yang diperolehnya sehingga menjadi brain gain dan meningkatkan akumulasi *human capital*. Migran yang kembali mampu melakukan mitigasi brain sehingga akan meningkatkan *human capital* bagi negara asalnya (Dustmann & Glitz 2011).

Gambar 5.1 Pola Penggunaan Remitansi



Jorgen Carling melakukan penelitian tentang pola pemanfaatan remitansi dan memperoleh hasil pola penggunaan remitansi oleh buruh migrant, terdapat 3 pola dalam penggunaan remitansi oleh tenaga migrant yaitu (1) Pola langsung konsumsi, di mana seluruh remitansi yang dikirimkan oleh migran akan dihabiskan oleh keluarga sebagai konsumsi. Pada pola ini, maka tidak terdapat dana yang digunakan untuk tabungan maupun usaha produktif; (2) Pola Personal saving, yaitu keluarga migran akan menyimpan remitansi yang dikirimkan baik keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk tabungan pribadi, misalnya dalam bentuk deposito maupun emas, sehingga ketika migran pulang, bisa digunakan sebagai biaya hidup di masa depan; (3) Pola personal investment, yaitu keluarga migrant akan menginvestasikan sebagian atau seluruh remitansi dalam bentuk investasi pribadi dan bersifat produktif, misalnya dalam wujud sawah, rumah kost, mobil angkutan atau motor ojek atau lainnya. Pilihan yang ketiga yaitu *personal investment* apabila digabungkan dengan *potential resources* dan *entrepreneur* diharapkan akan mendorong pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi migrant maupun masyarakat sekitarnya. Berdasarkan gambar 5.1 tersebut di atas, maka entrepreneur merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ekonomi, agar mampu menjadi entrepreneur maka diperlukan adanya peningkatan *human capital* bagi TKI yang diikuti dengan pemberdayaan sejak pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan.

Christian Dustmann and Albrecht Glitz dalam bukunya *Handbook of the Economics of Education Chapter 4 Migration and Education* menyatakan bahwa Keberhasilan ekonomi migran di negara tujuan dilatarbelakangi oleh pendidikan dan bagaimana dia melakukan transfer knowledge dan investasi ketrampilan yang dia peroleh, di sisi lain Christian juga menyatakan bahwa salah satu tujuan melakukan migrasi adalah keinginan untuk memperoleh keterampilan di negara tujuan yang memiliki return lebih tinggi dari negara asal (Dustmann & Glitz 2011).

Seorang migrant purna mempunyai nilai lebih karena telah bekerja di negara yang lebih maju baik dari segi teknologi maupun proses produksi sehingga mampu berperan dalam mengatasi kendala modal manusia. Jika pengetahuan baru dan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri dapat ditransfer dan digunakan secara produktif di negara asal, migran memutuskan untuk kembali, misalnya migrasi mahasiswa. (Dustmann & Kirchkamp 2002). Di sisi lain, migrasi juga memiliki efek tetap atau bahkan negatif pada modal manusia, pada kondisi di mana keterampilan dan tingkat pendidikan seorang migran di tempat tujuan tetap atau di bawah tingkat pendidikan, keterampilan dan kapasitasnya (Mattoo & Neagu 2006).

Remitten mempunyai hubungan erat dengan pendidikan di daerah asal, Mansuri (2006) meneliti pedesaan di Pakistan dan menemukan bahwa migrasi yang berdampak pada pengirinan remitten mempunyai hubungan dengan pendidikan perempuan yang ditunjukkan dengan jumlah pendaftaran sekolah. Di sisi lain, migrasi pekerja terampil tinggi dapat mengakibatkan *brain drain* yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan negara dalam jangka panjang (Adams & Page 2005). Banyak dari negara-negara Asia Pasifik baru-baru ini menikmati lonjakan pengiriman uang mulai dari krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan pada saat yang sama, tetapi belum ada penelitian, untuk pengetahuan kita, yang menilai dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di negara-negara tersebut.

C. Remitten, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan remitansi mempunyai dampak terhadap perekonomian melalui tiga cara berikut *Pertama*, dengan mempengaruhi tingkat akumulasi modal, pengiriman uang tidak hanya meningkatkan laju akumulasi modal fisik dan manusia, tetapi juga menurunkan biaya modal di negara penerima. Dengan demikian, tambahan pinjaman dapat meningkatkan dan menyebabkan lebih

besar hutang. Ini juga mungkin memiliki peran dalam menstabilkan perekonomian, atau mengurangi volatilitas, dan karenanya, mengurangi premi risiko yang diminta investor. Dampak *kedua* adalah terkait dengan mengakibatkan perubahan dalam pertumbuhan angkatan kerja, penerimaan remitansi memiliki dampak negatif pada tenaga kerja memaksa partisipasi dengan menggantikan pendapatan remittance untuk pendapatan tenaga kerja, dan dengan mengkonsumsi lebih banyak rekreasi dan bekerja lebih sedikit. Dampak *Ketiga*, pengiriman uang berdampak pada efisiensi investasi dengan mempengaruhi pertumbuhan TFP, tergantung pada siapa yang membuat keputusan investasi (George J. Borjas 2015).

Jika penerima membuat keputusan atas nama pengirim itu, ada kemungkinan bahwa keputusannya tidak efisien sebagai salah satu yang dibuat oleh perantara keuangan domestik terampil dalam kasus aliran modal masuk yang resmi. Pengiriman uang dapat mengakibatkan pengembangan keuangan yang lebih besar. Hal ini juga dapat menyebabkan pertukaran. Perubahan tingkat - masuknya dana dapat mengakibatkan apresiasi mata uang dan penurunan ekspor.

Borjas et al. (2009) menguji dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan di 84 negara-negara penerima berdasarkan pengamatan tahunan selama 1970-2004. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; rasio pengiriman uang terhadap PDB dari semua negara penerima lain yang menangkap efek dari pengurangan global dalam biaya transaksi dan perubahan sistematis lainnya dalam penentu pengiriman uang secara mikro ekonomi. Dalam kasus ini, pengiriman uang memiliki tanda negatif dan, sementara di lainnya tidak, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara pengiriman uang dan pertumbuhan ekonomi. (George J, Borjas 2015). Model menunjukkan bahwa pengiriman uang secara alamiah akan naik seiring dengan tingkat altruisme pekerja migran kepada keluarganya, di sisi lain terdapat hubungan negatif antara tingkat pendapatan penerima dan tingkat pengiriman uang, semakin tinggi tingkat pendapatan penerima (semakin kaya) maka pengiriman

uang akan semakin sedikit. Ini adalah kebalikan dari apa yang akan terjadi, seandainya pengiriman uang berfungsi sebagai arus investasi. Model ini juga menyiratkan eksternalitas negatif baik pada pekerja migran maupun penerima. Mengingat masalah moral hazard - pekerja berkurangnya dengan pengiriman uang - ada efek negatif pada output agregat.

Berdasarkan data pada 113 negara selama periode 29 tahun (1970-1998), Chami et al. (2005) mengontrol gap pendapatan dan kesenjangan suku bunga antara negara penerima dan AS sebagai penentu pengiriman uang dan menunjukkan bahwa pengiriman uang pekerja memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, yang konsisten dengan masalah moral hazard dari upaya berkurangnya pengiriman uang pekerja dengan lebih tinggi. Pradhan, Upadhyay, dan Upadhyaya (2008) meneliti efek dari pengiriman uang pekerja pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 1980-2004 untuk 39 negara negara berkembang dan mengkonfirmasi dampak positif pada pertumbuhan. Menggunakan data untuk lebih dari 100 negara di 1975-2002 dan pengendalian efek endogeneity dari remitansi dan pengembangan keuangan dengan Sistem GMM, Giuliano dan Ruiz-Arranz (2009) meneliti hubungan antara pengiriman uang dan pertumbuhan dan interaksi pengiriman uang dengan perkembangan keuangan di negara penerima. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang telah mendorong pertumbuhan dalam waktu cepat dikembangkan secara finansial negara. (Presbitero et al. 2014)

Masih relatif sedikit penelitian yang meneliti dampak dari pengiriman remitten terhadap kemiskinan. Vargas Silva, Jha, dan Sugiyarto (2009) yang telah meneliti dampak dari pengiriman uang pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Asia menggunakan data tahunan. Dalam spesifikasi mereka, laju pertumbuhan PDB dan rasio kesenjangan kemiskinan dinyatakan sebagai fungsi dari pengiriman remitten yaitu menggunakan log kiriman uang sebagai rasio dari PDB, logaritma dari PDB awal per kapita, tingkat pendidikan, logaritma natural dari pembentukan modal bruto, keterbukaan perdagangan, dan

GDP deflator. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari pengiriman remitten terhadap pertumbuhan, sedangkan dampak terhadap kemiskinan adalah negatif. Secara statistik diperoleh bahwa Peningkatan pengiriman remitten sebesar 10 % akan menyebabkan kenaikan PDB pada tahun tersebut sekitar 0,9%-1,2% pada pertumbuhan tahunan. Kenaikan 10% dari remitten (sebagai rasio dari PDB) akan menurunkan kesenjangan kemiskinan sekitar 0,7% -1,4 %. (Lekhe et al. 2014)

Taylor melakukan penelitian pada negara di luar Asia, menunjukkan, bahwa berdasarkan data rumah tangga di Meksiko, bahwa pengiriman uang dari Amerika Serikat pada tahun 1982 membantu petani meningkatkan kepemilikan ternak, yang kemudian mengurangi ketidaksetaraan di tahun 1988. Kiriman remitten juga membantu dalam mengurangi ketidakstabilan konsumsi di negara-negara berkembang. Pengiriman remitten bertindak baik sebagai ex-ante alat penghindaran risiko serta ex-post mekanisme manajemen risiko (Misalnya pengiriman uang meningkat setelah bencana alam mempengaruhi daerah). (Taylor 2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Combes dan Ebeke (2011) dengan menggunakan model Sistem-GMM-IV untuk panel cross-sectional dari 87 negara-negara berkembang selama periode 1975-2004 dengan tujuan memperkirakan dampak remittance pada ketidakstabilan konsumsi. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang secara signifikan mengurangi ketidakstabilan konsumsi, dampak yang kuat di finansial kurang pada negara maju. Namun, dampak menstabilkan remitansi menurun pada tingkat yang lebih tinggi dari pengiriman uang. Pengiriman uang juga meningkatkan ketahanan terhadap guncangan, seperti bencana alam dan guncangan ekonomi secara makro.

Didit Purnomo pada tahun 2009 melakukan penelitian mengenai tenaga migran di Kabupaten Wonogiri menemukan hasil bahwa ternyata tenaga kerja yang merantau mempengaruhi keadaan ekonomi di daerah asalnya. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa 85,4% perantau mengalami peningkatan ekonomi yang ditunjukkan dengan

kepemilikan harta yang meningkat, peningkatan ini disebabkan adanya penambahan pendapatan di daerah rantau yang kemudian diwujudkan pembelian atau kepemilikan harta di daerah asal. Namun sebanyak 15,6% perantau ternyata mengalami penurunan dalam kepemilikan harta, hal ini disebabkan pendapatan dari daerah rantau digunakan untuk pendidikan atau untuk hal lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Ir Rukmadi dkk (2010) terhadap TKI dan mantan TKI di Jawa Tengah menyebutkan bahwa Remitten yang diperoleh TKI adalah dipergunakan untuk 58,33% untuk biaya hidup, 25% untuk biaya sekolah, 21,67% digunakan untuk rehab rumah dan tabungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mafruhah dkk menunjukkan bahwa penggunaan remiten, bisa dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai konsumsi, yang langsung habis dan tidak memiliki nilai ekonomi di masa datang. Pola penggunaan remitten seperti ini banyak ditemui pada TKI yang menjadi kepala rumah tangga, di mana remitten dikirimkan keada istri atau keluarganya memang sebagai satu – satunya nafkah atau pendapatan .
2. Remiten digunakan dalam bentuk personal saving seperti dalam wujud emas, motor atau uang tabungan. Pole penggunaan remitten seperti ini biasanya dilakukan pada keluarga yang sudah lebih mapan ekonominya, sehingga pendapatan yang diperoleh digunakan untuk menabung namun tidak digunakan sebagai usaha produktif. Tabungan akan dibuka ketika TKI pulang kembali ke tanah air. Pada pola ini remitten akhirnya akan habis karena di masa mendatang akan digunakan untuk berkonsumsi.
3. Remiten digunakan untuk personal investment maupun collective investment yang digabungkan dengan enterpreneur akan menghasilkan usaha produktif yang bermanfaat bagi pembangunan secara pribadi maupun masyarakat. Pola penggunaan remiten seperti ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ekonomi

keluarga yang ditinggalkan. Apabila ekonomi sudah relatif mapan dan pendidikan cukup bagus, maka keluarga yang ditinggalkan akan memanfaatkan remitten bagi usaha produktif dan mampu memberikan pendapatan tambahan

D. Hasil Penelitian tentang Remittensi

Sebagian pendapatan yang diperoleh oleh pekerja migrant akan dikirimkan pada keluarga di negara asal, yang biasa disebut dengan remitten. Pengiriman uang (remitten) mempunyai dua motif utama yaitu; Pertama altruisme atau kepedulian pekerja migrant terhadap keluarga yang ditinggalkan, dengan harapan remitten bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga di negara asal. Bukti menunjukkan bahwa pekerja migran akan mengirimkan uang lebih banyak pada saat kondisi ekonomi negara asal memburuk dengan harapan memperlancar konsumsi keluarga mereka saat terjadi keguncangan ekonomi; Kedua self interest yaitu motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Migran yang termotivasi oleh selfinterest akan mengirimkan uang untuk berinvestasi dalam aset sebaik mungkin, sehingga menunjukkan hubungan positif antara pengiriman uang dan kegiatan ekonomi domestik (Frankel Jeffrey A. 2009); (Lueth & Ruiz-Arranz 2006);

IMF (2005) mengadakan penelitian empiris lintas negara yang meneliti motivasi untuk mengirimkan remitten dengan menggunakan data panel 87 negara pada periode 1980 sampai dengan 2003. Data yang digunakan adalah remiiten, PDB dan pendapatan rumah tangga, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang artinya konsisten dengan hipotesis altruisme. Penelitian lain dilakukan dengan menggunakan data dari 36 negara di Sub-Sahara Afrika pada periode 1990 sampai 2005, menemukan bahwa pekerja migrant akan mengirim lebih banyak uang ke negara asal ketika negara asal mengalami kegoncangan pendapatan/ekonomi (Singh et al. n.d.). Lueth dan Ruiz-Arranz (2006) menemukan bahwa pengiriman uang yang procyclical dan positif terkait dengan tingkat pertumbuhan GDP per kapita, mendukung hipotesis altruisme yang mendasari pengiriman

remitten. Namun beberapa penelitian lain memberikan dampak yang berbeda, Abdih, Barajas, Chami, dan Ebeke (2012) tidak menemukan dampak signifikan antara pendapatan rumah dan pengiriman uang. Sayan (2006) menghitung korelasi antara detrended pengiriman uang dan detrended PDB untuk 12 negara-negara berkembang dan menemukan bahwa hubungan yang counter cyclical dalam dua kasus, procyclical dalam dua kasus dan acyclical sisanya. (Sayan 2006)

Hubungan negatif antara pengiriman uang dan pendapatan rumah mungkin berarti bahwa pengiriman uang termotivasi oleh sifat altruis, dapat juga berarti bahwa pengiriman uang bertindak sebagai pengganti pendapatan tenaga kerja dengan mengurangi jumlah tenaga kerja di rumah, tidak hanya sebagai hasil migrasi. Sedangkan hubungan positif antara pengiriman uang dan pendapatan rumah yang mendukung argumen kepentingan juga bisa berarti bahwa pengiriman uang yang meningkatkan ekonomi melalui efek pada pendidikan anggota keluarga lainnya, peningkatan keuangan, dan perbaikan institusional (Leon-ledesma et al. 2006); (Piracha & Vadean 2010)

Yang (2011) mencatat bahwa apakah pengiriman uang yang digunakan untuk konsumsi atau investasi mungkin tergantung pada pendapatan rumah tangga, (Yang 2008), pada rumah tangga miskin remiten cenderung dihabiskan lebih banyak pada makanan dan barang tahan lama, sedangkan rumah tangga kaya atau keluarga mampu akan menggunakan sebagian remittennya berinvestasi di masa depan melalui bisnis atau modal manusia. Penelitian dengan menggunakan potensi pertumbuhan endogenity terhadap kondisi migrant di Republik Dominika menunjukkan bahwa efek pengiriman uang untuk kemungkinan kepemilikan usaha rumah tangga dalam sistem model probit simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang hanya menerima pengiriman uang memiliki kemungkinan lebih rendah dibandingkan memiliki bisnis, tetapi rumah tangga yang memiliki bisnis lebih mungkin untuk menarik pengiriman uang (Amuedo-Dorantes & Mundra 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Yang (2004) dengan menunjukkan fakta bahwa selama krisis keuangan

Asia menyebabkan perubahan nilai tukar berbagai negara ternyata memberikan pengaruh pendapatan yang berbeda terhadap para tenaga kerja migran Filipina, tergantung pada negara di mana mereka tinggal. Yang juga melakukan pengujian dalam variasi ini sebagai alat untuk menguji pendapatan migran dan menguji efek dari perubahan pendapatan migran. Hasil menunjukkan bahwa pada kondisi krisis di mana nilai tukar dollar meningkat terhadap mata uang setempat, pada rumah tangga yang mempunyai kegiatan kewirausahaan, maka akan meningkatkan skala usaha. Hasil lain juga menunjukkan adanya efek positif keluarga migran untuk masuk ke aktivitas bisnis baru. (Yang 2008)

Keputusan pemilihan investasi dari remmiten dilakukan melalui proses musyawarah antara migran dan kepala rumah tangga di negara asal yang kebanyakan adalah istri, namun, dalam kenyataannya kepala rumah tangga yang menerima remitansi lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam menentukan bagaimana uang tersebut akan digunakan. Hasil penelitian di empat ibu kota propinsi di Mesir yaitu Kairo, Fayoum, Monofeya dan Shakira menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, sekitar 20 persen responden dan migran menggunakan beberapa bagian dari pendapatan mereka untuk investasi produktif. Data per propinsi menunjukkan bahwa di Kairo, setidaknya 31% rumah tangga menginvestasikan bagian dari remitten yang mereka terima. Sementara di Monofeya dan Shakira, 20 persen dari rumah tangga penerima remitten menginvestasikan pengiriman uang yang mereka terima. Di antara empat propinsi, Fayoum memiliki proporsi terendah dalam rumah tangga yang melakukan investasi yaitu sebesar 11%. (IOM 2010)

Pemilihan investasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara individu maupun perekonomian regional dan nasional. Data IOM tersebut menunjukkan bahwa proporsi investasi yang dilakukan oleh keluarga migran adalah, 39% memilih untuk berinvestasi di real estate, kemudian 22% melakukan investasi dalam usaha bisnis pertanian kecil yang mempekerjakan kurang dari lima orang.

Sedangkan proporsi terkecil investor yaitu sebanyak 6% diinvestasikan di perusahaan swasta menengah yang mempekerjakan tidak lebih dari 20 orang. Di Kairo dan Fayoum, usaha kecil dan swasta adalah kegiatan investasi yang paling mewakili, sementara di propinsi Menofeya dan propinsi Sharkia, kegiatan investasi utama adalah di sektor real estate.

Pada level negara, ternyata remitten mempunyai efek positif, pengiriman uang merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak rumah tangga di Kenya. Pada tahun 2011, pengiriman uang pribadi yang diterima di Kenya mencapai \$ 934,000,000 dan menyumbang 3 persen dari GDP (Hines 2014). Remitten dari tenaga migrant merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian di Mesir, dan pada tahun 2008 mewakili 5,3 persen dari produk domestik bruto, (IOM 2010). Kondisi di Indonesia pun menunjukkan hasil yang sama, data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa remitten yang dikirim mencapai 120 triliun rupiah pada tahun 2015. Nilai sebesar itu tentu membawa dampak positif minimal bagi keluarga yang ditinggalkan oleh migran. (BNP2TKI 2015)

Migrant merupakan fenomena umum di dunia, berbagai faktor baik ekonomi maupun non ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sebab, proses dan hasil yang diperoleh dari migrasi. Kondisi ini menyebabkan banyak penelitian yang dilakukan, sehingga perlu dilakukan review terhadap beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Review tersebut akan disusun dalam bentuk research gap yang dibedakan berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Pengaruh Remitten terhadap Pengurangan Kemiskinan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard H Adams JR (2013) dengan lokus Ghana dan alat analisis multinomial logit memperoleh hasil bahwa Remitten membawa dampak pengurangan kemiskinan. Hasil tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Richard H Adams dan Page (2005) terhadap 71 negara berkembang dengan Ordinary Least Square dengan variabel

yang digunakan adalah PDB per capita, Indeks Gini, persentase antara jumlah migrant dengan total penduduk, Negara sampel dibedakan menjadi Negara dibedakan menjadi Asia Timur, Asia Tengah, Eropa, Amerika Latin, Afrika Utara, Asia Selatan dan Timur Tengah hasil menemukan hasil bahwa rata-rata kenaikan 10% dari pengiriman uang internasional di negara berkembang akan mengakibatkan penurunan 3,5% dari jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa remitten menurunkan angka kemiskinan.

b. Pengaruh migrasi dan remitten terhadap peningkatan human capital bagi keluarga migrant.

Richard H Adams JR menemukan hasil penelitian di Ghana bahwa (1) Keluarga/rumah tangga yang menerima remitten menghabiskan lebih banyak pada tiga barang-barang investasi: pendidikan, perumahan, dan kesehatan; (2) Remitten dapat menyebabkan peningkatan investasi dalam modal manusia dan fisik pada negara penerima, hal tersebut menunjukkan bahwa remitten ternyata mampu memberikan peningkatan human capital khususnya dari aspek pendidikan dan kesehatan. Richard H Adams JR dan Page (2005) menemukan hasil bahwa rumah tangga yang menerima kiriman uang internasional memiliki modal manusia lebih dari rumah tangga tanpa pengiriman uang, sementara rumah tangga yang menerima remitten dalam negeri (domestic) biasanya memiliki modal manusia yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dengan migrant internasional mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan human capital lebih baik daripada keluarga tanpa migrant.

Penelitian lain dilakukan oleh Vania B Salas (2014) terhadap anak – anak yang ditinggalkan migrant di Peru, dengan menggunakan alat analisis model Probit random effects untuk melihat pemilihan sekolah swasta dan negeri dan model Pooled Probit dengan variabel instrument untuk mengetahui adanya bias endogen. Hasil menunjukkan bahwa remitten memiliki dampak positif pada

keputusan pendidikan terlepas dari ketidakhadiran orang tua yang diukur dengan jumlah orang tua yang hadir dalam rumah tangga.

c. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap peningkatan human capital migrant

Christian Dustman, Itzhak Fadlon b, Yoram Weiss (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan Teori dasar adalah model Roy dinamis di mana seorang pekerja memiliki dua keterampilan yang berbeda yang dapat ditambah dengan learning by doing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migran yang kembali ke negara asal akan mampu mengimplementasikan ketrampilan yang diperolehnya sehingga menjadi brain gain dan meningkatkan akumulasi human capital. Migran yang kembali mampu melakukan mitigasi brain sehingga akan meningkatkan human capital (ketrampilan) bagi negara asalnya. Pia Pinger (2009) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara migrant temporer dan migrant permanen dimana migrasi temporer lebih menguntungkan bagi negara-negara berkembang, karena mendorong peningkatan keterampilan, tetapi juga pengiriman uang dan tabungan.

Christian Dustmann* and Albrecht Glitz* dalam bukunya Handbook of the Economics of Education Chapter 4 Migration and Education hal 327-439 menyatakan bahwa Keberhasilan ekonomi migran di negara tujuan dilatarbelakangi oleh pendidikan dan bagaimana dia melakukan transfer knowledge dan investasi ketrampilan yang dia peroleh. Hasil lainnya adalah keinginan untuk memperoleh keterampilan di negara tujuan yang memiliki return lebih tinggi dari negara asal menjadi alasan untuk migrasi.

Seorang migrant purna mempunyai nilai lebih karena telah bekerja di negara yang lebih maju baik dari segi teknologi maupun proses produksi sehingga mampu berperan dalam mengatasi kendala modal manusia. Jika pengetahuan baru dan pengetahuan yang diperoleh di luar negeri dapat ditransfer dan digunakan secara produktif di negara asal, migran memutuskan untuk kembali,

misalnya migrasi mahasiswa. (Dustmann 2002, Kilic et al, 2007). Di sisi lain, migrasi juga memiliki efek tetap atau bahkan negatif pada modal manusia, pada kondisi di mana keterampilan dan tingkat pendidikan seorang migran di tempat tujuan tetap atau di bawah tingkat pendidikan, keterampilan dan kapasitasnya (Mattoo et al., 2008).

d. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap wirausaha

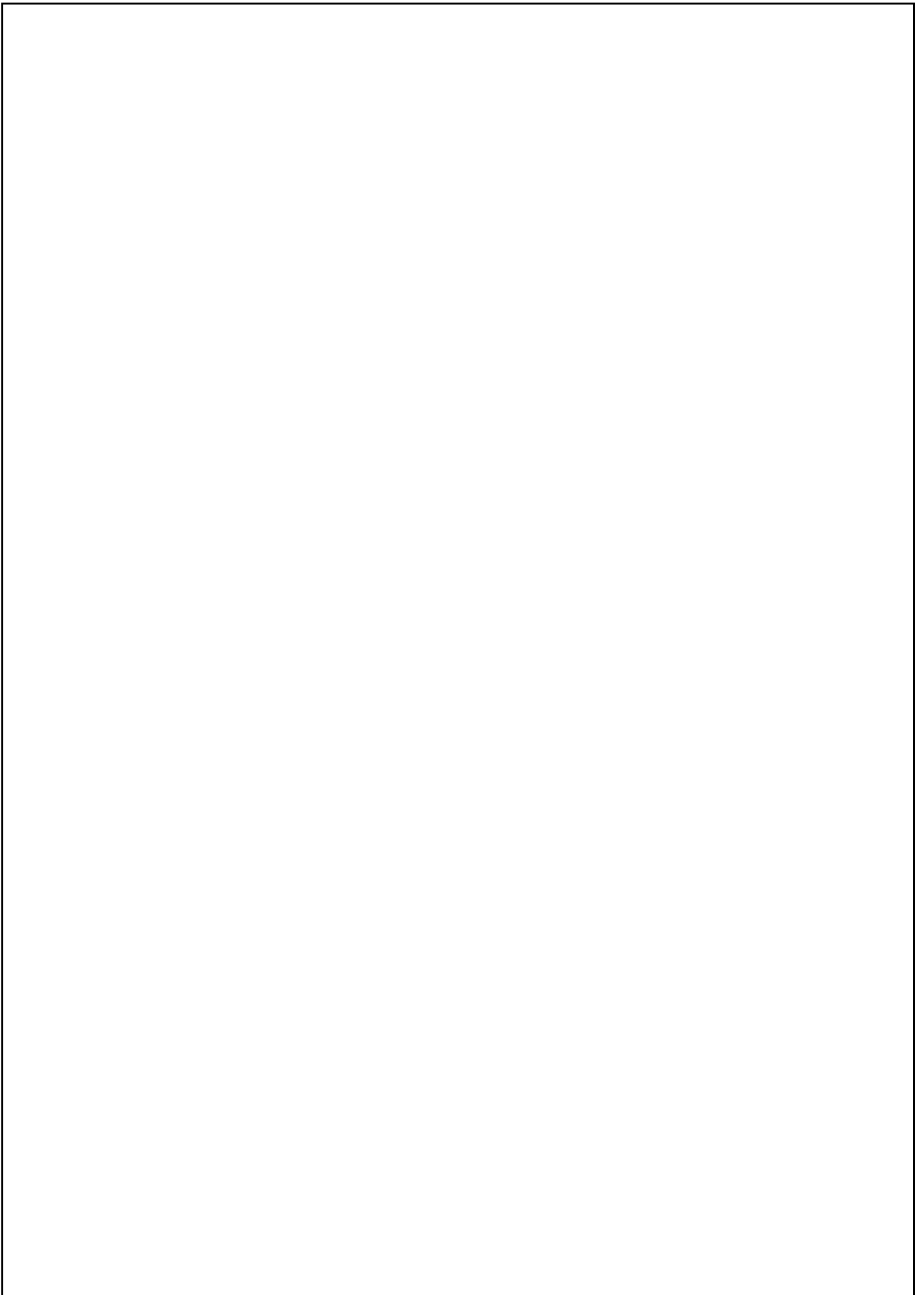
Tani Massimiliano, Stéphane Mahuteau, (2008) melakukan penelitian terhadap migran dari tiga negara di Maghreeb yaitu Al Jazair, Tunisia dan Maroko setelah kembali dari Eropa. Alat analisis yang digunakan adalah descriptive dan probit model dengan variabel dependent, masuk pasar kerja atau bekerja sendiri menjadi wirausaha, menemukan hasil bahwa Pekerja mandiri di luar negeri memiliki efek positif untuk menjadi wiraswasta setelah kembali ke negaranya. Hasil lainnya dengan menggunakan tabel cross diketahui bahwa ternyata tidak terjadi perubahan antara jenis pekerjaan migran ketika di negara tujuan dan setelah pulang ke negara asal.

e. Pengaruh Migrasi dan Remitten terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Barajas et al. (2009) menguji dampak dari pengiriman uang pada pertumbuhan di 84 negara-negara penerima remitten dengan menggunakan pengamatan tahunan selama 1970-2004. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; rasio pengiriman uang terhadap PDB dari semua negara penerima lain yang menangkap efek dari pengurangan global dalam biaya transaksi dan perubahan sistematis lainnya sebagai penentu pengiriman uang secara mikro ekonomi. Hasil penelitian dalam kasus ini menunjukkan bahwa, remitten memiliki tanda negatif sementara pada penelitian lainnya tidak, hal ini menyebabkan kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara pengiriman uang dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chami et al (2005), dengan menggunakan data pada 113 negara selama periode 29 tahun (1970-1998), mengontrol gap pendapatan dan kesenjangan suku bunga antara negara penerima dan AS sebagai penentu pengiriman uang dan menunjukkan bahwa pengiriman uang pekerja memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan, yang konsisten dengan masalah moral hazard dari upaya berkurangnya pengiriman uang pekerja dengan lebih tinggi. (Chami et al, 2005). Pradhan, Upadhyay, dan Upadhyaya (2008) meneliti efek dari pengiriman uang pekerja pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 1980-2004 untuk 39 negara negara berkembang dan mengkonfirmasi dampak positif pada pertumbuhan.

Giuliano dan Ruiz-Arranz (2009) meneliti hubungan antara pengiriman uang dan pertumbuhan dan interaksi pengiriman uang dengan perkembangan keuangan di negara penerima, data yang digunakan adalah lebih dari 100 negara pada kurun 1975-2002 dan pengendalian efek endogeneity dari remitansi dan pengembangan keuangan. Mereka menemukan bahwa pengiriman uang telah mendorong pertumbuhan dalam waktu cepat dikembangkan secara finansial negara. (Giuliano, Ruiz-Arranz 2009)



BAB VI

TENAGA KERJA INDONESIA

A. Sejarah Migrasi di Indonesia

Migrasi dalam sejarah Indonesia dimulai sejak adanya peradaban Indonesia. Ketika jaman kerajaan – kerajaan di nusantara mulai berkembang, perdagangan membawa pengaruh besar terhadap migrasi. Kerajaan di kawasan Asia bahkan jazirah Arab menyebabkan migrasi bukan hanya pada aspek ekonomi namun juga ideology, agama, budaya maupun adat istiadat. Hubungan kebudayaan dengan China dan India menyebabkan berkembangnya agama Hindu dan Budha. Perdagangan dengan Gujarati dan Jazirah Arab menyebabkan berkembang pesatnya agama Islam di Indonesia. Selain itu terjadi hubungan pernikahan antara pribumi dan pendatang menyebabkan migrasi yang sifatnya permanen sehingga memunculkan komunitas baru yaitu masyarakat Thionghoa, India dan Arab.

Migrasi kembali berkembang pada masa kolonial Belanda. Kebutuhan untuk mengelola perkebunan sementara tenaga yang mempunyai kemampuan untuk mengurus pertanian adalah penduduk dari Jawa. Oleh sebab itu, pada masa colonial banyak penduduk Jawa yang dikirim ke daerah Sumatera, Kalimantan bahkan sampai ke Suriname, New Kaledonia dan Vietnam khususnya di perkebunan tembakau, teh dan pabrik gula.

Di sisi lain, perkebunan yang dikelola oleh VOC sering tidak memperlakukan tenaga kerja secara manusiawi, tenaga kerja migran cenderung diperlakukan sebagai budak dan mendapatkan kekerasan/ penindasan, sementara bangsa Inggris yang menguasai semenanjung Malaka (Singapura dan Malaysia) membuka peluang kerja sebesar – besarnya bagi penduduk asal Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu banyak buruh di Jawa dan Sumatera yang melarikan diri dan menjadi migran untuk bekerja pada perkebunan – perkebunan di Semenanjung Malaka.

Setelah masa kemerdekaan khususnya sejak masa orde baru, migrasi di Indonesia semakin banyak baik masuk maupun keluar. Sebagai negara yang baru saja merdeka dengan kekayaan alam yang sangat banyak menyebabkan arus investasi dan tenaga kerja asing masuk dengan sangat cepat. Tenaga kerja asing masuk sebagai tenaga ahli dalam perusahaan – perusahaan dan investasi besar yang masuk. Tujuan utama tenaga kerja asing ini adalah sebagai media atau sarana untuk melakukan *transfer knowledge* bagi tenaga kerja di Indonesia. Di sisi lain kemudahan transportasi dan komunikasi menyebabkan jalur migrasi antar negara semakin terbuka lebar. Tenaga kerja Indonesia banyak yang memilih menjadi tenaga kerja migran di negara lain. Hanya sayangnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia selalu dalam posisi formal sebagai tenaga kerja kerah putih yang memperoleh pendapatan atau gaji yang tinggi, sementara tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih banyak pada posisi non formal sebagai tenaga kerja kerah biru yang mendapatkan upah relative rendah, posisi kurang aman dan perlindungan yang masih jauh dari harapan.

Posisi tenaga kerja Indonesia ini sering dikenal dengan istilah Tripple D yaitu Dangerous, Dirty dan Difficult artinya Tenaga Kerja Indonesia bekerja pada posisi mengerjakan pekerjaan pekerjaan berbahaya dan jauh dari perlindungan Keselamatan Kerja, apalagi bagi tenaga kerja di sektor domestic

B. Tenaga Kerja Indonesia

Program pengiriman TKI ke luar negeri sampai saat ini masih terlalu didominasi motif pendekatan bisnis yang didefenisikan secara bebas sesuai dengan selera kepentingan kelompok *kapitalis*. Akibatnya prinsip hitung-hitungan ekonomi selalu menjadi ukuran. PJTKI menjadikan TKI yang bekerja di luar negeri tidak lebih sebagai komoditas yang diperdagangkan sehingga aspek – aspek psikologis tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Kondisi ini menyebabkan banyak permasalahan yang harus dialami TKI mulai dari persiapan akan berangkat ke luar negeri, proses selama pendidikan, pada saat bekerja di luar negeri dan pasca kepulangan di tanah air.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seharusnya dipandang sebagai persoalan sosial budaya dalam arti luas, selain peluang yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi maupun sosial budaya. “Mengeksport” TKI ke luar negeri bukan saja mengirim individu TKI secara fisik tetapi sekaligus mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari berbagai aspek. Hal ini potensial memunculkan persoalan budaya dalam bentuk akulturasi dan enkulturasi dengan segala konsekuensi lintas budaya, baik yang positif maupun negatif.

Apabila TKI tersebut berhasil menyelesaikan kontrak tanpa masalah dan berhasil menangguk devisa maka persoalan mungkin hanya akan berhenti pada perubahan pola relasi gender dan hubungan dengan lag/kesenjangan sosial budaya. Namun apabila TKI tersebut gagal dalam menyelesaikan kontrak dan dikembalikan sebelum masa kontrak habis dengan menggendong masalah, maka permasalahan psikologis dan traumatik menjadi lebih berat. Permasalahan timbul karena dalam dari tahun ke tahun TKI yang bermasalah semakin banyak.

Kondisi ini cukup memperlihatkan karena menunjukkan bahwa TKI mendapatkan gaji yang relatif lebih rendah dibandingkan tenaga kerja lain karena:

1. Secara sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia kita menduduki posisi 111 dari 192 negara di dunia, hal ini terutama karena disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Angkatan kerja saat ini masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 57,44 juta atau 49,52 % dari jumlah angkatan kerja seluruhnya. Derajat kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini berada pada tingkat rendah bahkan di kalangan negara–negara Asean, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia saat ini diperkirakan sama dengan negara Kamboja dan Vietnam, kondisi ini mengakibatkan daya saing TKI yang bekerja di luar negeri semakin turun. Salah satu indikator penting dalam pengukuran kualitas tenaga kerja adalah unsur pendidikan.
2. TKI yang berangkat ke luar negeri rata – rata mempunyai tingkat skill dan kemampuan kerja yang rendah.
3. Kemampuan komunikasi TKI sangat rendah, rata – rata tenaga kerja berangkat tanpa bekal kemampuan komunikasi sama sekali.

Ketiga hal tersebut secara bersama – sama menyebabkan tenaga kerja kita cenderung memperoleh pekerjaan di sektor informal atau pada posisi D3 yaitu *Dirty, Dangerous, Difficult*. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, maka gaji yang diperoleh TKI menjadi rendah.

C. Data Tenaga Kerja di Indonesia

Pada tahun 2004, pemerintah membentuk Undang – Undang no 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Pasal 94 ayat 3, menyatakan bahwa BNP2TKI merupakan lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi Pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Undang undang tersebut ditindaklanjuti dengan Perpres No 81/2006 tentang pembentukan BNP2TKI. Sebagai badan negara visi utama BNP2TKI adalah Terwujudnya TKI yang berkualitas dan bermartabat. Visi tersebut kemudian diturunkan dalam misi

1. Menciptakan kesempatan kerja di luar negeri seluas-luasnya khususnya bagi TKI formal;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan TKI;
3. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan pemberdayaan TKI;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan TKI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyebutkan bahwa,

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah “.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/2004 menyebutkan,

“Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan “

Pembentukan BNP2TKI membuat penempatan TKI menjadi terdata dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1. Penempatan TKI tahun 2004 - 2015

Tahun	TKI	FORMAL	%	INFORMAL	%
2004	380.690	NA	NA	NA	NA
2005	474.310	NA	NA	NA	NA
2006	680.000	177.495	26,1	502.505	73,9
2007	696.746	196.191	28,16	500.555	71,84
2008	748.825	269.346	35,97	479.470	64,03
2009	632.172	103.918	16,44	528.254	83,56
2010	575.804	124.683	21,65	451.121	78,35
2011	586.802	266.191	45,36	320.611	54,64
2012	494.609	258.411	52,25	236.198	47,75
2013	512.168	168.285	32,86	343.883	67,14
2014	429.872	247.610	57,6	182.262	42,2
2015	275.736	152.394	53,52	123.342	46,48

Sumber: BNP2TKI berbagai tahun

Data BNP2TKI pada tabel 6.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah penempatan TKI dari tahun ke tahun meningkat, namun kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan Penempatan TKI secara drastis dibandingkan pada tahun sebelumnya, data tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penempatan adalah sebanyak 429.872 sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 275,736, artinya terjadi penurunan sebesar 154.136 atau 35,8%. Dari jumlah tersebut terdapat 55% TKI yang bekerja di sektor formal sedangkan yang bekerja di sektor informal sebanyak 45%.

Jumlah tersebut tersebar pada seluruh propinsi di Indonesia dengan jumlah penempatan terendah adalah pada propinsi Papua Barat dan Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian akan mempertimbangkan daerah yang memiliki jumlah TKI terbanyak dengan harapan akan mampu merepresentasikan perilaku dari TKI dan keluarga dalam memanfaatkan remitten. Sebagai bahan pertimbangan akan disajikan sepuluh besar propinsi dengan penempatan TKI terbanyak bisa ditunjukkan pada tabel 6.2. berikut ini:

Tabel 6.2. Sepuluh Propinsi dengan TKI terbanyak di Indonesia

NO	PROPINSI	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1	Jawa Barat	119.620	129.885	105.479	63.102	418.086
2	Jawa Tengah	115.456	105.971	92.590	57.077	371.094
3	Jawa Timur	100.368	93.843	78.306	48.312	320.829
4	Nusa Tenggara Barat	46.245	63.438	61.139	51.743	222.565
5	Lampung	16.259	17.975	18.500	16.109	68.843
6	Sumatera Utara	13.728	13.299	14.782	12.054	53.863
7	DKI Jakarta	15.021	14.248	7.561	1.212	38.042
8	Bali	14.082	14.617	7.716	4.869	41.284
9	Banten	10.853	13.244	9.720	4.257	38.074
10	Sulawesi Selatan	13.875	10.358	7.497	2.348	34.078

Sumber: BNP2TKI, 2016

Berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah merupakan nomor dua terbanyak dalam penempatan TKI, bahkan apabila dilihat dari total penempatan seluruh Indonesia selama empat tahun terakhir yang berjumlah 1.721.385 TKI, maka total penempatan TKI propinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 21,56%. Sedangkan penempatan TKI menurut kabupaten kota terbanyak adalah sebagaimana pada tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3 Jumlah penempatan TKI terbanyak menurut kabupaten/kota

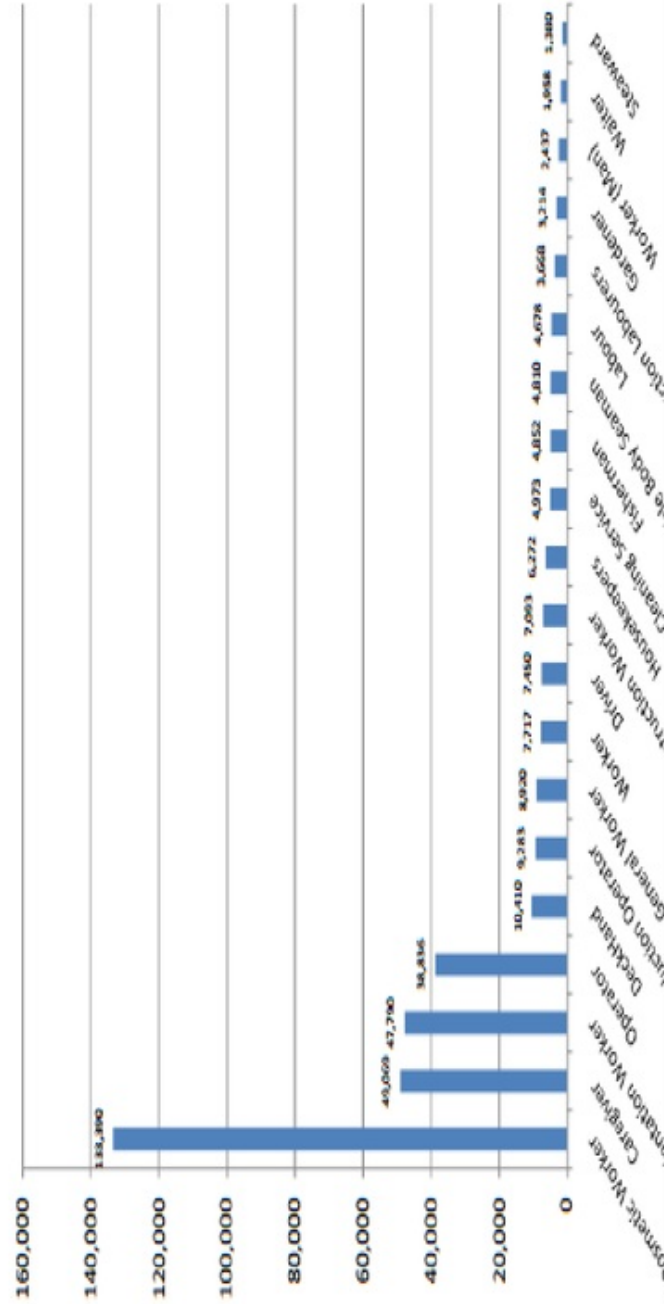
No.	DAERAH ASAL	2012	2013	2014	2015
1	LOMBOK TIMUR	19.936	33.287	29.510	25.772
2	INDRAMAYU	28.524	28.410	25.521	19.064
3	CILACAP	19.799	17.592	16.013	10.753
4	CIREBON (KAB)	16.755	18.675	15.786	10.953
5	LOMBOK TENGAH	13.675	14.793	14.109	12.175
6	CIANJUR	12.266	14.639	11.311	5.437
7	KENDAL	10.967	11.497	11.212	7.581
8	KARAWANG	10.338	11.749	8.499	3.906
9	PONOROGO	10.940	10.494	8.869	6.443
10	MALANG	11.657	10.218	8.114	3.873

Sumber : BNP2TKI

Jumlah penempatan TKI formal dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun secara prosesntase masih di bawah penempatan TKI nonformal, beberapa faktor yang mendorong perubahan ini antara lain (1) Penurunan TKI Informal karena pembenahan penempatan TKI di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Diberlakukannya moratorium TKI PLRT di negara-negara di mana Pemerintah negara tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan bagi TKI; (2) Pemberlakuan langkah pengetatan penempatan TKI dengan pemberlakuan durasi waktu pelatihan yang dibuktikan melalui kehadiran sistem sidik jari (*finger print*); (3) Ketersediaan tenaga kerja unskill di daerah yang benar-benar berkurang; (4) Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat. Penurunan penempatan TKI secara keseluruhan dari tahun 2014 ke tahun 2015 merupakan imbas kebijakan Menteri Tenaga Kerja tentang penghentian penempatan TKI pada pengguna peserorangan atau *domestic worker* yang terdiri atas penerapan *hard policy* yang berupa penghentian penempatan TKI di 21 negara di kawasan Timur Tengah dan *soft policy* yaitu pengetatan penempatan TKI di negara – negara Asia Pasific. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan masuk ke dalam kategori tindak pidana *trafficking*. Peraturan ini menyebabkan PPTKIS menghentikan penempatan PLRT di negara negara tersebut dan tentu saja membawa dampak penurunan jumlah TKI.

Posisi pekerjaan TKI di luar negeri pada penempatan tahun 2014 masih didominasi oleh *domestic worker*, *caregiver*, dan *plantation worker* hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan TKI, secara detail jenis pekerjaan TKI pada penempatan tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 6.1. sebagai berikut:

Gambar 6.1. Posisi Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan penempatan 2014



Sumber: Laporan BNP2TKI 201

D. Permasalahan TKI

Di era globalisasi ini, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut cukup menggembirakan karena menunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia diterima di negara lain. Namun apabila dilihat dari sektor informal yang mendominasi, maka kondisi ini cukup memprihatinkan, karena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal biasanya minim pengalaman dan perlindungan dalam kontrak kerja, sehingga bisa menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan yang dimulai sebelum bekerja di luar negeri, saat bekerja dan setelah kepulangannya di Indonesia.

Selain masalah internal atau pribadi yang dihadapi oleh TKI sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, berdasarkan hasil laporan penelitian, kondisi penempatan TKI yang kurang menguntungkan adalah disebabkan oleh beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya sistem informasi dan rekrutmen untuk mempertemukan antara pencari kerja dan peluang kerja di luar negeri
2. Kurang tersedianya calon TKI yang memenuhi persyaratan sebagai TKI terampil/profesional yang memenuhi syarat rekrutmen kesempatan kerja di luar negeri
3. Belum adanya sistem pembiayaan pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan setiap calon TKI untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi kompetensi yang diminta pasar kerja ke luar negeri
4. Proses pemberangkat melalui jalur legal selama ini dinilai rumit, mahal dan berbelit – belit yang memiliki konsekuensi berbiaya tinggi sehingga banyak TKI memilih jalur ilegal
5. Masih rapuhnya sistem dan infrastruktur perlindungan bagi TKI di luar negeri (BNP2TKI, 2009)

Kelima kelemahan tersebut menyebabkan TKI tidak mempunyai pilihan dalam bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Jumlah TKI yang semakin banyak, mencapai lebih dari tujuh juta, memunculkan permasalahan yang banyak dan beragam. Permasalahan TKI dibagi menjadi tiga titik utama yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Ketiga titik tersebut saling berhubungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mafruhah tahun 2012 dengan menggunakan metode AHP menunjukkan bahwa titik penempatan mempunyai permasalahan yang paling kompleks yang membutuhkan penanganan serius. BNP2TKI mengklasifikasikan kasus yang dihadapi oleh TKI pada masa penempatan menjadi 21 kasus. Kasus yang paling banyak dihadapi adalah TKI ingin dipulangkan, setelah dilakukan identifikasi mendalam maka diperoleh hasil bahwa kasus ini berhubungan dengan ketidak sesuaian antara pekerjaan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pekerjaan ketika di negara tujuan. Kasus yang dihadapi kedua adalah gaji tidak dibayar dan meninggal di tempat kerja. Jumlah permasalahan terbanyak berdasarkan negara tujuan, terjadi di jazirah Arab yaitu di Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar, sedangkan negara dengan jumlah kasus yang bisa dikatakan tidak ada adalah Korea Selatan dengan jumlah kasus sebanyak 4 selama 3 tahun. Permasalahan TKI bervariasi dibedakan menjadi 21 item kasus, permasalahan tertinggi adalah pada TKI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayarkan dan meninggal dunia di negara tujuan.

Tabel 6.4. Kasus yang dilaporkan TKI data tahun 2012 - 2015

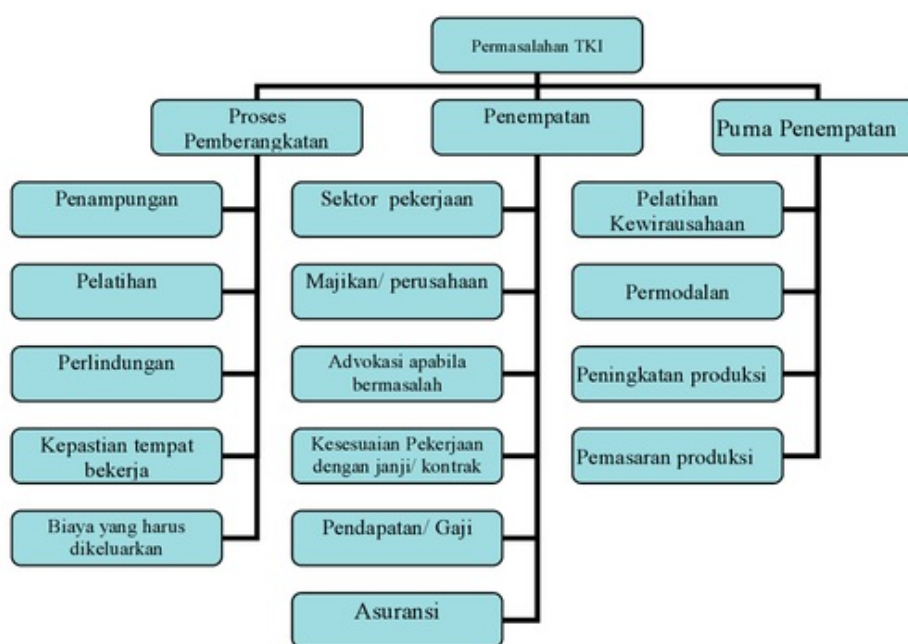
NO	JENIS KASUS	2012	2013	2014	2015	TOTAL
1	TKI Ingin Dipulangkan	1030	1055	818	524	3427
2	Gaji tidak dibayar	898	666	514	488	2566
3	Putus Hubungan Komunikasi	636	527	359	287	1809
4	Meninggal dunia di negara tujuan	550	363	496	680	2089
5	Pekerjaan tidak sesuai PK	622	329	234	171	1356
6	TKI sakit/rawat inap	227	196	175	244	842
7	Tindak kekerasan dari majikan	206	120	105	104	535
8	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak	147	147	90	167	551
9	TKI gagal berangkat	84	96	136	658	974
10	TKI mengalami kecelakaan	97	89	93	95	374
11	TKI tidak berdokumen	30	120	73	81	304
12	TKI dalam tahanan/ proses tahanan	97	60	63	46	266
13	Pasport & dokumen TKI ditahan PPTKIS	88	56	50	39	233
14	PPTKIS ilegal merekrut TKI	31	37	110	37	215
15	TKI sakit	45	64	38	38	185
16	TKI lari dari Majikan (Saudi)	60	44	41	38	183
17	TKI tidak harmonis dengan pengguna	40	45	47	0	132
18	Potongan gaji melebihi ketentuan	60	38	33	34	165
19	Meninggal dunia	55	48	28	0	131
20	Pelecehan seksual	68	40	22	0	130
21	Lainnya	355	292	428	1163	2238
TOTAL		5.426	4.432	3.953	4.894	18.705

Sumber : BNP2TKI, beberapa tahun

Data pada periode sebelum tahun 2004 belum tercatat secara rapi, Karena belum terbentuknya BNP2TKI, namun disinyalir jumlah masalah pada periode sebelumnya lebih banyak. Permasalahan dan kasus – kasus yang lain menjerat tentu saja merugikan bagi TKI. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2004, pemerintah membentuk Undang – Undang no 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Permasalahan yang dihadapi oleh TKI diklasifikasikan menjadi tiga permasalahan utama yaitu 1) Permasalahan pra penempatan; 2) Permasalahan pada saat penempatan; dan 3) Permasalahan Purna Penempatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pada masing – masing klafisikasi baik yang bersifat internal TKI maupun eksternal, yaitu permasalahan dari luar TKI. Secara grafis permasalahann TKI bisa digambarkan pada gambar 6.2 berikut ini :

Gambar 6.2 Pohon permasalahan TKI



Sumber: Mafruhah, 2012

D.1. Permasalahan Pra Penempatan

Permasalahan pada proses pemberangkatan yang dimaksudkan di sini adalah faktor – faktor yang dihadapi oleh seorang calon TKI sebelum dia diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri, meliputi:

- (i) Penampungan, yaitu tempat yang disediakan sebagai asrama atau penampungan sebelum seorang TKI diberangkatkan ke luar negeri, pada peraturan pemerintah, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), harus melakukan berbagai macam pelatihan baik yang sifatnya *hardskill* maupun *softskill* sebelum seorang TKI diberangkatkan ke luar negeri, termasuk di dalamnya komunikasi dan pemahaman mengenai budaya setempat dan adaptasi yang harus dilakukan. Pelatihan dilakukan secara terstruktur dengan jenis pelatihan, materi pelatihan dan waktu pelatihan yang telah ditentukan. Tempat penampungan harus memenuhi kebutuhan TKI dan memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan
- (ii) Pelatihan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diberikan baik bersifat teknis (*hardskill*) maupun non teknis (*softskill*) seperti komunikasi, motivasi, budaya dan psikologi baik yang merupakan keharusan dan bersertifikat maupun yang tidak
- (iii) Perlindungan, merupakan perlindungan yang diberikan kepada TKI selama menunggu proses keberangkatan khususnya ketika berada di tempat penampungan
- (iv) Kepastian tempat usaha. Seorang TKI sebelum berangkat keluar negeri harus sudah memiliki kepastian tempat di mana dia akan bekerja dan juga disampaikan kepada keluarga sehingga akan bisa melakukan kontak apabila dibutuhkan
- (v) Biaya yang dikeluarkan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang TKI agar bisa ditempatkan dan bekerja di luar negeri. Biaya meliputi biaya pelatihan dan penampungan sebelum diberangkatkan, biaya transportasi pemberangkatan dan berbagai macam tes kesehatan. Biaya bisa dibayarkan secara langsung oleh

Calon TKI atau dilakukan dengan mekanisme potong gaji, namun bagaimanapun biaya yang dikeluarkan maupun metode pembayaran harus transparan dan diketahui oleh CTKI.

Selain kelima permasalahan tersebut, sebenarnya terdapat permasalahan yang cukup berpengaruh bagi CTKI yaitu sumber informasi, kecukupan usia yang dibutuhkan dan tempat keberangkatan. Selama ini CTKI paling banyak memperoleh informasi dari sponsor atau calo dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari dinas tenaga kerja. Informasi awal tersebut inilah yang sering kali menyebabkan TKI rentan bermasalah khususnya pada aspek legalitas. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dengan keberangkat melalui calo atau sponsor menjadi penyebab utama munculnya TKI ilegal. Pada beberapa kantong TKI, dinas tenaga kerja mulai melakukan kegiatan aktif yang akan memberikan kesempatan kepada CTKI untuk mendapatkan peluang kerja secara legal dan melalui lembaga penyalur yang legal dan kompeten.

D.2. Permasalahan Penempatan

Permasalahan pada tempat Bekerja yaitu permasalahan yang akan dihadapi oleh TKI ketika bekerja di luar negeri, permasalahan pada tempat kerja meliputi:

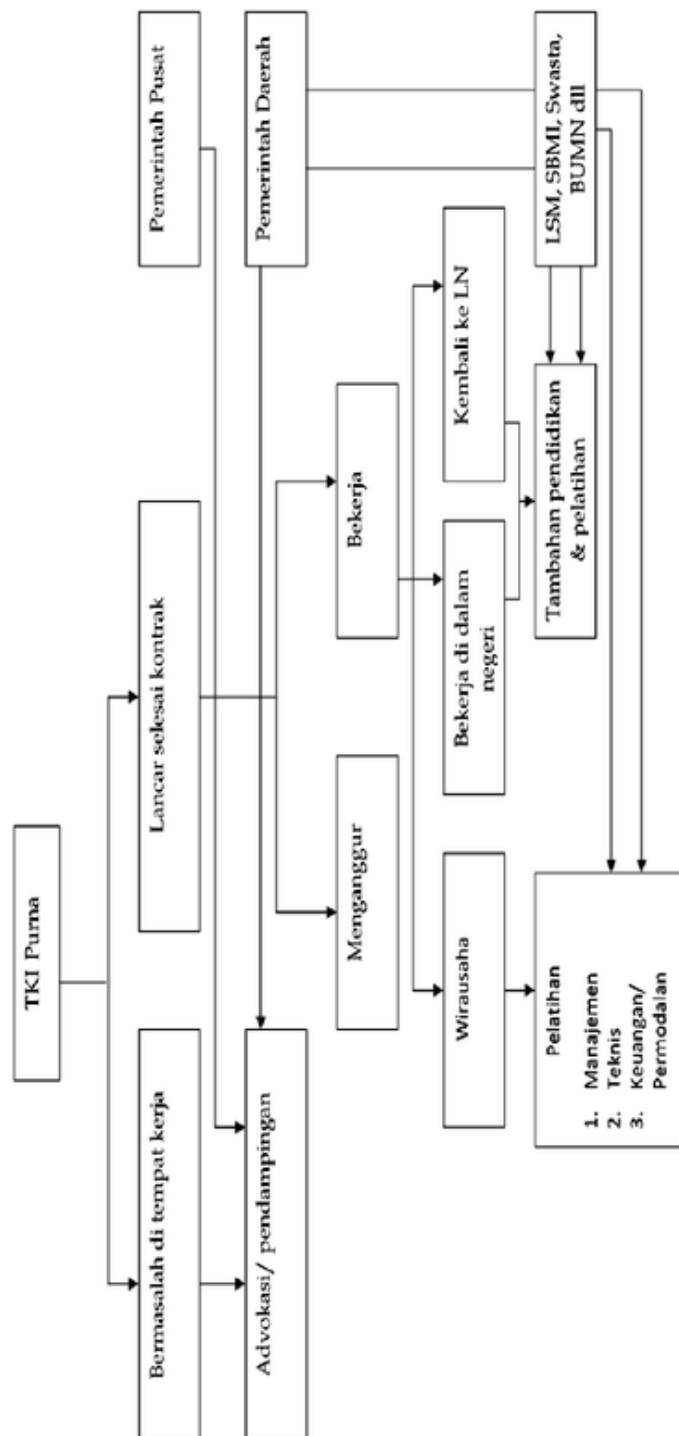
- (i) Sektor Pekerjaan, yaitu sektor formal maupun non formal
- (ii) Majikan atau perusahaan tempat bekerja, yaitu seberapa nyaman dan terjaminnya posisi di tempat bekerja, bonafid atau tidaknya tempat kerja
- (iii) Advokasi atau pendampingan, yaitu seberapa besar pendampingan atau advokasi yang akan diperolehnya ketika menghadapi masalah di tempatnya bekerja di luar negeri
- (iv) Kesesuaian pekerjaan dengan kontrak yang dijanjikan yaitu apakah pekerjaan yang diperolehnya di luar negeri seperti kontrak yang ditandatangani atau dijanjikan oleh PPTKIS

- (v) Pendapatan atau gaji yang diterima yaitu besaran gaji atau pendapatan yang akan diterima oleh TKI selama berkeja di luar negeri
- (vi) Asuransi, yaitu perlindungan yang akan diperolehnya apabila dia mengalami kecelakaan atau masalah di tempat kerja, baik itu asuransi disiapkan oleh PPTKIS dalam negeri maupun oleh perusahaan atau majikan tempatnya bekerja di luar negeri

Dari tahun ke tahun penempatan TKI pada sektor informal semakin berkurang terlebih lagi dengan berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan peluang kerja sektor informal yang lebih baik baik CTKI.

D.3. Permasalahan purna penempatan yaitu permasalahan yang dihadapi oleh TKI setelah kepulangan kembali ke tanah air. Kebijakan pemerintah melalui BNP2TKI menyebutkan bahwa bekerja menjadi TKI hanya merupakan katup pengaman ketika lapangan kerja sulit di tanah air, sehingga setelah menyelesaikan kontrak dan kembali ke tanah air maka TKI purna diharapkan akan memanfaatkan keahlian yang diperolehnya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia atau menjadi wirausaha. Secara detail harapan dan permasalahan yang dihadapi oleh TKI purna sebagaimana dalam gambar 6.3 berikut ini:

Gambar 6.3 TKI purna penempatan



Gambar 6.3 menunjukkan bahwa terdapat dua harapan utama bagi TKI purna yaitu untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya atau memulai pekerjaan sebagai wirausaha baru. Pada masing – masing pilihan TKI purna tetap membutuhkan adanya berbagai pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan yang dimilikinya baik dalam usaha atau memproduksi barang sampai dengan ketrampilan untuk mengelola atau manajemen sederhana bagi usaha.

E. Remittansi TKI

Jumlah TKI yang berada di luar negeri berbanding lurus dengan jumlah remitansi yang dikirimkan ke Indonesia. Semakin banyak TKI, maka semakin banyak remitansi yang akan dikirimkan. Remitansi adalah dana yang dikirimkan oleh tenaga kerja dari luar negeri kepada keluarganya di tanah air. Jumlah remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kawasan penyumbang remitansi tertinggi adalah 1) Timur Tengah dengan jumlah remitansi sebesar 3.521 juta dollar; 2) Asean yaitu sebesar 2.599 juta dollar dengan remitansi tertinggi dibukukan oleh TKI dari Malaysia; 3) ASIA selain ASEAN yaitu sebesar 2.111 juta dollar; 4) Amerika dengan remitansi sebesar 714 juta dollar; 5) Eropa dengan remiten sebesar 159 juta dollar; 6) Australia dengan remitansi sebesar 58 juta dollar dan terakhir adalah di kawasan 7) Afrika dengan remitansi yang dikirimkan sebesar 52 juta dollar. Sedangkan berdasarkan negara maka penyumbang remitansi terbanyak adalah dari Saudi Arabia, kemudian Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Amerika Serikat.

Tabel 6.3

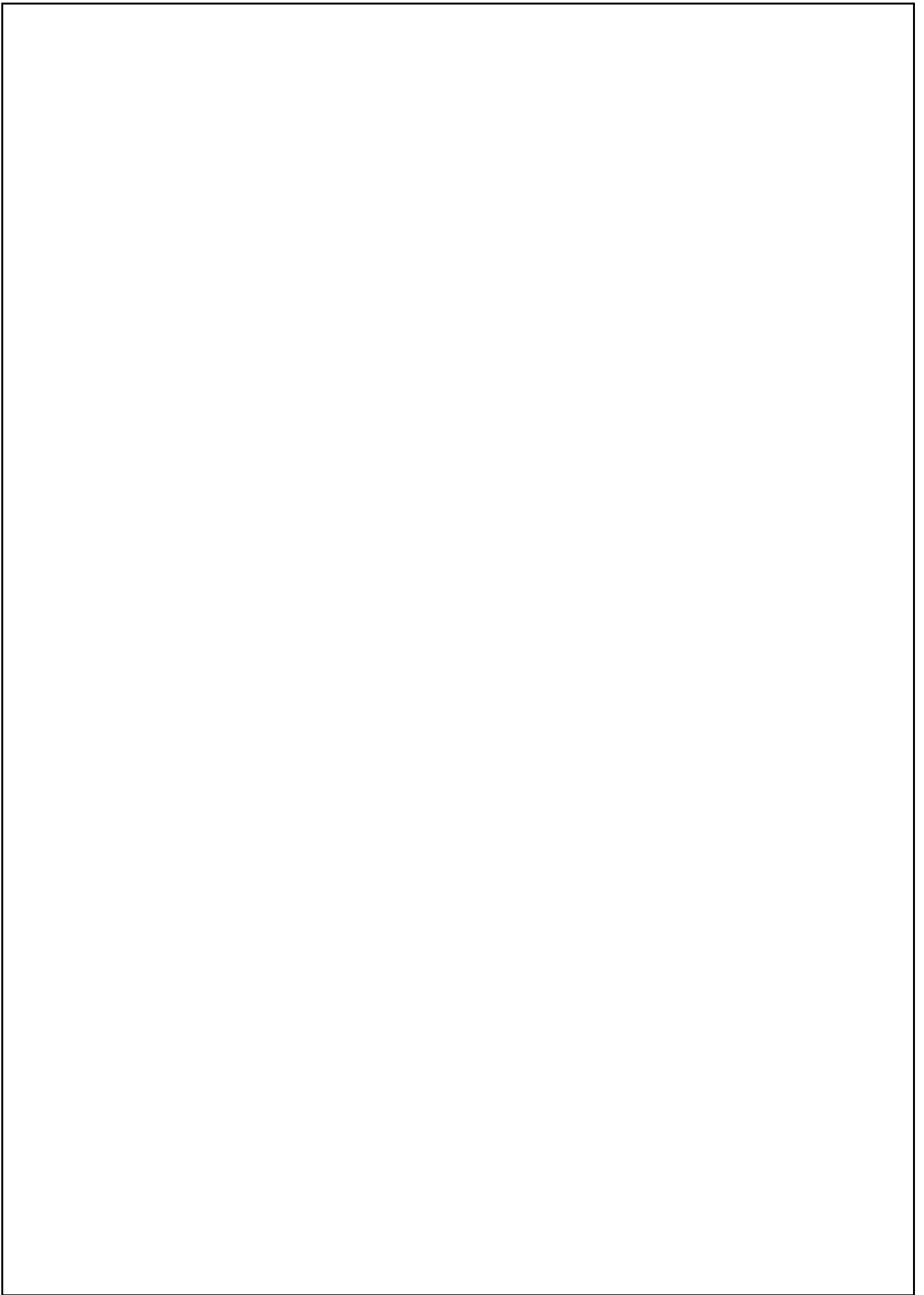
Data Remitansi TKI per negara 2010 – 2015 (dalam millions US \$)

NO	NEGARA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	ASEAN	2.586	2.628	2.711	3.723	2.943	2.599
1	Malaysia	2.312	2.306	2.321	3.194	2.542	2.193
2	Singapura	226	261	308	403	304	300
3	Brunei Darussalam	48	59	75	108	82	91
4	Lainnya	-	2	7	18	15	15
II	Asia selain ASEAN	1.186	1.275	1.474	1.973	1.616	2.111
1	Hongkong	450	486	554	734	573	734
2	Taiwan, Provinsi China	457	492	578	801	668	897
3	Korea Selatan	91	94	123	190	178	269
4	Jepang	152	160	175	196	154	163
5	Makau	36	42	40	44	36	41
6	Lainnya	-	1	4	8	7	7
III	AUSTRALIA DAN OCEANIA	3	3	6	18	46	58
1	Australia	3	3	6	14	40	48
2	Lainnya	-	-	-	4	6	10
IV	Timur Tengah	2.760	2.652	2.376	2.717	2.870	3.521
1	Arab Saudi	2.284	2.213	1.938	2.142	2.267	2.762
2	UEA	197	204	206	271	279	333
3	Kuwait	75	32	23	34	37	42
4	Bahrain	11	14	17	24	24	33
5	Qatar	40	50	62	87	81	103
6	Oman	30	30	28	38	56	103
7	Yordania	103	90	77	94	101	117
8	Mesir	-	-	-	-	1	-

9	Siprus	4	14	13	5	2	2
10	Sudan	-	-	-	-	-	-
11	Lainnya	16	5	12	22	22	26
V	AFRIKA	6	6	16	41	46	52
1	Afrika Selatan	5	6	14	39	44	48
2	Lainnya	1	-	2	2	2	4
VI	AMERIKA	100	150	374	668	691	714
VII	EROPA	88	20	59	125	136	159
1	Belanda	-	2	7	16	25	32
2	Italia	-	5	19	37	32	38
3	Jerman	4	4	6	13	18	21
4	Inggris	3	3	5	8	11	11
5	Perancis	-	-	-	4	4	4
6	Spanyol	4	5	11	20	16	19
7	Lainnya	77	1	11	27	30	34

Sumber: Laporan Bank Indonesia, 2016

Remitansi mempunyai beberapa implikasi antara lain (1) Terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga TKI di daerah asal; (2) Bertambahnya permintaan baik secara lokal maupun regional yang akan disambut dengan pertambahan produksi; (3) Sebagian remitansi digunakan sebagai dana pendidikan sehingga akan meningkatkan jumlah anak yang sekolah di kantong TKI; (4) Remittan yang digunakan untuk berwirausaha akan mampu menyerap tenaga kerja (Flachaire et al. 2014)



BAB VII

PERATURAN KEBIJAKAN TKI DI INDONESIA

A. Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan yang mendukung penyelesaian permasalahan TKI ditetapkan baik pada tataran pemerintah pusat melalui Kementerian ketenagakerjaan, BNP2TKI maupun pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sebenarnya telah secara detail mengatur kegiatan serta program kerja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja di tingkat kabupaten/kota, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sampai dengan perwakilan pemerintah yang ada di luar negeri. Secara rinci masing – masing instansi bertanggung jawab sebagaimana tabel berikut 7.1

Tabel. 7.1. Kegiatan dan Instansi Penanggung Jawab Penanganan TKI dari titik para penempatan, penempatan sampai dengan pasca penempatan

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
1.	Memorandum Of Understanding	Pemerintah (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	pasal 11 ayat (1) UU 39/2004
2.	Surat Ijin PPTKIS	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	pasal 12 UU 39/2004
3.	Penilaian Mitra Usaha di Negara Tujuan (Agency)	Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	pasal 25 ayat (1) UU 39/2004
4.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Penempatan	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
5.	Dokumen Surat Permintaan TKI	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
6.	Dokumen Rancangan Perjanjian Kerja	Perwakilan Republik Indonesia	penjelasan pasal 25 ayat (2) UU 39/2004
7.	Surat Izin Pengerahan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	pasal 32 ayat (1) UU 39/2004
8.	Persetujuan Bahan penyuluhan Informasi Peluang Kerja di Luar Negeri	BNP2TKI	pasal 34 ayat (3) UU 39/2004
9.	Surat Pengantar Rekrut	BP3TKI	pasal 9 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
10.	Pendaftaran SIP, Surat Pengantar Rekrut, Rancangan Perjanjian Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	pasal 10 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
11.	Pendaftaran Petugas Rekrut dari PPTKIS	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota	pasal 12 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
12.	Pendaftaran Calon TKI	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 12 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
13.	Seleksi minat, bakat, dan ketrampilan calon TKI	Petugas antar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dan Petugas PPTKIS	pasal 16 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
14.	Pembuatan daftar nominasi calon TKI yg lulus seleksi	Petugas antar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dan Petugas PPTKIS	pasal 19 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
15.	Penerbitan Berita Acara Hasil seleksi calon TKI	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 19 ayat (4) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
16.	Izin Perusahaan Asuransi	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
17.	Penetapan Biaya Penempatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 46 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
18.	Penandatanganan Perjanjian penempatan TKI (dilampiri bukti pembayaran asuransi Para Penempatan)	Diketahui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	pasal 19 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
19.	Rekomendasi Paspor	Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota	Penjelasan pasal 51 huruf f UU 39/2004
20.	Penerbitan Paspor	Ditjan Imigrasi	
21.	Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
22.	Izin Tempat Penampungan	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	
23.	Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
24.	Pedoman Pendidikan dan Pelatihan kerja Calon TKI	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 23 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
25.	Sertifikasi Kompetensi	Lembaga sertifikasi profesi yg dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Pasal 22 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
26.	Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pasal 36 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
27.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan	BP3TKI difasilitasi oleh dinas Ketenagakerjaan Provinsi	Pasal 32 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
28.	Pembayaran Asuransi Masa dan Pra Penempatan	PPTKIS	
29.	Pembayaran DP3TKI	PPTKIS	
30.	Bebas Fiscal Luar Negeri	Ditjen Pajak	
31.	Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	BNP2TKI	Pasal 38 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
32.	Penandatanganan Perjanjian Kerja	Dilakukan dihadapan pejabat dinas ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/ Kota	Pasal 27 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
33.	Persetujuan Perjanjian Kerja Perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja	Perwakilan Republik Indonesia	Pasal 29 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
34.	Pelaporan kedatangan TKI pada Perwakilan RI	PPTKIS	Pasal 74 ayat (2) UU 39/2004
35.	Perlindungan TKI di Luar Negeri	Perwakilan RI	Pasal 78 ayat (1) UU 39/2004
36.	Pelaporan TKI perseorangan	Dinas Kabupaten/Kota, Perwakilan Republik Indonesia	Pasal 52 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
37.	Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
38.	Pelaporan Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI (setiap 6 bln) kepada Menteri dan BNP2TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (4) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
39.	Pelaporan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan RI , tembusan kepada Menteri dan BNP2TKI	PPTKIS melalui Mitra Usahanya dan atau Perwakilan PPTKIS	Pasal 56 ayat (3) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
40.	Pelayanan Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal	PPTKIS	Pasal 56 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
40.	Pelayanan Kepulangan TKI	Pos Pelayanan TKI	Pasal 58 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
41.	Penyelesaian hak-hak TKI yg mengalami PHK	PPTKIS	Pasal 59 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010

NO	KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
42.	Penyelenggaraan Layanan satu Atap di Daerah	Gubernur sebagai wakil Pemerintah	Pasal 43 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
43.	Koordinasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI	BP3TKI, dinas provinsi, dinas Kabupaten / Kota dan instansi pemerintah terkait.	Pasal 42 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
44.	Izin Penempatan TKI oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta bukan PPTKIS	Menteri atau pejabat yang ditunjuk	Pasal 50 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
45.	Penerbitan KTKLN untuk TKI yang bekerja secara perseorangan	BNP2TKI	Pasal 52 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
46.	Pelayanan data dan informasi TKI	BNP2TKI	Pasal 53 ayat (2) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
47.	Pemantauan keberadaan dan kondisi TKI	PPTKIS	Pasal 55 ayat (1) Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
48.	Pelayanan Kepulangan TKI	Pos Pelayanan TKI	Pasal 58 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
49.	Penyelesaian hak-hak TKI yg mengalami PHK	PPTKIS	Pasal 59 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
50.	Pelaporan pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri	BNP2TKI	Pasal 60 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010
51.	Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI	Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.	Pasal 61 Permenakertrans No: PER.14/MEN/X/2010

Sumber: Peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan

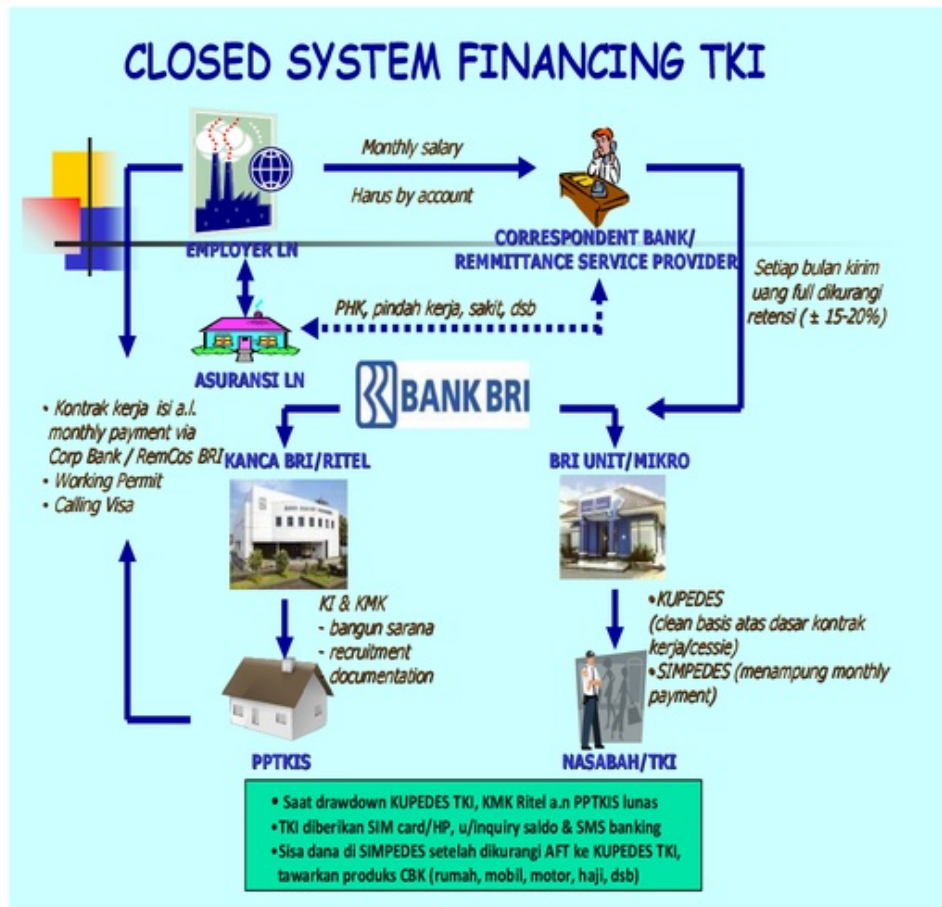
B. Program Kebijakan BUMN/swasta yang mendukung fasilitasi TKI

Masukan berikutnya adalah dari Perbankan, BUMN dan LSM. Salah satu Perbankan yang secara intens ikut terlibat dalam fasilitasi TKI adalah BRI. Beberapa program yang dilakukan oleh BRI antara lain sebagai berikut:

Program BRI fast. Terdapat 3 titik sasaran yang dibidik oleh pemerintah kabupaten Sragen dalam hal ini yaitu

- a. Pada titik pra penempatan, yaitu pihak BRI memberikan pinjaman pembiayaan bagi TKI yang sudah memiliki kepastian berangkat dengan kompensasi pengiriman remitten melalui BRI dan pelunasan bisa dilakukan dengan pemotongan remmiten yang dikirim ke luar negeri. Dalam perjanjian ini, yang bisa diakomodasi baru bagi TKI pada sektor formal
- b. Pada titik penempatan atau setelah bekerja, maka BRI fast akan melayani dalam pengiriman remitten. Sesuai dengan MOU, BRI fast untuk wilayah Jateng dan Yogyakarta dipusatkan di Sragen. Dengan dilengkapi satu kantor cabang pembantu, satu kantor teras serta 32 kantor unit, sehingga akan memberikan kemudahan bagi keluarga TKI untuk mengambil remitten tanpa harus melewati atau minta bantuan pihak – pihak lain, karena hampir di setiap titik kantong TKI pasti terdapat kantor unit BRI.
- c. Pada titik Purna Penempatan atau setelah pulang dari luar negeri, BRI memberikan fasilitas KUR dengan prioritas bagi TKI, sehingga sampai saat ini banyak TKI pur yang sudah sukses mengelola usahanya. Secara lebih detail beberapa contoh kasus TKI purna yang sukses mengelola wirausaha akan dibahas dalam sub bab tersendiri. Berikut ini system yang dibuat oleh BRI dalam rangka fasilitasi bagi TKI

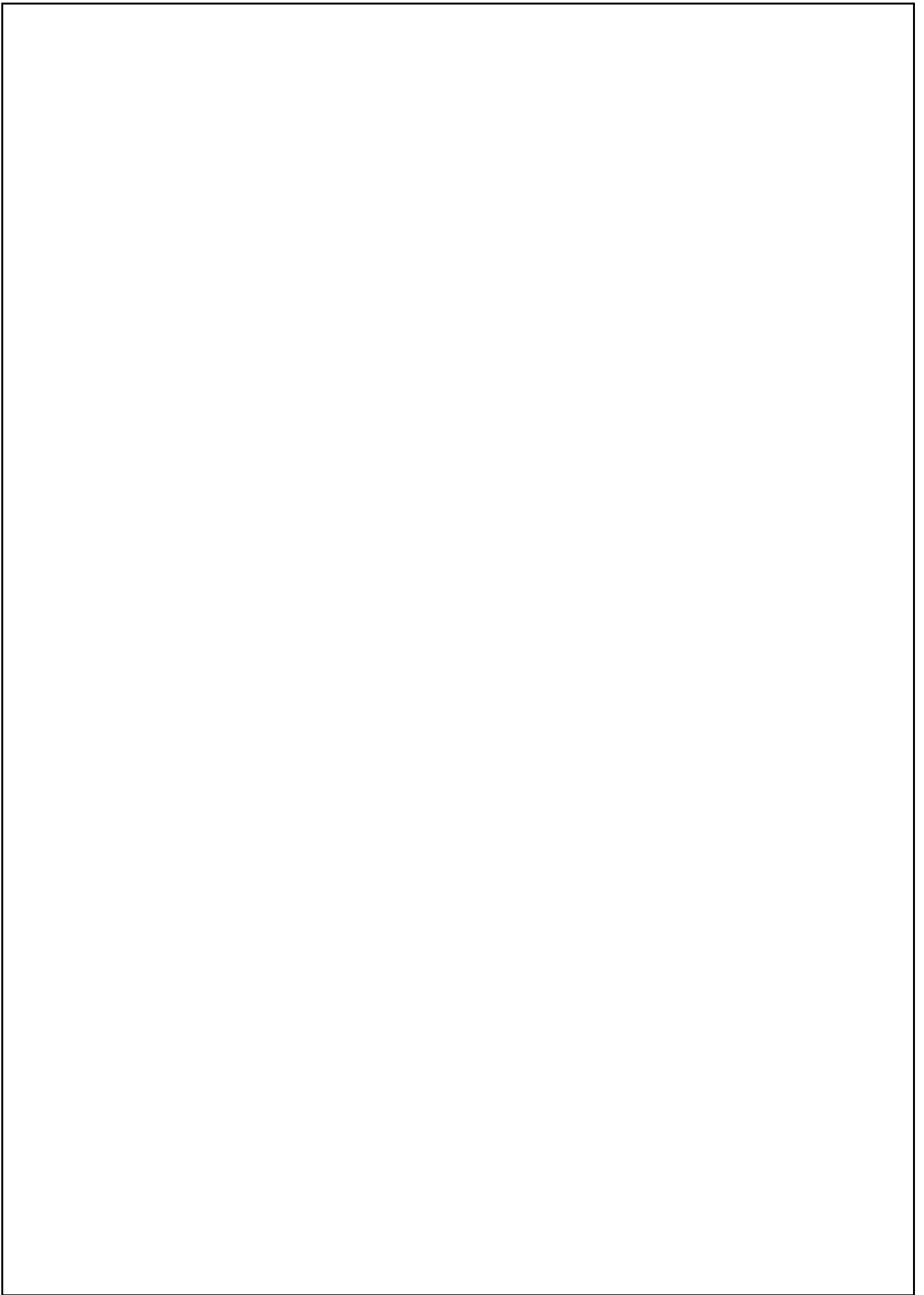
Gambar 7.1. Fasilitas BRI untuk TKI



C. Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mendukung fasilitasi TKI

Hasil penelitian terhadap TKI menunjukkan prioritas lain yang membutuhkan pelatihan dan pendampingan adalah pada pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas produksi. Oleh sebab itu maka Perguruan Tinggi melalui Tri Dharma melakukan kegiatan – kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi TKI purna antara lain:

1. Business Motivation Training, merupakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi bagi TKI purna untuk berani memulai usaha baru
2. Pelatihan pengembangan produk, merupakan pelatihan untuk mengidentifikasi produk yang bisa dipilih oleh TKI
3. Pelatihan manajemen keuangan dasar. Salah satu titik lemah wirausaha baru adalah ketidak mampuan untuk membedakan antara keuangan rumah tangga dan keuangan usaha sehingga sering sekali usaha yang tengah berjalan gagal karena kegagalan dalam mengelola keuangannya.
4. Pembukaan jejaring permodalan dan jejaring pemasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R.H. & Page, J., 2005. Do international migration and remittances reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33(10), pp.1645–1669.
- Ambrosius, C. & Cuecuecha, A., 2016. Remittances and the Use of Formal and Informal Financial Services. *World Development*, 77, pp.80–98. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.08.010>.
- Amuedo-Dorantes, C. & Mundra, K., 2013. Immigrant Homeownership and Immigration Status: Evidence from Spain. *Review of International Economics*, 21(2), pp.204–218.
- BNP2TKI, 2015. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2014*, JAKARTA.
- Borjas, G.J., 2015. Immigration and Globalization: A Review Essay. *Journal of Economic Literature*, 53(4), p.14.
- Borjas, G.J., 2015. Immigration and Globalization *Journal of Economic Literature* 2015 Immigration. , pp.961–974.
- Carling, J., 2005. *Migrant remittances and development cooperation*, Oslo Norway: PRIO.
- Dustmann, C. & Glitz, A., 2011. *Chapter 4 - Migration and Education*, Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53444-6.00004-3>.
- Dustmann, C. & Kirchkamp, O., 2002. The optimal migration duration and activity choice after re-migration. *Journal of Development Economics*, 67(2), pp.351–372.

Flachaire, E., García-Peñalosa, C. & Konte, M., 2014. Political versus economic institutions in the growth process. *Journal of Comparative Economics*, 42(1), pp.212–229. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2013.05.001>.

Frankel Jeffrey A., 2009. *Are Bilateral Remittances Countercyclical?*, Cambridge.

Gagnon, 2014. *Migration with Labour*, Europ. Available at: ean Union.

Ghosh, B., 2006. *Migrants Remittances and Development; Myths, Rhetoric and Realities*, Den Haag.

Hines, A., 2014. Migration , Remittances and Human Capital Investment in Kenya.

Hugo, G., 1993. *Theories of International Migration*.

Imai, K.S. et al., 2014. Remittances, growth and poverty: NEW evidence from Asian countries. *Journal of Policy Modeling*, 36(3), pp.524–538. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2014.01.009>.

IOM, 2010. *Remittances and Investment Opportunities for Egyptian Migrants*, Cairo.

Khodeir, A.N., 2015. Migration Remittances Inflows and Macroeconomic Shocks : The Case of Egypt. , 5(4), pp.1001–1010.

Lekhe, F.S. et al., 2014. Giffen Behavior for Rice Consumption in Rural Bangladesh. *International Journal of Applied Economics*, 11(1), pp.48–59.

Leon-ledesma, M. et al., 2006. Remittances , Institutions and Economic Growth. , (2139).

Lueth, E. & Ruiz-Arranz, M., 2006. A Gravity Model of Workers ' Remittances. *IMF Working Paper - Asia and Pacific Department*, 06.

- Massey, D.S., 1999. International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century The Role of the State. *Population and Development Review*, 25(2), pp.303–322.
- Massey, D.S. et al., 1993. Theories of International A Review Migration : and Appraisal. *Population English Edition*, 19(3), pp.431–466. Available at: <http://www.jstor.org/pss/2938462>.
- Mattoo, A. & Neagu, I.C., 2006. Brain Waste ? Educated Immigrants in the US Labor Market. , (June).
- Michael Todaro, S.S., 2012. *Ekonomi Pembangunan* 11th ed., Surabaya: Erlangga Surabaya.
- Piracha, M. & Vadean, F., 2010. Return Migration and Occupational Choice: Evidence from Albania. *World Development*, 38(8), pp.1141–1155. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.12.015>.
- Pozo, S. & Thieme, 2006. Classical Migration Research. , (2006), pp.36–40.
- Presbitero, A.F., Bettin, G. & Spatafora, N., 2014. Remittances and Vulnerability in Developing Countries. *the World bank*, (March).
- Sayan, S., 2006. *Business Cycles and Workers' Remittances: How Do Migrant Workers Respond to Cyclical Movements of GDP at Home?*, TURKEY.
- Singh, R.J., Haacker, M. & Lee, K., Determinants and Macroeconomic Impact of Remittances in Sub-Saharan Africa.
- Taylor, J.E., 2006. International migration and economic development. *In International symposium on international migration and development*, 28(June), p.30.
- Yang, D., 2008. International Migration , Remittances and Household Investment : Evidence From Philippine Migrants ' Exchange Rate Shocks *. , 118(2004), pp.591–630.

Buku Migrasi

ORIGINALITY REPORT

13%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ econstor.eu

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Buku Migrasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : **BUKU** *

Judul Buku : Migrasi dan Permasalahan Sebuah Overview Kondisi di Indonesia
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Izza Mafruhah, Nunung Sri Mulyani, Nurul Istiqomah)
 Status Pengusul : ~~Penulis pertama~~ / penulis ke 3 **
 Identitas Buku :
 a. Nomor ISBN : 978-602-60585-6-0
 b. Edisi : Cetakan Pertama, Edisi I
 c. Tahun terbit : 2017
 d. Penerbit : CV. Djiwa Amarta Press
 e. Jumlah Halaman : 119

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku Referensi
 Buku (beri ~ pada kategori yang Buku Monograf
 Tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku 40		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsure isi buku (20%)	30		6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	35		10,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	30		9
d. Keengkapan unsure dan kualitas terbitan/buku (20%)	35		7
Total = (100%)			32,5
Nilai Pengusul =			

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :

Update data perlu dilakukan untuk terbitan berikutnya supaya bisa menggambarkan kondisi saat ini yang terjadi.

Surakarta, 7 Mei 2018

Reviewer**

Prof. Dr. Yunastuti Purwaningsih, M.P
 NIP. 1959061984032001

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : **BUKU** *

Judul Buku : Migrasi dan Permasalahan Sebuah Overview Kondisi di Indonesia
 Jumlah Penulis : 3 Orang (Izza Mafruhah, Nunung Sri Mulyani, Nurul Istiqomah)
 Status Pengusul : ~~Penulis pertama~~ / penulis ke 3 **
 Identitas Buku :
 a. Nomor ISBN : 978-602-60585-6-0
 b. Edisi : Cetakan Pertama, Edisi I
 c. Tahun terbit : 2017
 d. Penerbit : CV. Djiwa Amarta Press
 e. Jumlah Halaman : 119

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku Referensi
 Buku (beri ^ pada kategori yang Buku Monograf
 Tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku 40		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsure isi buku (20%)	37		7,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	35		10,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	36		10,8
d. Keengkapan unsure dan kualitas terbitan/buku (20%)	38		9,6
Total = (100%)			36,3
Nilai Pengusul =			

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :

- Perlu perbaikan penulisan dan struktur bahas Indonesia yg benar
 - pembahasan pada setiap bab lebih banyak menyajikan teori, kurang fokus pada kajian fenomena di Indonesia
 (fenomena, permasalahan, kebijakan, pembahasan dan prediksi)

Surakarta, Mei 2018

Reviewer

Subriyandono, M.Si
 NIP. 196002211986011001

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret